

Bab VII

Keterpaduan Strategi Pengembangan Kabupaten Gresik

7.1. ARAHAN KAWASAN STRATEGIS RTRW KABUPATEN GRESIK

Perkotaan di Indonesia umumnya memiliki karakteristik *urban* (perkotaan) dan *rural* (perdesaan) yang saling berkaitan. Kondisi tersebut juga terjadi di wilayah perencanaan, berdasar pada karakteristik Kabupaten Gresik tersebut maka perlu untuk dilakukan arahan sistem penetapan kawasan perdesaan dan perkotaan agar kegiatan perkotaan dan perdesaan di wilayah perencanaan dapat saling bersinergi sehingga disparitas pertumbuhan wilayah perdesaan dan perkotaan dapat tereliminir.

Sistem penetapan kawasan perkotaan dan perdesaan pada penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik ini, akan menggunakan pendekatan teoritis dan konseptual yang dikemukakan oleh beberapa ahli tata ruang. Berikut akan dipaparkan konsep-konsep serta teori yang digunakan sebagai dasar dalam penetapan kawasan perdesaan dan perkotaan di wilayah perencanaan.

a. Kawasan Perkotaan

Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perkotaan adalah:

1. Kawasan perkotaan ditetapkan adalah Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas.
2. IKK pada masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Gresik.

b. Kawasan Perdesaan

Kawasan perdesaan adalah seluruh wilayah administrasi desa di Kabupaten Gresik, selain dari wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan perkotaan.

7.1.1. Sistem Perkotaan

Sistem perkotaan dalam kegiatan ini, akan dijabarkan dalam beberapa pokok pembahasan, yaitu Hirarki (Besaran) Perkotaan, Sistem Pusat Kegiatan, Pengembangan Fasilitas Kawasan Perkotaan serta pembahasan mengenai Pengembangan Perkotaan Metropolitan.

7.1.1.1. Pusat Kegiatan

Pemantapan struktur kota-kota di Kabupaten Gresik pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari jalur upaya pemantapan-pemantapan fungsi kota dalam kerangka strategi pengembangan pola tata ruang Kabupaten Gresik. Dalam kaitannya dalam jalur upaya ini, struktur kota-kota diarahkan untuk mencapai tujuan keseimbangan perkembangan ruang kota dan wilayah belakangnya. Berdasarkan analisis terhadap struktur kota yang telah ada di Kabupaten Gresik, dengan mempertimbangkan struktur administrasi kota, hierarki penduduk (ukuran jumlah penduduk), dan hierarki fungsional (kelengkapan fasilitas perkotaan), maka untuk masa yang akan datang perlu adanya pemantapan terhadap orde kota.

Penetapan Pusat Kegiatan melihat pada variabel jumlah penduduk dan variabel lainnya sesuai analisa yang telah dikembangkan pada bagian analisa struktur wilayah. Berbagai data yang bersifat spasial pada bagian analisa struktur wilayah, dikaji kembali dengan melihat kerangka spasial yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan meninjau skala pelayanan tiap kota tersebut sesuai dengan fungsinya. Hal ini berarti kota dipandang sebagai konsentrasi kegiatan atau fungsi tertentu dengan cakupan wilayah tertentu yang berorientasi terhadapnya. Pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, yang terdiri atas:

1. PKN yang berada di wilayah kabupaten;
2. PKW yang berada di wilayah kabupaten;
3. PKL yang berada di wilayah kabupaten;
4. PKS di wilayah kabupaten; dan
5. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu:
 - a) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa; dan
 - b) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Dalam kaitannya dengan perwilayahan pembangunan yang akan diterapkan di Kabupaten Gresik, terdapat pusat-pusat pembangunan yang perlu dipertimbangkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, banyak terjadi penyimpangan terhadap perkembangan pusat-pusat pengembangan. Oleh karena itu kebijaksanaan perwilayahan pembangunan diarahkan pada keberlanjutan pengembangan pusat kegiatan berdasarkan arahan berikut:

- Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

Berdasarkan PP No. 26 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kawasan perkotaan yang diklasifikasikan sebagai PKN

memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup nasional atau melayani beberapa provinsi. Kawasan perkotaan yang diarahkan untuk berfungsi sebagai PKN di Provinsi Jawa Timur adalah Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dan Malang.

Sesuai dengan arahan struktur ruang dalam RTRWN yang juga diakomodasi dalam RTRW Provinsi Jawa Timur, Pusat Kegiatan Nasional di Kabupaten Gresik yang diarahkan di PKN Gerbangkertosusila.

- Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah semua ibukota kecamatan di Kabupaten Gresik. PPK diarahkan di Ibukota Kecamatan (IKK) Kebomas, IKK Gresik, IKK Wringinanom, IKK Driyorejo, IKK Menganti, IKK Cerme, IKK Manyar dan IKK Bungah, IKK Kedamean, IKK Benjeng, IKK Balongpanggang, IKK Dudusampeyan, IKK Sidayu, IKK Dukun, IKK Panceng, IKK Ujungpangkah, IKK Sangkapura, dan IKK Tambak.

7.1.2. Sistem Perdesaan

Arahan pengembangan sistem perdesaan adalah penataan struktur ruang perdesaan sebagai sistem pusat kegiatan di perdesaan yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan di perdesaan. Sistem pusat kegiatan di desa pusat pertumbuhan secara spasial sudah dapat dikembangkan dalam *subcluster of services*, dengan infrastruktur/kegiatan pelayanan yang dikembangkan antara lain pelayanan kegiatan finansial seperti kantor kas, kegiatan perdagangan dalam bentuk kawasan pertokoan yang dapat melayani wilayah yang lebih luas. Permukiman disekitar pusat desa dapat dikembangkan dalam sistem cluster, sehingga tidak mengganggu lahan pertanian yang ada disekitarnya. Intensitas kegiatan dikelola dalam perpektif pemberdayaan kegiatan ekonomi lokal yang terintegrasi dengan kawasan produksi di sekitarnya ataupun di desa lain yang secara struktural menjadi wilayah belakang yang dilayani oleh pusat kegiatan desa ini.

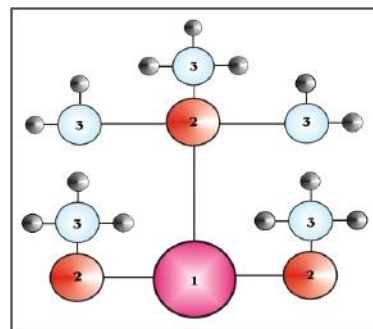
Pengelolaan struktur ruang perdesaan merupakan upaya untuk mempercepat efek pertumbuhan di kawasan perdesaan. Pengelolaan sistem perdesaan di Kabupaten Gresik akan dikembangkan dengan konsep pengembangan desa-desa agropolis. Pengembangan desa agropolis secara struktural akan terkait pula dengan pengembangan interaksi desa-kota, dan membuat keterkaitan antar pusat-pusat permukiman tersebut dalam pola sistem jaringan (*network system*), sesuai dengan konsep penataan struktur tata ruang wilayah Kabupaten Gresik dan pola pengembangan kegiatan ekonomi lokal yang diarahkan dapat memicu perkembangan wilayah yang berbasis pada sektor primer.

Sistem pusat permukiman perdesaan membentuk pusat pelayanan desa secara berhirarki sebagai berikut:

- a) Pusat pelayanan antar desa.
- b) Pusat pelayanan setiap desa.

c) Pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman.

Pusat pelayanan desa tersebut secara berjenjang memiliki hubungan dengan pusat kecamatan sebagai kawasan perkotaan terdekat, dan dengan PPK. Struktur ruang perdesaan tersebut merupakan upaya untuk mempercepat efek pertumbuhan dari PPK. Rencana struktur ruang perdesaan dapat dilihat dalam gambar 5.1.



Keterangan :
1 = Pusat SSWP
2 = Kota Kecamatan
3 = Desa Pusat Pertumbuhan
4 = Pusat Desa

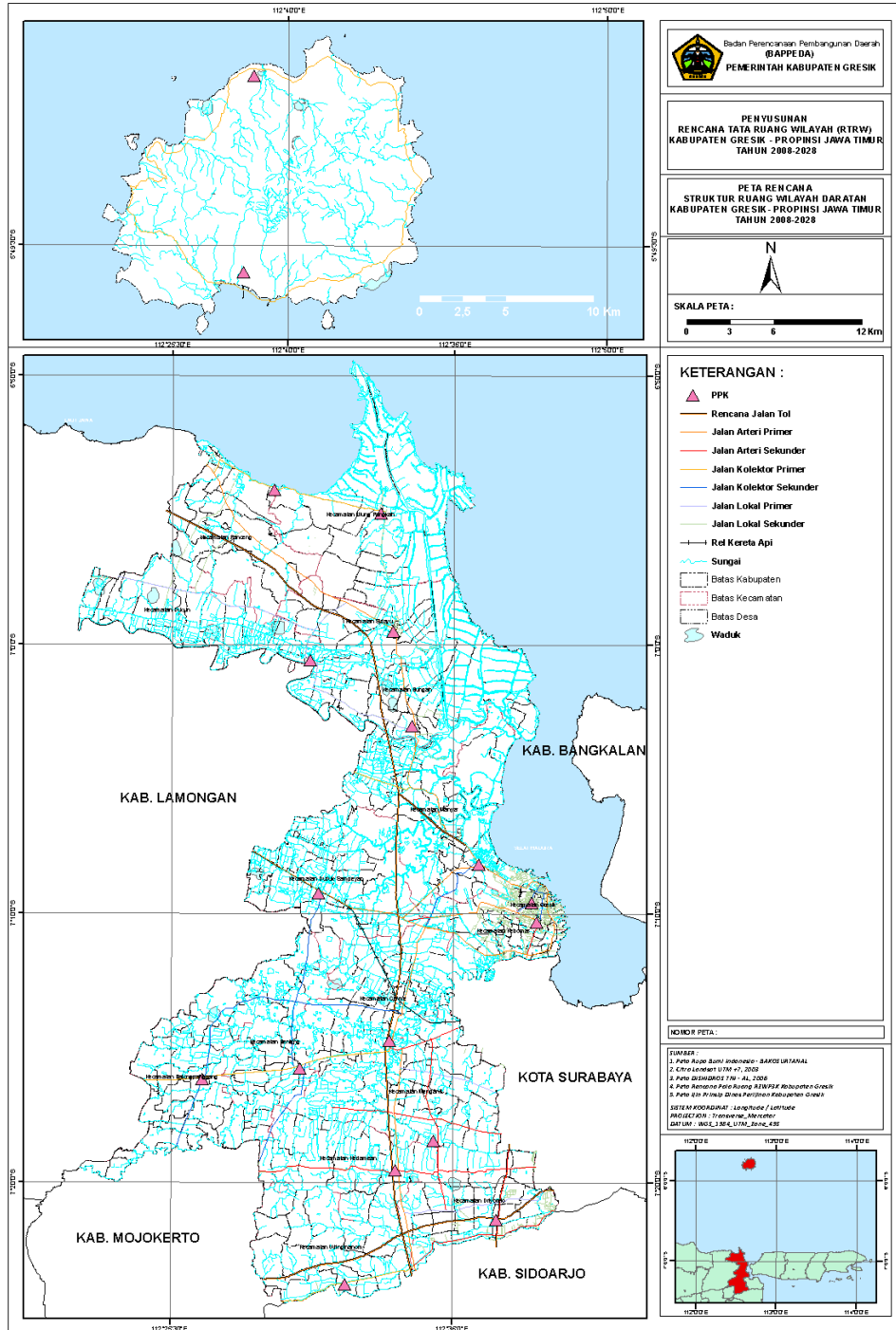
Gambar 7.1. Rencana Sistem Pusat Permukiman Perdesaan Kabupaten Gresik

Arahan pengembangan struktur ruang perdesaan melalui pembentukan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Pusat Pelayanan Lingkungan adalah Desa dengan dengan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan antar desa. PPL di Kabupaten Gresik meliputi:

- a) PPL Ngipik dan Sidokumpul di Kecamatan Gresik;
- b) PPL Randuagung, Prambangan, Segoro Madu, dan Singosari di Kecamatan Kebomas;
- c) PPL Peganden, Manyarejo, dan Sembayat di Kecamatan Manyar;
- d) PPL Pandanan, Sumari, Ambeng Ambeng Watangrejo, dan Wadak Kidul di Kecamatan Duduksampeyan;
- e) PPL Banjarsari, Sumampir, Morowudi, dan Kambingan di Kecamatan Cerme;
- f) PPL Bedanten, Sukowati, Kemangi, Mojopuro Wetan, dan Tanjung Widoro, Kecamatan Bungah;
- g) PPL Mriyunan, Randuboto, Golokan, dan Wadeng di Kecamatan Sidayu ;
- h) PPL Pangkahkulon, Pangkahwetan, dan Tanjanganawan di Kecamatan Ujung Pangkah;
- i) PPL Sumurber, Campurejo, dan Wotan di Kecamatan Panceng ;
- j) PPL Mentaras, Padang Bandung, dan Babakbawo Kecamatan Dukun;
- k) PPL Metatu, Bulang Kulon, dan Kedungrukem di Kecamatan Benjeng;
- l) PPL Ngasin, Klotok, Kedungsumber, Karangsemanding, dan Dapet di Kecamatan Balongpanggang;
- m) PPL Randupandangan, Laban, Putatlor, Domas, Kepatihan, dan Pelemwatu di Kecamatan Menganti;
- n) PPL Slempit dan Lampah Kecamatan Kedamean;

- o) PPL Pasinan Lemah Putih, Sumberame, Sembung, dan Kesamben Kulon di Kecamatan Wringinanom;
- p) PPL Bambe, Krikilan, Sumpat, dan Karangandong di Kecamatan Driyorejo;
- q) PPL Teluk Jati Dawang dan Kepuh Teluk di Kecamatan Tambak; dan
- r) PPL Sidogedungbatu, Lebak, dan Sungaiteluk di Kecamatan Sangkapura.

Gambar 7.2. Peta Rencana Struktur Ruang Daratan Kabupaten Gresik



7.1.3. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Perencanaan sistem transportasi di Kabupaten Gresik diarahkan untuk mencapai tujuan perencanaan secara lokal dan regional. Secara lokal, arahan perencanaan sistem transportasi adalah sebagai berikut:

- a) Mencapai integrasi antarkecamatan di kabupaten Gresik melalui pembenahan sistem jaringan dan sistem pergerakan untuk menyeimbangkan aksesibilitas antarkecamatan. Hal ini dicapai melalui perencanaan sistem rute/trayek dan peningkatan/pembangunan jalan.
- b) Mengatasi persoalan yang terjadi pada interaksi sistem pergerakan dan sistem kegiatan, terutama mengenai kemacetan yang terjadi di titik-titik penggantian antarmoda. Hal ini dicapai melalui perencanaan terminal-terminal lokal.
- c) Mendukung pengembangan ekonomi local.
- d) Mengantisipasi pertambahan travel demand pada 20 tahun mendatang melalui target peningkatan sarana dan prasarana jalan.

Kemudian, sistem transportasi regional diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

- a) Mendukung perkembangan ekonomi wilayah yaitu meningkatkan kelancaran arus koleksi dan distribusi barang dan jasa dengan pembenahan struktur dan fungsi jaringan jalan sesuai dengan rencana struktur pusat permukiman dan pelayanan dalam kabupaten. Hal ini dicapai melalui perencanaan prasarana kereta api, pelabuhan, bandara, dan terminal kargo.
- b) Mengantisipasi penambahan travel demand pada perbatasan antarkota/kabupaten. Hal ini dicapai melalui perencanaan rute/trayek angkutan perbatasan, perencanaan rute arteri dan jaringan jalan tol.

7.1.3.1. Sistem Jaringan Transportasi Darat

Wilayah kecamatan-kecamatan di Kabupaten Gresik memiliki tingkat aksesibilitas yang berbeda-beda terhadap pusat kota. Pengaruh perbedaan akses ini adalah terhadap kemudahan tingkat pelayanan penduduk terhadap fasilitas publik, dan pusat pelayanan ekonomi (perdagangan dan jasa).

Beberapa faktor yang menentukan tingkat aksesibilitas kecamatan kepada pusat kota adalah jarak kecamatan terhadap pusat kota, jumlah prasarana transportasi yang melayani berupa terminal formal ataupun terminal bayangan, jumlah sarana transportasi yang ada berupa angkutan umum, serta rute atau trayek yang melayani.

Persoalan jarak merupakan faktor alamiah yang tidak dapat diubah. Akan tetapi, ukuran aksesibilitas dapat ditingkatkan dengan memperbaiki tingkat kemudahan capaian terhadap masing-masing kecamatan, dengan memperbaiki waktu tempuh dari pusat kota. Hal ini berarti perlu peningkatan kondisi sarana jalan, angkutan umum, dan rute yang melayani pusat kota dengan masing-masing kecamatan.

Tabel 7.1. Tingkat Aksesibilitas Kecamatan Di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Score Jarak ke pusat kota	Score Jumlah prasarana	Score Jumlah Jenis sarana	Score Rute	Total Score Tingkat Aksesibilitas	Status
1	Wringinanom	2	12	0	2	16	sangat rendah
2	Driyorejo	3	12	0	5	20	sangat rendah
3	Kedamean	4	7	0	2	13	sangat rendah
4	Balongpanggang	3	7	0	4	14	sangat rendah
5	Benjeng	4	7	0	1	12	sangat rendah
6	Menganti	4	7	0	4	15	sangat rendah
7	Cerme	5	11	9	3	28	rendah
8	Duduksampeyan	5	16	0	1	22	sangat rendah
9	Kebomas	6	17	21	4	48	tinggi
10	Gresik	6	17	40	9	72	tinggi
11	Manyar	6	17	0	4	27	rendah
12	Bungah	5	12	0	3	20	sangat rendah
13	Sedayu	4	8	0	3	15	sangat rendah
14	Dukun	4	7	0	2	13	sangat rendah
15	Panceng	2	8	0	1	11	sangat rendah
16	Ujungpangkah	3	7	0	3	13	sangat rendah
17	Sangkapura	1	12	0	1	14	sangat rendah
18	Tambak	1	12	0	1	14	sangat rendah

Sumber : RTRW Kabupaten Gresik 2010 - 2030

A. Jaringan Jalan

Rencana Peningkatan Jalan

- a) Peningkatan kondisi jalan dari jalan batu dan tanah menjadi jalan beraspal, yaitu di Kecamatan Panceng (ruas jalan Wotan-Petung, Sukodono – Mentaras, Surowiti – Serah, Surowiti – Ngimboh, Sumerber – Wotan, Ketanen – Pantenan); Kecamatan Dukun (ruas jalan Kalirejo – Babaksari, Babakbowo – Sekargadung, Sekargadung – Dukuhkembar, Imaan – Sekargadung, Mentaras – Dukuhkembar, Karangcangkring – Dukuhkembar, Tebuwung – Tiremenggal, Lowayu – Bangeran, Wonokerto – Bulangan, Sawo - batas Kab. Lamongan); Kecamatan Sidayu (ruas jalan Purwodadi - Raci Kulon, Gedangan – Sukorejo, Wadeng – Lasem). Jaringan jalan di atas merupakan jalan-jalan poros desa pada kecamatan-kecamatan yang memiliki potensi ekonomi akan tetapi kondisi infrastruktur yang menghubungkan koleksi dan distribusi barang antar dan intrakecamatan masih buruk.
- b) Peningkatan Fungsi Jalan

1. Jalan Bebas Hambatan:

- a) Jalan Bebas Hambatan Gresik – Lamongan – Tuban
Jalan bebas hambatan yang menghubungkan Kota Gresik dengan Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Tuban. Jalur ini meneruskan jalan tol yang sudah ada (Tol Surabaya – Gresik) yang berakhir di Kecamatan Manyar melalui Kecamatan Duduksampeyan – Kabupaten lamongan – Kabupaten Tuban.
- b) Jalan Bebas Hambatan Surabaya - Mojokerto
Jalan bebas hambatan ini menghubungkan Kota Surabaya dengan Kabupaten Mojokerto melalui Gresik Selatan yaitu Kecamatan Driyorejo dan Kecamatan Wringinanom.

- c) Jalan Nasional sebagai jalan strategis meliputi Jalan Tol Bunder – Legundi.

1) Jalan Arteri Primer :

- a) Jalan Veteran – Jalan Kartini – Terminal Bunder
Jalan yang menghubungkan Jalan Veteran – Kartini – DR Wahidin Sudirohusodo – Raya Duduksampeyan – Kabupaten Lamongan.
- b) Jalan Dr. Sutomo – Usman Sadar – Gubernur Suryo - Lingkar Timur – Panceng
Jalan arteri ini juga sama dengan jalan arteri Mayjen Sungkono – Lamongan, fungsinya untuk menggantikan jalan arteri yang memasuki kota. Jalan arteri ini menghubungkan Surabaya – Gresik – Lamongan.
- c) Jalan Lingkar Barat Surabaya
- d) Batas Kabupaten Sidoarjo – Legundi - Bunder

2) Jalan Kolektor Primer :

- 1) Lakarsantri - Bringkang
- 2) Boboh – Benowo
- 3) Batas kabupaten Mojokerto – Driyorejo – Batas Kota Surabaya
- 4) Panceng – Lowayu
- 5) Panceng – Campurejo
- 6) Panceng – Delegan
- 7) Delegan Campurejo
- 8) Surowiti – Sumurber
- 9) Wotan – Petung
- 10) Sekapuk – Ujung Pangkah
- 11) Golokan – Ujung Pangkah
- 12) Banyu Urip – Ngimboh
- 13) Ngimboh – Delegan
- 14) Ujung Pangkah – Tajung
- 15) Pangkah Kulon – Boolo
- 16) Sawo – Brangki
- 17) Petiyin – Karang Cangkring
- 18) Lowayu – Petiyin
- 19) Lasem – Lowayu
- 20) Lasem – Gerdugung
- 21) Dukun – Lasem
- 22) Babak Bau – Dukuh Kembar
- 23) Mentaras – Dukuh Kembar
- 24) Karang Cangkring – Dukuh Kembar
- 25) Bungah – Dukun
- 26) Sidayu – Randuboto
- 27) Dalam Kota Sidayu
- 28) Bungah – Bedanten
- 29) Welirang – Raci Tengah

- 30) Telon Betoyo – Dagang
- 31) Sembayat – Mengare
- 32) Leran – Suci
- 33) Cerme – Metatu
- 34) Cerme Lor – Pundut Trate
- 35) Banjarsari - Gedang Kulut
- 36) Dungus – Dampaan
- 37) Duduk Sampeyan – Metatu
- 38) Benjeng – Metatu
- 39) Benjeng – Morowudi
- 40) Bulurejo – Randegan
- 41) Banter – Kali Padang
- 42) Benjeng – Balong Panggang
- 43) Balong Panggang – Metatu
- 44) Balong Panggang – Mojopuro
- 45) Balong Panggang – Dapet
- 46) Klotok – Babatan
- 47) Kedung Sumber – Tanah Landean
- 48) Dapet – Jombang delik
- 49) Boboh – Benowo
- 50) Menganti – Kepatihan
- 51) Menganti – Banjaran
- 52) Domas – Gluran Ploso
- 53) Bringkang – Lampah
- 54) Kedamean – Sidoraharjo
- 55) Sidoraharjo – Randegan
- 56) Karang Andong – Kesamben Kulon – Mondoluku
- 57) Kedamean – Widoro Anom
- 58) Driyorejo – Lakarsantri
- 59) Randegansari – Widoro Anom
- 60) Randegansari – Bangkingan
- 61) Kesamben Wetan – Tanjungan
- 62) Kesamben Wetan – Bambe
- 63) Karang Andong – Krikilan
- 64) Pening – Kesamben Kulon
- 65) Wringinanom- Kesamben Kulon
- 66) Sangkapura – Tambak
- 67) Sangkapura – Diponggo
- 68) Tambak – Diponggo
- 69) Tanjung Ori – Paromaan
- 70) Dalam Kota Sangkapura

2. Rencana Pembangunan Jalan

Pembangunan jalan untuk menghubungkan pusat IKK dengan kecamatan/desa di area pelayanannya, yaitu :

- a) Peningkatan jalan lokal primer menjadi jalan beraspal dengan Ramaja 6 m untuk ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Panceng dengan Kecamatan Dukun, Kecamatan Ujungpangkah, Kecamatan Sidayu, dan Kecamatan Bungah.
- b) Peningkatan jalan lokal primer menjadi jalan beraspal dengan Ramaja 6 m untuk ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Kebomas dengan Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Dudusampeyan.
- c) Peningkatan jalan lokal primer menjadi jalan beraspal dengan Ramaja 6 m untuk ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Driyorejo dengan Kecamatan Cerme, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Balongpanggang, Kecamatan Menganti, Kecamatan Kedamean, dan Kecamatan Wringinanom.
- d) Peningkatan jalan lokal primer menjadi jalan beraspal dengan Ramaja 6 m untuk ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Sangkapura dengan Kecamatan Tambak.

Untuk pengembangan sarana transportasi berdasarkan fungsi kecamatan dapat dilihat pada tabel

Tabel 7.2. Rencana Pengembangan Sarana Transportasi Berdasarkan Fungsi Kecamatan

Nama Kota Kecamatan	Peran Sebagai Pusat Pelayanan	Jenis Sarana Transportasi
Kebomas	Pusat Regional	Terminal Kargo Peningkatan sub terminal C menjadi Terminal Penumpang kelas B Penertiban terminal bayangan
Driyorejo	Pusat Sub Regional	Terminal kelas C
Panceng	Pusat Sub Regional	Terminal kelas C Terminal kargo
Sangkapura	Pusat Sub Regional	Terminal kelas C Terminal kargo
Manyar	Pusat Lokal	Terminal barang Sub terminal
Wringinanom	Pusat Lokal	Sub terminal
Kedamean	Pusat Lokal	Sub terminal
Balongpanggang	Pusat Lokal	Sub terminal
Cerme	Pusat Lokal	Sub terminal Terminal barang
Bungah	Pusat Lokal	Sub terminal
Dukun	Pusat Lokal	Sub terminal Terminal barang
Ujungpangkah	Pusat Lokal	Sub terminal
Tambak	Pusat Lokal	Sub terminal
Gresik	Pusat Lokal	Sub terminal Terminal barang
Dudusampeyan	Pusat Lokal	Sub terminal
Menganti	Pusat Lokal	Sub terminal Terminal barang
Benjeng	Pusat Lokal	Sub terminal

Sumber : RTRW Kabupaten Gresik 2010 - 2030

a. Arahkan Integrasi Sistem Pergerakan dan Sistem Kegiatan

Persoalan interaksi sistem pergerakan dan sistem kegiatan yang teridentifikasi di Kabupaten Gresik adalah:

- a) Kemacetan di Persimpangan Duduk Sampeyan, pada titik pertemuan rel kereta api, jaringan jalan arteri, serta penuhnya sistem aktivitas pasar Duduk Sampeyan di pusat kecamatan Duduk Sampeyan.
- b) Perubahan fungsi bangunan di sepanjang ruas jalan dari fungsi permukiman menjadi fasilitas jasa komersial, fasilitas umum, perdagangan, dsb yang tidak terencana dan tidak disediakan lahan parkir. Banyaknya kendaraan yang memakai badan jalan untuk parkir sehingga arus lalu lintas yang lewat tidak lancar terutama terjadi di pusat kota.
- c) Munculnya terminal bayangan yang justru letaknya berdekatan dengan terminal resmi, seperti di Bunder dan Randuagung.

b. Jaringan Jalur Kereta Api

Rencana pengembangan transportasi kereta api di Kabupaten Gresik akan mengakomodasi rencana pengembangan transportasi transwilayah dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang dikeluarkan dalam RTRW Jatim 2005/2020. Rencana-rencana tersebut meliputi:

- Pengembangan *double track* pada jalur utama GKS. Rencana ini terutama pada jalur commuting Lamongan – Gresik – Surabaya.
- Penggabungan terminal dan stasiun kereta api di Desa Sumari, Kecamatan Duduksampeyan
- Kemudian, rencana pengembangan transportasi kereta api Kabupaten Gresik adalah mendukung konektivitas dengan Pelabuhan Gresik untuk kelancaran pengangkutan barang. Maka dalam RTRW ini direkomendasikan untuk pengaktifan kembali pelayanan rel kereta api yang mati (mengkonservasi kembali). Kemudian menambah pelayanan KA jalur Petro, Arif Rahman Hakim, Stasiun Indro – Surabaya dengan beberapa shelter di titik intermoda.

c. Terminal Cargo

Dalam mendukung pertumbuhan industri di Kabupaten Gresik, direkomendasikan untuk dibangun beberapa terminal kargo. Lokasi terminal kargo yang diusulkan adalah di Kecamatan Panceng sebagai kecamatan yang memiliki akses paling dekat ke Pelabuhan Brondong (Lamongan). Kecamatan Panceng juga merupakan subpusat regional dimana fungsinya tersebut penting untuk didukung dengan infrastruktur. Kemudian, Kecamatan Panceng juga terakses oleh rencana tol Gresik – Tuban yang diusulkan sampai Semarang. Lokasi terminal kargo lainnya adalah di Kecamatan Kebomas dimana terintegrasi dengan Pelabuhan Gresik didukung oleh jalan tol. Kecamatan Kebomas merupakan konsentrasi kawasan industri saat ini. Kecamatan ini juga berfungsi sebagai pusat regional Kabupaten Gresik. Terminal Bunder yang semula adalah terminal penumpang direncanakan menjadi terminal kargo. Rencana pengembangan terminal kargo yang ketiga adalah di Kecamatan Sangkapura dengan lokasi yang dekat dengan pelabuhan Sangkapura.

7.1.3.2. Sistem Jaringan Transportasi Laut

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Timur, Pelabuhan Gresik merupakan Pelabuhan Nasional. Pelabuhan Gresik dikembangkan untuk menunjang pelayanan dan memberi tambahan fasilitas Pelabuhan Tanjung Perak. Pelabuhan Gresik berfungsi sebagai prasarana untuk melayani angkutan barang dan angkutan penumpang.

Rencana ekspansi Pelabuhan Tanjung Perak dalam jangka pendek di arahkan ke Pelabuhan Gresik. Pengembangan pelabuhan ini penting bagi Gresik dan wilayah sekitarnya yang mempercepat pembangunan perkotaan dan area industri. PT Pelindo menyusun Rencana Induk Pelabuhan Gresik tahun 2001 – 2025. Strategi pengelolaan dan pengembangan dari rencana induk pelabuhan ini adalah:

- a) Pengembangan Pelabuhan Gresik direncanakan dari Kali Lamong sampai Ujung Pangkah.
- b) Peningkatan peran dan fungsi pelabuhan Gresik yang mampu mengakomodasi terselenggaranya angkutan laut secara langsung ke negara tujuan.
- c) Peningkatan peran dan fungsi Pelabuhan Gresik sebagai pelabuhan *transshipment*, pusat logistik, dan distribusi untuk Kawasan Timur Indonesia (KTI) bagi arus muatan konvensional, curah, log, maupun peti kemas.
- d) Pemanfaatan *water front* (tepi air) di sepanjang jalur pelayaran barat sebagai rencana daerah pengembangan Gresik secara bertahap dan berkesinambungan melalui reklamasi perairan.
- e) Pengembangan pelabuhan Gresik sebagai pelabuhan modern menuju pada spesialisasi muatan (curah cair, curah kering, log, maupun peti kemas).
- f) Rekonfigurasi secara bertahap lahan-lahan yang kurang produktif atau tidak ada kaitannya dengan kegiatan kepelabuhan menjadi areal yang mempunyai nilai ekonomis dan bisnis.
- g) Pengembangan dan peningkatan sistem pelayanan di Pelabuhan Gresik melalui penerapan teknologi informasi antara pengelola pelabuhan dengan semua unsur masyarakat pelabuhan.
- h) Pengembangan dan penerapan penggunaan teknologi tinggi secara bertahap dalam peningkatan kualitas pelayanan.
- i) Pengembangan kawasan bisnis dan kawasan industri (*industrial estate*) yang di antaranya dilengkapi dengan kawasan berikat.

7.1.3.3. Transportasi Udara

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Timur, Pengembangan Bandara di Pulau Bawean merupakan Pengembangan Bandara Domestik Regional. Status Bandara tersebut saat ini adalah bandara bandara domestik dengan hirarki pengumpan.

Pengembangan wilayah kepulauan yaitu di Bawean meliputi Kecamatan Sangkapura dan Tambak didukung oleh jaringan transportasi udara. Dasar

pertimbangannya adalah tingkat *demand* untuk pengangkutan udara dari dan ke Pulau Bawean cukup tinggi. Selain itu transportasi udara dapat meningkatkan daya jual pariwisata laut yang sangat potensial di *Pulau Bawean*. Rencana pengembangan bandara di Bawean ini telah ditetapkan juga dalam RTRW Propinsi Jawa Timur.

Lokasi Lapangan Terbang di Pulau Bawean adalah di Desa Tanjung Ori, Kecamatan Tambak. Pemilihan lokasi ini dari aspek ekonomis akan mempercepat perkembangan wilayah utara Pulau Bawean yang selama ini lebih lambat pertumbuhannya di bandingkan wilayah Selatan. Lahan yang tersedia di Desa Tanjung Ori untuk pengembangan bandara adalah 68 Ha. Lahan ini diperlukan untuk pengembangan zona perumahan, zona penerbangan, dan zona operasional penerbangan (fasilitas navigasi penerbangan dan alat bantu pendaratan visual). Lahan tersebut berdasarkan penggunaannya saat ini merupakan lahan tidur dan tegalan yang tidak terlalu produktif, dengan aksesibilitas cukup baik dan kelerengan 7 – 15%, sehingga dari aspek fisik memenuhi kelayakan pembangunan. Pembangunan ini dari aspek transportasi perlu didukung dengan kemudahan aksesibilitas dari dan menuju bandara.

7.1.4. RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA

Berdasarkan pengertian dan klasifikasi yang ada dari kawasan budidaya, di Kabupaten Gresik kawasan budidaya dikelompokkan menjadi:

- a) Kawasan Hutan Produksi;
- b) Kawasan Pertanian;
- c) Kawasan Perikanan;
- d) Kawasan Perkebunan;
- e) Kawasan Pertambangan;
- f) Kawasan Industri;
- g) Kawasan Pariwisata;
- h) Kawasan Permukiman;
- i) Kawasan Andalan; dan
- j) Kawasan peruntukan lainnya.

1. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Gresik terletak di Kecamatan Panceng dan Kecamatan ujungPangkah dengan luasan kurang lebih 1.017 Ha.

Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi dilaksanakan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi yang optimal, misalnya budidaya tanaman di bawah tegakan hutan.

Pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi dapat berupa usaha pemanfaatan hutan alam dan usaha pemanfaatan hutan tanaman. Usaha pemanfaatan hutan tanaman dapat berupa hutan tanaman sejenis dan atau hutan tanaman berbagai jenis. Usaha pemanfaatan hutan tanaman diutamakan

dilaksanakan pada hutan yang tidak produktif dalam rangka mempertahankan hutan alam.

Izin pemungutan hasil hutan di hutan produksi diberikan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu maupun bukan kayu, dengan batasan waktu, luas, dan atau volume tertentu, dengan tetap memperhatikan azas lestari dan berkeadilan. Kegiatan pemungutan meliputi pemanenan, penyaradan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran yang diberikan untuk jangka waktu tertentu.

2. Kawasan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas kawasan pertanian lahan basah dan hortikultura. Kawasan pertanian lahan basah merupakan sawah tadah hujan dan sawah irigasi. Sawah tadah hujan tersebar di Kecamatan Balongpanggang dan Benjeng dengan luasan kurang lebih 9.344,82 Ha. Sawah irigasi tersebar di Kecamatan Ujungpangkah, Sidayu, dan Dukun dengan luasan kurang lebih 26.614,74 Ha.

3. Kawasan Perkebunan

Perkebunan di Kabupaten Gresik berupa perkebunan rakyat yang merupakan konversi dari jarak tanam tanaman kebun pada pekarangan, kebun campuran, dan perkebunan rakyat. Alokasi lahan perkebunan campuran paling besar terdapat di Kepulauan Bawean. Kebijakan penataan ruang untuk kawasan ini meliputi:

- Pengembangan kawasan perkebunan yang tersedia dengan tidak mengubah penggunaan lahan yang ada
- Pengoptimalan kawasan perkebunan dengan usaha intensifikasi
- Memperhatikan kesesuaian pesyaratan teknis sektoral dan kesesuaian lahan

Jenis tanaman perkebunan yang merupakan produksi Kabupaten Gresik adalah kelapa, cengkeh, jambu mete, kopi, kapuk randu, tembakau, tebu, kenangan, kunyit, dan siwalan. Tanaman-tanaman ini selain untuk konsumsi lokal, juga merupakan bahan baku produksi industri makanan, minuman, dan tembakau.

Sebaran perkebunan jenis komoditas kelapa, kapuk randu, dan jambu mete terdapat di hampir semua kecamatan. Komoditas cengkeh, kopi, dan kakao terdapat di Pulau Bawean, yaitu di Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak. Tembakau hanya terdapat di Kecamatan Balongpanggang. Sedangkan tebu dan kunyit banyak ditemui di Gresik Selatan, serta kenanga dan siwalan di Gresik Utara.

Rencana penggunaan lahan perkebunan adalah mempertahankan lahan perkebunan yang ada, maka luas perkebunan yang direncanakan sesuai dengan luas kondisi eksisting.

Kawasan hortikultura merupakan kawasan komoditi buah-buahan dan sayuran yang tersebar di Kecamatan Panceng. Luas keseluruhan kawasan hortikultura kurang lebih 99.991 Ha.

Pemanfaatan kawasan peruntukan perkebunan, diarahkan untuk meningkatkan peran serta, efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan, dengan mengembangkan kawasan pengembangan utama komoditi perkebunan yang sekaligus berfungsi sebagai kawasan resapan air.

Kawasan peruntukan perkebunan tersebar di Kabupaten Gresik, dengan luas keseluruhan kurang lebih 3.471 Ha, meliputi:

- a) komoditas kelapa, kapuk randu, dan jambu mete terdapat di hampir semua kecamatan;
- b) komoditas cengkeh, kopi, dan kakao terdapat di Pulau Bawean, yaitu di Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak;
- c) komoditas tembakau hanya terdapat di Kecamatan Balongpanggang;
- d) komoditas tebu dan kunyit terdapat di Gresik Selatan; dan
- e) komoditas kenanga dan siwalan di Gresik Utara.

4. Kawasan Perikanan

1. Perikanan Tangkap

Sektor perikanan tangkap di perairan pantai utara Kabupaten Gresik memiliki fungsi pemanfaatan sebagai *fishing ground* nelayan tradisional dengan alat tangkap bubu, sero, gillnet, dan pancing. Kawasan Perikanan tangkap tersebut tersebar antara lain pada Kec. Manyar, Kec. Bungah, Kec. Sidayu, Kec. Ujung Pangkah, Kec. Panceng.

Kawasan penangkapan ikan meliputi:

- a) Kawasan penangkapan terbatas untuk ikan karang yang menggunakan alat tangkap pancing di Kecamatan Sangkapura dan Tambak dengan luas kurang lebih 9.744 Ha;
- b) Kawasan penangkapan dengan alat tangkap jaring dan pancing di Kecamatan Sangkapura dan Tambak dengan luas kurang lebih 57.340 Ha;
- c) Kawasan penangkapan dengan alat tangkap sero dan bubu di Kecamatan Panceng, Ujungpangkah, Sidayu, dan Bungah dengan luas kurang lebih 5.455 Ha;
- d) Kawasan penangkapan dengan alat tangkap pancing dan jaring insang di Kecamatan Panceng, Ujungpangkah, Sidayu, Bungah, dan Manyar dengan luas kurang lebih 83.828 Ha;
- e) Kawasan penangkapan untuk ikan pelagis yang menggunakan alat tangkap jaring di wilayah setelah 4 mil sampai dengan 12 mil dengan luas kurang lebih 63.589 Ha; dan
- f) *Fishing Ground* Nelayan dengan menggunakan alat tangkap jaring dan pancing meliputi wilayah perairan yang berada di atas 12 mil dengan luas kurang lebih 227.193 Ha.

2. Perikanan Budidaya

Penggunaan lahan tambak berdasarkan RTR Gresik Kota, terjadi pengurangan luas lahan tambak untuk kebutuhan industri dan permukiman, yaitu seluas 762,93 Ha. Luas lahan tambak adalah 15% dari

luas total, yaitu 17.399 ha. Potensi tambak paling besar terdapat di Kecamatan Dudusampeyan, Manyar, Bungah, Sidayu, Dukun, dan Ujungpangkah, dengan luas berkisar antara 1000 – 3000 ha.

Sektor perikanan tambak di Kabupaten Gresik merupakan sektor yang potensial dikembangkan dan areal tambak di kabupaten ini termasuk mendominasi kawasan yaitu sebesar 14,60% dari total wilayah. Konversi lahan tambak sampai tahun 2030 adalah di Kecamatan Cerme seluas 2.763 ha, Manyar seluas 895 ha, Ujungpangkah seluas 2.384 ha. Kebijakan penataan ruang yang diambil untuk pengembangan dan penataan kawasan ini meliputi:

- Pengembangan kawasan pertanian di area waduk dengan tetap menjaga fungsi perlindungannya terhadap keberadaan daerah waduk sebagai daerah resapan air dan sumber air bersih.
- Pengendalian kawasan perikanan non waduk dengan memperhatikan penggunaan lahan sekitarnya yang sudah ada.
- Pembatasan pengkonversian area tambak untuk penggunaan lahan lainnya.

Kawasan budidaya laut, meliputi:

- a) Kawasan budidaya kerang di Kecamatan Panceng dengan luas kurang lebih 2.065 Ha; dan
- b) Kawasan budidaya Budidaya Kakap, Kerapu, dan Rumput Laut di Kecamatan Sangkapura dan Tambak dengan luas kurang lebih 608 Ha.

5. Kawasan Pertambangan

Kabupaten Gresik merupakan daerah penghasil tambang, terutamanya untuk bahan galian golongan C. Keberadaan bahan tambang ini akan berdampak pada kegiatan pengeksploitasian yang sering menimbulkan dampak negatif sebagai berikut:

1. Topografi

Bentuk topografi khususnya pada daerah perbukitan akan berubah menjadi kawasan kantong bentang alam yang rusak dengan pemandangan yang gersang dan buruk.

2. Tanah Penutup

Hilangnya lapisan atas tanah sebagai akibat semakin gundulnya daerah perbukitan, hal ini akan menimbulkan dampak lain yang tidak baik berupa terjadinya longsoran/gerakan tanah terutama pada daerah perbukitan curam.

3. Tata Air

Berdampak pada menyurutnya potensi air/sumber air karena kelembaban tanah yang berkurang dan tanah akan menjadi kering bahkan pada daerah tertentu akan terjadi amblesan tanah dan penurunan dari muka air tanah. Terjadinya pelumpuran pada air permukaan, proses erosi, sedimentasi dan pendangkalan yang meningkat di badan sungai, ataupun waduk, pada musim hujan akan sering terjadi banjir karena tidak ada lagi penahan.

Untuk mengatasi atau memperkecil dampak negatif yang ditimbulkan ini, maka perlu adanya upaya penataan kawasan. Adapun kebijaksanaan penataan ruang untuk kawasan pertambangan meliputi:

- Pengembangan kawasan pertambangan dengan memperhatikan kriteria/syarat penambangan yang ada.
- Pengembangan kegiatan lainnya di kawasan pertambangan untuk mengantisipasi kondisi masa pasca tambang.
- Pengadaan kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan kawasan terutama yang berkaitan dengan lingkungan dan kondisi sosial ekonomi penduduk.

Potensi bahan pertambangan di Kabupaten Gresik terdiri dari pertambangan untuk bahan baku industri dan bahan baku keramik. Pertambangan bahan industri antara lain dolomit, batugamping, pospat, feldspar, dan kalsit. Sedangkan pertambangan bahan keramik antara lain pasir kuarsa dan lempung. Eksploitasi bahan tambang diatur melalui penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13/2002 mengenai Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Gresik.

Saat ini kegiatan eksplorasi bahan tambang galian Golongan C dilakukan pada lahan seluas 817,26 Ha (Dinas LHPE, tahun 2002).

Kebijakan yang ada dilakukan dengan mengembangkan potensi-potensi pertambangan yang teridentifikasi. Rencana pengembangan pertambangan golongan C di Kabupaten Gresik adalah pengembangan dolomit dengan luas potensi total 2.278 ha. Sedangkan rencana pengembangan industri pengolahan untuk pertambangan adalah pengolahan batu gamping dan pengolahan semen di Kecamatan Bungah, Kecamatan Ujung Pangkah, dan Kecamatan Panceng. Rencana pengembangan bahan galian C sesuai secara total seluas 817.249 Ha, meliputi Kecamatan Ujungpangkah, Bungah, Panceng, Kebomas, Wringinanom, dan Sangkapura.

Rencana pengembangan di kawasan pertambangan yang tidak menimbulkan kerusakan atau potensi lahan kritis adalah penerapan konsep reklamasi dalam penanganan lahan pasca penambangan. Yaitu:

- Pemanfaatan lahan pasca penambangan yang memiliki morfologi berbentuk dataran atau kemiringan rendah menjadi areal permukiman dan kawasan industri. Misalnya Kawasan Industri Gresik dan Perumahan Gresik Kota Baru (GKB) di lahan pasca penambangan oleh PT Semen Gresik.
- Pemanfaatan lahan pasca penambangan yang memiliki morfologi berupa cekungan menjadi penampung air hujan. Waduk dan telaga yang terbentuk dapat menjadi penyeimbang hidrogeologi air tanah, sumber air, dan kawasan wisata air. Kawasan wisata telaga Ngipik adalah contoh pengembangan lahan pascapertambangan menjadi kawasan wisata andalan.
- Pemanfaatan lahan pascapenambangan yang disertai penghijauan atau reboisasi.

- Rencana pengembangan tambang migas terdapat di Kecamatan Kebomas dan Ujungpangkah. Kawasan tambang migas dapat dilihat pada peta rencana pola ruang laut.

6. Kawasan Peruntukan Industri

Penggunaan lahan industri total di Kabupaten Gresik adalah 10.16 % dari luas lahan atau 12.112,59 ha. Industri terutama direncanakan di Kecamatan Ujungpangkah, Manyar, dan Sidayu dengan luas berkisar 1.000 – 4.000 ha.

Sektor industri terutamanya industri pengolahan di Kabupaten Gresik merupakan salah satu sektor unggulan dan strategis. Hal ini memungkinkan pengembangan sektor industri yang lebih luas lagi. Oleh karena itu perlu diambil langkah untuk penataan kawasan industri agar kawasan industri yang berkembang tidak mengganggu keseimbangan lingkungan yang ada. Kebijakan penataan ruang yang dapat diambil untuk kawasan industri di Kabupaten Gresik meliputi :

- Pengembangan kawasan industri yang sudah ada di kawasan pantura
- Pengarahan lokasi industri berat pada kawasan industri yang sudah ada
- Pengarahan sentra industri dan kerajinan rumah tangga pada kawasan permukiman yang ada dengan mempertimbangkan batas wilayah kota, RUTRK/RDTRK/RTRK yang telah ada
- Pengolahan limbah polutif yang dihasilkan dari kegiatan industri sehingga tidak membahayakan lingkungan sekitar
- Pengendalian perkembangan industri polutif di kawasan permukiman baik di pedesaan maupun perkotaan

Rencana penggunaan lahan industri adalah mengakomodasi rencana EJIJZ dengan asumsi pertumbuhan ekonomi progresif (skenario optimis), yang menghasilkan total penggunaan lahan sebesar 8.613,85 Ha di dokumen rencana Gresik Utara, Gresik Selatan, serta Gresik Kota. Selain itu, terdapat pengalokasian industri dengan luas tidak terlalu besar di kecamatan lainnya, sehingga luas total adalah 12.112,59 ha.

Rencana ini mengadopsi dokumen-dokumen rencana yang ada dan mengarahkan kebijakan pengembangan industri ke utara sebesar 92,99 %. Industri dikeluarkan dari pusat kota, yang dalam data eksisting sejumlah sekitar 572 Ha, hanya menjadi 123,35 ha.

Tabel 7.3. Penggunaan Lahan Industri

NO	KECAMATAN	RENCANA (HA)	Proporsi
RENCANA GRESIK UTARA		8.010,24	92,99
1	Manyar - Gresik Utara	1.489,00	17,29
2	Bungah	0	-
3	Sidayu	1.000,00	11,61
4	Ujung Pangkah	4.984,38	57,86
5	Panceng	123,3	1,43
6	Dukun	413,56	4,80
RENCANA GRESIK SELATAN		313,01	3,63
7	Driyorejo	141,44	1,64

NO	KECAMATAN	RENCANA (HA)	Proporsi
8	Kedamean	171,57	1,99
9	Menganti	89,07	0,85
RENCANA GRESIK KOTA		123,35	1,43
10	Kebomas	100,05	1,16
11	Gresik	23,295	0,27
12	Manyar –Kota	167,26	1,94
Total		8.613,85	100,00

Sumber: RTRW Kabupaten Gresik 2004-2014

Pengembangan kawasan campuran berupa industri dan jasa perdagangan (komersial) juga dialokasikan di bagian utara sepanjang jalan arteri primer yang mengarah ke Lamongan, yaitu di daerah Kecamatan Duduk Sampeyan. Pengembangan fungsi budidaya di area sepanjang jalan arteri perlu memperhatikan beberapa ketentuan teknis untuk menghindari gangguan perjalanan, yaitu :

- Pengalokasian masing-masing kapling bangunan minimal meliputi areal sepanjang 50 meter.
- Memiliki frontage area
- Memiliki sarana parkir dan bongkar muat kendaraan yang terhubung ke frontage area.

Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Gresik, khususnya di Kecamatan Kedamean juga dikembangkan secara terintegrasi dengan konsep *Environmental Recycling Park*. Fasilitas di dalamnya antara lain pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah B3 yang skala pelayanannya untuk regional Jawa Timur, khususnya daerah-daerah di sekitar Kabupaten Gresik yang memiliki potensi produksi limbah B3 dalam jumlah besar, seperti Kota Surabaya dan kabupaten Sidoarjo. Selain Instalasi Pengolahan Limbah B3 juga terdapat fasilitas Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT), Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Fasilitas *Waste to Energy*, dan fasilitas umum penunjang kawasan industri.

Pemanfaatan kawasan peruntukan industri, terdiri atas:

- a) kawasan peruntukan industri besar;
- b) kawasan peruntukan industri menengah; dan
- c) kawasan peruntukan industri kecil.

Kawasan peruntukan industri besar dan menengah, meliputi kawasan di sepanjang jalan arteri primer yang menghubungkan Gresik – Lamongan maupun Gresik – Surabaya, yang diarahkan di Kecamatan Kebomas, Kecamatan Manyar, dan Kecamatan Driyorejo dibatasi perkembangannya.

Kawasan peruntukan industri menengah dan kecil, diarahkan berada di dalam kawasan industri tertentu dengan pengelola tertentu.

7. Kawasan Pariwisata

Kegiatan pariwisata di Kabupaten Gresik ditinjau dari karakteristik dan potensinya dapat dikelompokkan menjadi pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan

- Objek Daya Tarik Wisata Budaya, yaitu Wisata Budaya Gresik Kota, dan Pulau Bawean. Objek wisata budaya antara lain meliputi Makam Sunan Giri, Makam Maulana Malik Ibrahim, Makam Raden Santri, Makam Nyi Ageng Pinatih, dan makam Siti Fatimah binti Maimun. Di Pulau Bawean, objek wisata ini adalah makam Siti Zainab.
- Objek Daya Tarik Wisata Alam, yaitu Wisata Alam Gresik Utara dan Pulau Bawean. Meliputi Pantai Delegan, Pantai Ujung Pangkah; Gua Gelang Agung, Benteng Portugis, Pantai Pasir Putih dan Pantai Mengare. Di Pulau Bawean terdiri dari pantai di Kecamatan Sangkapura, Pantai Gili, Airpanas Kebundaya, Pantai Tingen, Pantai Tanjung Karang, Pantai Gili Barat, Pantai Pulau Cina, Pantai Pasir Putih, Pantai Mayangkara, Pantai Labuhan, Danau Kastoba dan hutan lindung. Dua ODTW utama yang dapat dikunjungi di hutan tersebut yaitu adalah Air Terjun Laccar, dan Air Terjun Patar Selamat.

Kebijakan penataan ruang untuk pengembangan kawasan pariwisata adalah :

- Pengembangan kawasan pariwisata dengan melakukan promosi wisata baik secara regional maupun nasional.
- Penataan kawasan pariwisata dengan memperhatikan keberlangsungan lingkungan.
- Pengembangan kegiatan pendukung pariwisata (hotel, restoran, dll) dengan memperhatikan arahan RUTR/RDTR/RTRK yang ada.
- Menerapkan paket-paket wisata. Paket wisata ini diharapkan mampu menghubungkan antara satu ODTW dengan ODTW lainnya.
- Pengembangan event wisata budaya.
- Pengembangan jalur transportasi wisata.
- Pengembangan sentra perdagangan di masing-masing makam tujuan perjalanan wisata.
- Pengembangan pusat penginapan di Gresik Kota terutama di Kecamatan Kebomas dan Kecamatan Gresik.

8. Kawasan Permukiman

Di Kabupaten Gresik penggunaan lahan untuk pengembangan kawasan permukiman dibedakan atas dua jenis, yaitu kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman pedesaan.

Luas penggunaan lahan permukiman total di Kabupaten Gresik tahun 2030 adalah 25.953.39 ha atau 21,78% dari seluruh lahan. Permukiman skala besar terkonsentrasi di Kecamatan Driyorejo, Kedamean, Menganti, Cerme sekitar 3.000 – 4.000 ha.

a. Permukiman Perkotaan

Untuk pengembangan kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Gresik arahan kebijaksanaan yang ditetapkan mengacu pada :

- Memperhitungkan kecenderungan perkembangan pembangunan permukiman baru
- Memperhitungkan daya tampung perkembangan penduduk dan fasilitas/prasarana yang dibutuhkan
- Penggunaan lahan eksistingnya

Berdasarkan acuan-acuan tersebut di atas pengembangan kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Gresik lebih diarahkan pada penggunaan lahan non produktif dengan kebijaksanaan penataan ruang secara rinci meliputi:

- Pemenuhan kebutuhan perumahan dengan penambahan luas kawasan permukiman perkotaan di lahan yang tingkat produktivitasnya rendah, yaitu lahan pertanian kering (tegalan, tambak, dll)
- Tindakan preventif terhadap dampak bencana yang terjadi di kawasan rawan bencana alam.
- Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan permukiman dengan memperhatikan proporsi ketersediaan ruang terbuka hijau dan infrastruktur penunjang permukiman terhadap luas total sebesar 40%.

Permukiman perkotaan, meliputi:

- a) permukiman perkotaan pada PPK diarahkan di seluruh ibukota kecamatan; dan
- b) permukiman perkotaan pada kawasan yang terpengaruh perkembangan Kota Surabaya diarahkan di Kecamatan Driyorejo, Kedamean, Menganti, dan Cerme.

b. Permukiman Pedesaan

Untuk pengembangan kawasan permukiman pedesaan di Kabupaten Gresik arahan kebijaksanaan yang ditetapkan mengacu pada :

- Memperhatikan keberadaan sawah irigasi sebagai kawasan limitasi pengembangan kawasan
- Memperhitungkan kecenderungan perkembangan dan aksesibilitas
- Memperhatikan kebutuhan perumahan penduduk pedesaan baik dari segi kualitas maupun kuantitas
- Memperhatikan keterkaitan dengan pusat pertumbuhan yang ada seperti ibu kota kecamatan sebagai pusat distribusi dan koleksi di seluruh wilayah kecamatan.
- Berdasarkan acuan-acuan tersebut di atas, kebijaksanaan penataan ruang untuk kawasan permukiman pedesaan meliputi :
- Program perbaikan kawasan permukiman dengan pemenuhan persyaratan kualitas fisik rumah

- Penataan kawasan pedesaan dengan mempertimbangkan keseimbangan fungsi antara pengembangan permukiman dengan pengembangan fungsi lainnya
- Penyediaan sarana dan prasarana permukiman, seperti air bersih, drainase, persampahan, listrik, bangunan pendidikan, pasar, dll.
- Pemenuhan kebutuhan perumahan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan

Permukiman pedesaan diarahkan dengan ketentuan:

- a) permukiman pedesaan yang berlokasi di pegunungan dikembangkan dengan berbasis perkebunan; dan
- b) permukiman pedesaan yang berlokasi di dataran rendah, basis pengembangannya adalah pertanian tanaman pangan dan perikanan darat.

Permukiman lahan pedesaan dikembangkan dengan berorientasi pada Pusat Pengembangan Lingkungan (PPL).

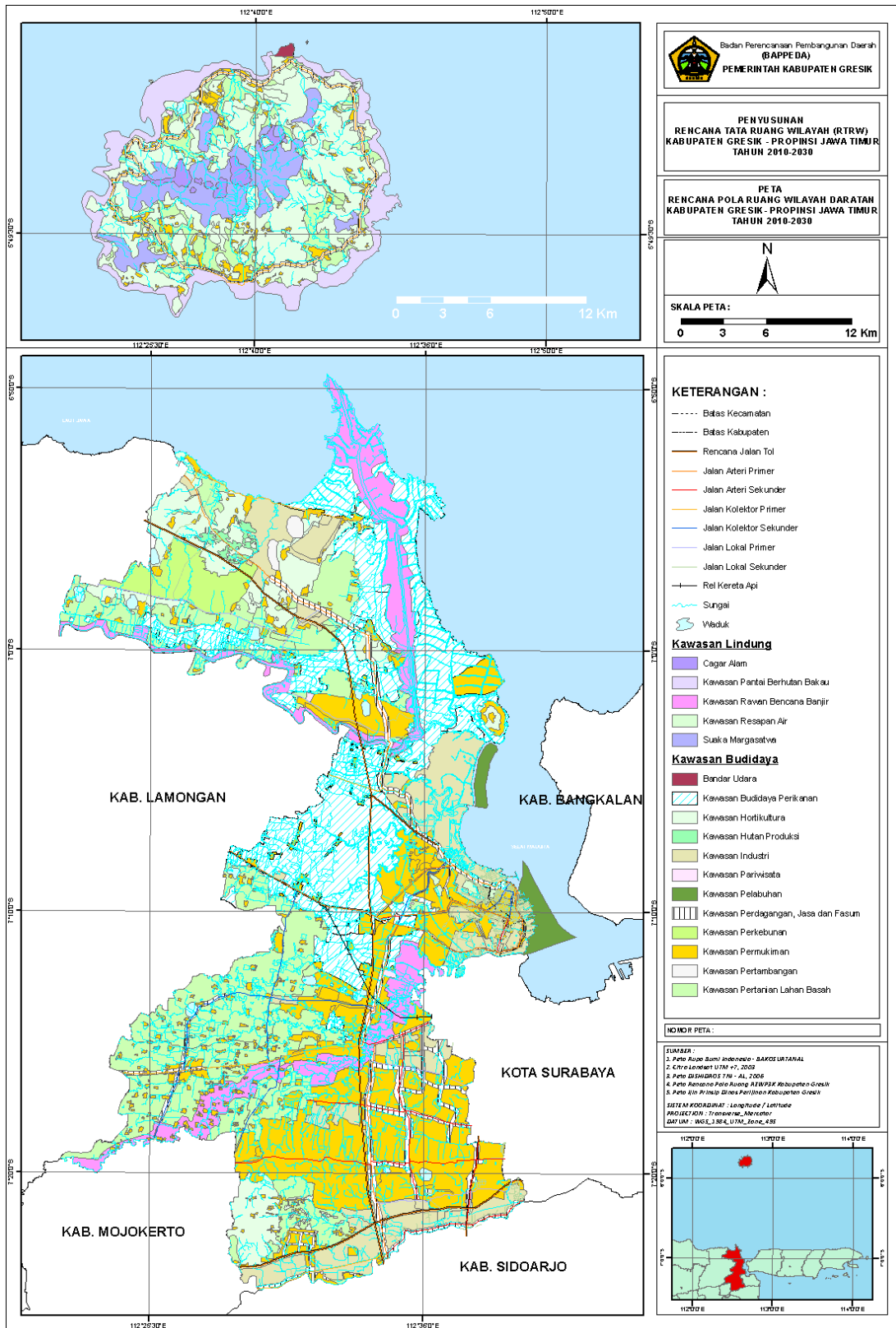
Rencana penggunaan lahan di Kabupaten Gresik akan disajikan pada Tabel 5.4.

Tabel 7.4. Distribusi Luas dan Persentase Pola Ruang Kabupaten Gresik

KAWASAN LINDUNG :			
No.	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	(%)
1	Kawasan Rawan Bencana Banjir	9,608.80	8.06%
2	Kawasan Pantai Berhutan Bakau	406	0.34%
3	Kawasan Terumbu Karang	5,387	4.52%
4	Blok Rimba Suaka Marga Satwa	3,831.6	3.21%
5	Kawasan Resapan Air	1,156.77	0.97%
6	Kawasan Cagar Alam	740	0.62%
Jumlah I		21,130.17	17.72%
KAWASAN BUDIDAYA :			
No.	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	(%)
1	Kawasan Permukiman	25,953.39	21.78%
2	Kawasan Pertanian Lahan Basah	26,614.74	22.34%
3	Kawasan Perikanan Budidaya	17,399	14.60%
4	Kawasan Hortikultura	99.991	0.08%
5	Kawasan Industri	12,112.59	10.16%
6	Kawasan Perdagangan, Jasa, dan Fasum	6,458.32	5.42%
7	Kawasan Perkebunan	3,471	2.91%
8	Kawasan Hutan Produksi	1,017	0.85%
9	Kawasan Pertambangan	284.65	0.23%
10	Kawasan Pariwisata	82.85	0.06%
11	Kawasan lainnya *	4,501.299	3.77%
Jumlah II		97,994.83	85.74%
Jumlah Total		119,925	100.00%

Sumber : RTRW Kabupaten Gresik 2010 - 2030

Gambar 7.3. Peta Rencana Pola Ruang Daratan Kabupaten Gresik 2030



7.1.5. RENCANA POLA PEMANTAPAN KAWASAN LINDUNG

Kawasan lindung merupakan suatu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka secara umum tujuan pemantapan kawasan lindung di Kabupaten Gresik untuk mencegah timbulnya berbagai kerusakan fungsi lingkungan hidup serta mengamankan dari kemungkinan terjadinya intervensi penggunaan ke kawasan non lindung. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah:

- Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan, dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa.
- Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam.

Berdasarkan hal di atas, maka kebijakan pemanfaatan ruang dalam rangka pemantapan kawasan lindung di Kabupaten Gresik akan diuraikan menurut jenis kawasan lindung. Adapun kawasan lindung di Kabupaten Gresik diklasifikasikan menjadi :

1. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya
2. Kawasan Perlindungan Setempat
3. Kawasan Suaka Alam
4. Kawasan Cagar Budaya
5. Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan lindung di Kabupaten Gresik ini mencakup area seluas 20.672,02 Ha atau sekitar 15,63 % dari keseluruhan wilayah Kabupaten Gresik. Kawasan lindung ini tersebar di hampir semua kecamatan di Kabupaten Gresik dengan spesifikasi yang berbeda untuk tiap-tiap kecamatan.

7.1.6. KAWASAN STRATEGIS DI KABUPATEN GRESIK

Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, dijelaskan bahwa kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Penetapan kawasan strategis (KS) kabupaten ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

- a. kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. kepentingan sosial-budaya;
- c. kepentingan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi;
- d. kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan; dan
- e. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.

Penetapan kawasan strategis di Kabupaten Gresik dilakukan dengan berlandaskan pada definisi diatas, kondisi faktual dilapangan, kecenderungan perkembangan wilayah, studi yang telah dilakukan sebelumnya yaitu EJIIZ (*East Java Integrated Industrial Zone*) serta studi-studi terkait lainnya.

Berdasarkan kewenangan pengelolaannya, Kawasan Strategis meliputi:

- a. Kawasan Strategi Nasional (KSN);
- b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP); dan
- c. Kawasan Strategi Kabupaten (KSK).

7.1.6.1. DISTRIBUSI KAWASAN STRATEGIS DI KABUPATEN GRESIK

KSN meliputi Kawasan Perkotaan Gresik yang merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan GKS dan termasuk dalam Kawasan Strategis Dengan Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi dan Kawasan pertahanan dan keamanan TNI-AL di Desa Campurejo, Kecamatan Panceng.

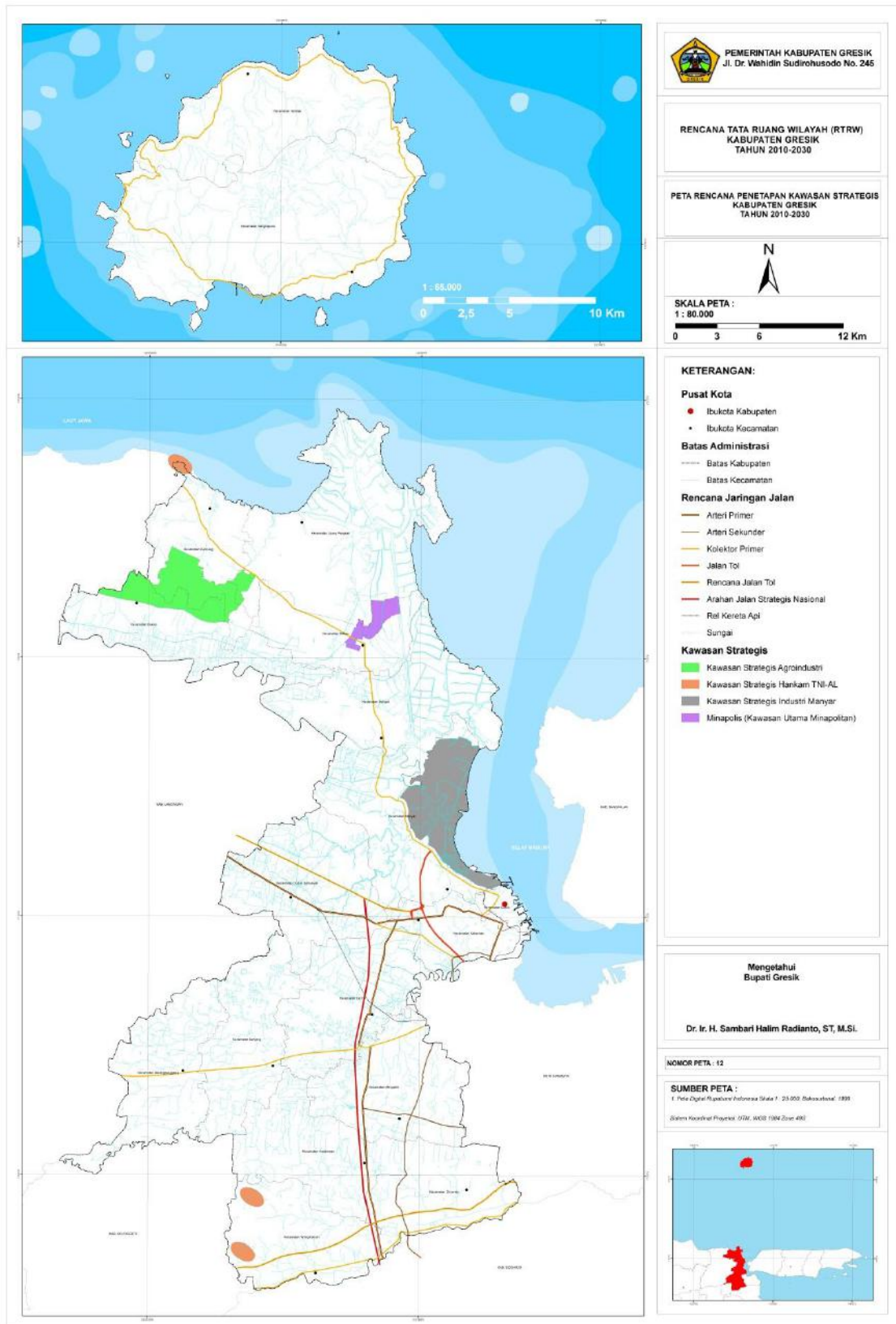
Untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, dimungkinkan penggunaan ruang sesuai dengan daya dukung lingkungan dan ketentuan perundang-undangan.

KSP yang diakomodasi dalam RTRW Kabupaten Gresik meliputi:

- a. KS Dengan Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, meliputi Kawasan Perindustrian di Kabupaten Gresik;
- b. KS Dengan Sudut Kepentingan Sosial Budaya, meliputi Kawasan Makam Sunan Giri dan Makam Malik Ibrahim;
- c. KS Dengan Sudut Kepentingan Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi, yaitu Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi di Gresik dan sekitarnya dan Kawasan Pembangkit Listrik di Singosari;
- d. KS Dengan Sudut Kepentingan Fungsi dan daya dukung Lingkungan, meliputi kawasan pengelolaan sumberdaya buatan di Kecamatan Kedamean.
- e. KSK meliputi KS dengan sudut kepentingan pengembangan ekonomi yang ditetapkan di Kawasan Industri Manyar dan Kawasan Agroindustri di Kecamatan Panceng.

Distribusi lokasi kawasan strategis kabupaten dapat dilihat pada gambar peta di bawah ini.

Gambar 5. 1 Peta Kawasan Strategis



7.2. ARAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

7.2.1. ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, antara lain:

Untuk Gresik Utara, adalah belum selesainya program jalan poros desa, tidak seimbang volume peningkatan kendaraan dengan jumlah jalan yang memadai, belum optimalnya pembangunan dan perbaikan saluran drainase, serta belum terealisasinya Pembangunan Bendung Gerak Sembayat. Masih belum terealisasinya Pembangunan embung di desa Wotan menghambat pengembangan kawasan Agropolitan. Dengan belum terbangunnya Bendung Gerak Sembayat mengakibatkan terhambatnya Pengembangan Kawasan Industri, Agropolitan dan Minapolitan di Gresik Utara. Serta masih seringnya terjadi banjir tahunan karena program pembangunan tanggul dari pusat belum tuntas.

Untuk Gresik perkotaan permasalahan banjir perkotaan masih belum tuntas karena Pembangunan pompa dan system drainase perkotaan dilakukan secara bertahap, juga perlu adanya penanganan kawasan kumuh perkotaan. Kepadatan lalu lintas di perkotaan terjadi karena kapasitas jalan tidak sebanding dengan volume kendaraan yang ada, sedangkan penambahan jalan-jalan alternatif belum tersedia. Pelayanan air bersih dan air baku untuk industri masih belum bisa optimal karena antara kebutuhan dan ketersediaan air bersih dan air baku tidak seimbang, serta belum tersedianya infrastruktur pendukung untuk pembangunan Pelabuhan Kali Mireng dan Kawasan Ekonomi Khusus / Kawasan Industri di Kecamatan Manyar.

Untuk Gresik Selatan adalah belum selesainya program jalan poros desa, peningkatan dan kualitas jalan kabupaten dan propinsi, tidak adanya jalan alternatif dari wilayah Gresik Selatan menuju dalam kota, tidak seimbang volume peningkatan kendaraan dengan jumlah jalan yang memadai, adanya problem dengan pengolahan limbah baik industri maupun domestik, belum dimanfaatkannya lahan rencana pengolahan limbah B3 di Kecamatan Cerme, belum berkembangnya kawasan perumahan di Gresik Selatan, terutama di daerah perbatasan Gresik – Surabaya, belum optimalnya transportasi antar daerah karena pembangunan Tol SUMO belum terselesaikan. Belum optimalnya penanganan banjir tahunan di wilayah terdampak bencana Kali Lamong dan Sungai Bengawan Solo.

Untuk Pulau Bawean adalah masih belum selesainya program jalan poros desa, Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Bawean, kelistrikan masih belum maksimal, belum adanya transportasi udara karena belum selesainya. Pembangunan Lapangan Terbang Perintis di Pulau Bawean, serta belum terwujudnya

penyediaan sarana transportasi laut yang memadai antara wilayah daratan Gresik dengan Pulau Bawean.

Isu strategis pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, antara lain :

- a. Revitalisasi pembangunan dan peningkatan pemeliharaan jalan poros desa dengan memprioritaskan hubungan antar desa yang mempunyai sentra-sentra produksi sehingga pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dapat dioptimalkan;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Kabupaten akan di lanjutkan dan ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya sehingga dapat meningkatkan hubungan simpul antar moda dengan prioritas yang berpotensi memberikan nilai tambah ekonomi pedesaan dan mendukung keberadaan jalan poros desa, jalan kabupaten serta jalan propinsi dan nasional;
- c. Mendorong pemerintah pusat agar mempercepat proses pembangunan Bendung Gerak Sembayat Baru (*new Sembayat barrage*), dan Waduk Bunder sebagai sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih / air minum dan kebutuhan pengairan pertanian di Kabupaten Gresik bisa segera diwujudkan, karena menurut Peraturan yang ada, pengadaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum dan pengairan pertanian merupakan tugas dan kewenangan Pemerintah Pusat;
- d. Melanjutkan pembangunan Tanggul Bengawan Solo di Kecamatan Bungah sampai daerah muara di Kecamatan Ujung Pangkah;
- e. Pembuatan Masterplan Banjir Perkotaan, mengoptimalkan fungsi daerah resapan dengan memperbanyak Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- f. Percepatan pembangunan Bendung Gerak Sembayat, WTP dan Infrastruktur penunjang penyediaan kebutuhan air baku;
- g. Pembangunan infrastruktur penunjang kawasan ekonomi khusus atau kawasan industri Kec. Manyar berupa pelabuhan industry dan infrastruktur lainnya;
- h. Pembangunan Jalan Lingkar Barat yang menghubungkan wilayah Gresik Selatan, Barat ke kota;
- i. Pembangunan jalan poros desa, jalan propinsi (Bunder – Legundi) dan jalan Tol SUMO guna membuka pembangunan perumahan di daerah Kecamatan Kedamean dan Wringinanom;
- j. Pemanfaatan lahan bekas rencana pengolahan limbah B3 di Kecamatan Cerme menjadi kawasan perumahan terpadu berwawasan lingkungan;
- k. Pembangunan Enviromental Recycling Park (ERP) guna pengolahan limbah khususnya di Kabupaten Gresik dan kawasan Indonesia bagian Timur;
- l. Penanganan secara menyeluruh mulai dari hulu sampai hilir Kali Lamong berupa, tanggul, pengerukan badan sungai, reboisasi daerah tangkapan/hulu dan penataan industry di daerah hilir;
- m. Percepatan pembangunan perumahan daerah perbatasan Gresik – Surabaya di Kecamatan Menganti dan Driyorejo;

- n. Pemanfaatan lahan paska tambang di wilayah Kecamatan Wringinanom, Menganti, Kedamean, dan Driyorejo;
- o. Mendukung pembangunan jalan lingkar Barat Surabaya dan Water Bus Sidoarjo - Gresik – Surabaya;
- p. Pembangunan sarana dan prasarana listrik di Pulau Bawean;
- q. Mengusahakan pengadaan transportasi laut yang layak ke Pulau Bawean dan melanjutkan serta merampungkan lapangan terbang perintis di Kecamatan Tambak;
- r. Optimalisasi perbaikan jalan lingkar Bawean dan pembangunan jalan baru (tembus) yang dapat menghubungkan bagian barat dan bagian timur Pulau Bawean;

7.2.2. VISI MISI

Visi untuk membangun Kabupaten Gresik menuju perubahan yang lebih baik adalah :

GRESIK YANG AGAMIS, ADIL, MAKMUR DAN BERKEHIDUPAN YANG BERKUALITAS

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah kabupaten dan seluruh stakeholders dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Gresik secara terpadu.

Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. **GRESIK** : adalah satu kesatuan masyarakat dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Gresik.
2. **AGAMIS** adalah suatu kondisi masyarakat yang hidup dalam sistem tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah hubungan antar manusia dan lingkungannya.
3. **ADIL** adalah perwujudan kesamaan hak dan kewajiban secara proporsional dalam segala aspek kehidupan tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras dan golongan.
4. **MAKMUR** adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhannya.
5. **BERKEHIDUPAN YANG BERKUALITAS** adalah hidup yang sehat dengan berlatarbelakang pendidikan yang sesuai jaman serta pemenuhan pendapatan yang memadai.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

Misi ke-1 : Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dilandasi oleh nilai-nilai agama sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri

Misi ke-2 : Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik

Misi ke-3 : Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan

Misi ke-4 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya

7.2.3. STRATEGI

Untuk mencapai tujuan daerah yang merupakan hasil akhir dari tolok ukur pembangunan lima tahun yang akan datang dalam menjalankan misi guna mendukung terwujudnya visi yang dicita-citakan yaitu menjadikan Gresik Yang Agamis, Adil, Makmur Dan Berkehidupan Yang Berkualitas, maka strategi pembangunan Kabupaten Gresik untuk lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Misi ke-1 :

Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dilandasi oleh nilai-nilai agama sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri, maka strategi pembangunan yang diletakkan adalah :

1. Meningkatkan kegiatan keagamaan melalui fasilitasi dan bantuan kepada aktivitas keagamaan
2. Membangun suasana yang kondusif bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dalam membangun kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku
4. Melakukan pembinaan kepada pemuda dan masyarakat untuk meningkatkan prestasi dan olah raga di daerah
5. Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui advokasi dan pembinaan secara berkala
6. Memelihara dan menjaga eksistensi seni dan budaya lokal

Misi ke-2 :

Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik, maka strategi pembangunan yang diletakkan adalah :

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan
2. Memperluas jangkauan pelayanan sosial dan penanganan PMKS
3. Menyediakan sarana dan prasarana dasar permukiman yang memadai
4. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan secara lebih intensif
5. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pada semua jenjang.
6. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah
7. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan
8. Meningkatkan proses perencanaan pembangunan yang berorientasi kepada kinerja yang baik

Misi ke-3 :

Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan, maka strategi pembangunan yang diletakkan adalah :

1. Membangun akses yang luas kepada masyarakat dalam mengembangkan industri dan perdagangan di daerah.
2. Mendorong pertumbuhan koperasi dan UMKM yang berbasis pada pengembangan ekonomi lokal
3. Meningkatkan investasi penanaman modal di daerah melalui pelayanan perijinan yang baik.
4. Meningkatkan produksi pertanian melalui intensifikasi komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan
5. Meningkatkan pendapatan petani dan nelayan pembinaan pada bidang perikanan dan kelautan
6. Meningkatkan infrastruktur daerah baik dalam bidang bina marga maupun pengairan

Misi ke-4 :

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya, maka strategi pembangunan yang diletakkan adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan melalui peningkatan kualitas tenaga kependidikan, penyediaan sarana dan prasarana serta biaya pendidikan yang murah.
2. Meningkatnya kualitas kesehatan melalui pemerataan akses dan keterjangkauan biaya kesehatan bagi masyarakat.
3. Menekan pertumbuhan penduduk melalui pelayanan keluarga berencana yang terjangkau.
4. Menjaga tingkat ketersediaan pangan daerah demi terwujudnya ketahanan pangan di daerah.

7.2.4. ARAH KEBIJAKAN

1. **Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan misi “Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati yang dilandasi oleh nilai-nilai agama sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri” adalah :**
 - 1) Membantu/ memfasilitasi peningkatan kegiatan keagamaan di masyarakat
 - 2) Meningkatkan rasa sejuk , santun dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
 - 3) Mengembangkan budaya masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan
 - 4) Meningkatkan prestasi olah raga melalui pembinaan induk organisasi dan komite olah raga
 - 5) Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan melalui pemberdayaan pada lembaga pemerintah, sektor industri dan lembaga non formal
 - 6) Melestarikan dan mengembangkan keragaman kekayaan budaya dengan meningkatkan apresiasi dan peran serta komunitas budaya lokal

2. **Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan misi “Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik” adalah :**
 - 1) Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat perdesaan
 - 2) Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS dengan peningkatan rehabilitasi dan bantuan dasar kesejahteraan sosial
 - 3) Meningkatkan sarana dan prasarana dasar pemukiman
 - 4) Mendorong percepatan pencapaian good governance melalui pengembangan produk hukum
 - 5) Meningkatkan mutu dan hasil pengawasan melalui peningkatan profesionalisme aparat pengawasan dan monitoring tindak lanjut.
 - 6) meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih
 - 7) Meningkatkan penerimaan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan peningkatan sumberdaya penerimaan daerah
 - 8) Meningkatkan fungsi legislatif melalui pemberdayaan dan penampungan aspirasi masyarakat
 - 9) Meningkatkan profesionalisme aparat melalui kediklatan dan memberikan hak-hak pegawai sesuai ketentuan.
 - 10) Meningkatkan ketaatan masyarakat dalam administrasi kependudukan
 - 11) Meningkatkan pengelolaan informasi berbasis Teknologi Informasi (TI).
 - 12) Meningkatkan pengelolaan pertanahan
 - 13) Meningkatkan dan mengefektifkan pengendalian tata ruang daerah melalui dokumen tata ruang dan penegakan penerapannya
 - 14) Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan

- 15) Mendokumentasikan, mengembangkan dan menyebarkan informasi hasil-hasil pembangunan
 - 16) Mengembangkan sistem administrasi pemerintahan dan pengelolaan arsip daerah
- 3. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan misi “Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan” adalah :**
- 1) Mengembangkan sistem pemasaran produk unggulan/andalan
 - 2) Mengembangkan industri kecil dan menengah
 - 3) Revitalisasi kelembagaan dan usaha koperasi melalui pembinaan intensif
 - 4) Meningkatkan investasi di daerah melalui instrumentasi prosedur pelayanan investasi serta pengembangan kawasan industri dan infrastruktur
 - 5) Mengembangkan jaringan pemasaran produk pertanian
 - 6) Optimalisasi sumberdaya pertanian baik penyuluh maupun petani
 - 7) Mengembangkan komoditas perkebunan, melalui kimbun (kawasan industri masyarakat perkebunan)
 - 8) Meningkatkan wilayah pengembangan sentra-sentra produksi dan populasi peternakan serta didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana produksi peternakan
 - 9) Optimalisasi pemanfaatan hutan dan lahan serta pengembangan tanamannya secara berkelanjutan
 - 10) Meningkatkan produksi perikanan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap perairan umum, kolam, laut dan tambak
 - 11) Meningkatkan pembinaan atas usaha/kegiatan yang berpotensi mengakibatkan pencemaran pada tanah, air, dan udara
 - 12) Meningkatkan penanganan sampah secara berkelanjutan dengan mendorong swadaya masyarakat
 - 13) Meningkatkan kelancaran angkutan orang, barang dan jasa serta peningkatan keselamatan lalu lintas jalan
 - 14) Perluasan kesempatan kerja serta peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
 - 15) Mengembangkan produk-produk wisata dan meningkatkan promosi
 - 16) Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan
 - 17) Meningkatkan pelayanan irigasi
 - 18) Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pendapatan di bidang energi dan sumber daya mineral daerah
- 4. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan misi “Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.” adalah :**

- 1) Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan
- 2) Meningkatkan pemerataan dan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, terutama dengan membebaskan biaya pemeriksaan di puskesmas untuk penduduk miskin
- 3) Meningkatkan kualitas keluarga melalui peningkatan akses pelayanan KB kepada masyarakat
- 4) Menjadikan perpustakaan sebagai sarana penambah pengetahuan
- 5) Meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan secara berkelanjutan dan sumber karbohidrat dan sumber protein.

7.3. ARAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG

Penyusunan Perda Bangunan Gedung diamanatkan pada Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang menyatakan bahwa pengaturan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan penyusunan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi kabupaten/kota setempat serta penyebarluasan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk dan standart teknis bangunan gedung dan operasionalisasinya di masyarakat.

Perda Bangunan Gedung mengatur tentang persyaratan administrasi dan teknis bangunan gedung. Salah satunya mengatur persyaratan keandalan gedung, seperti keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. Persyaratan ini wajib dipenuhi untuk memberikan perlindungan rasa aman bagi pengguna bangunan gedung dalam melakukan aktivitas di dalamnya dan sebagai landasan operasionalisasi penyelenggaraan bangunan gedung di daerah. Utamanya untuk daerah rawan bencana. Perda Bangunan Gedung sangat penting sebagai payung hukum di daerah dalam menjamin keamanan dan keselamatan bagi pengguna. Ketersediaan Perda Bangunan Gedung bagi Kabupaten Gresik merupakan salah satu prasyarat dalam prioritas pembangunan bidang Cipta Karya di Kabupaten Lamongan.

a. Ketentuan Perencanaan Tata Ruang Kota

1. Dengan ditetapkan Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota, maka ketentuan yang dipakai pada bagian dari Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Tata Ruang Kota yang ditetapkan tersebut.
2. Sepanjang perpetakan tanah belum diatur, maka perpetakan itu ditetapkan oleh Kepala Daerah, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Instansi-instansi terkait.
3. Pada suatu petak diperkenankan lebih dari satu bangunan rumah, kecuali jika dalam penentuan petak dalam Rencana detail Tata Ruang

Kota maupun dalam rencana Teknis Tata Ruang Kota telah ditentukan lain.

b. Ketentuan Garis Sempadan

1. Pemerintah Daerah menetapkan garis sempadan pagar, garis sempadan muka bangunan, garis sempadan samping dan garis sempadan belakang bangunan, garis sempadan untuk perairan umum, jaringan umum lapangan umum, serta kepentingan-kepentingan umum lainnya.
2. Dalam kawasan-kawasan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota, Rencana Tata Ruang Kota, bangunan yang telah ditetapkan keberadaannya dalam kawasan campuran, untuk klasifikasi bangunan itu dapat ditetapkan garis-garis sempadan bagi fungsi bangunan yang terbesar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Garis sempadan samping bangunan untuk berbagai type rumah tinggal kecuali type tunggal, ditetapkan di dalam Ijin Mendirikan Bangunan dengan ketentuan luas total lantai dasar tidak boleh melebihi 60 % dari luas persil.
4. Setidak-tidaknya salah satu sisi, garis sempadan samping atau garis sempadan belakang bangunan pada kapling pojok (sudut) ditetapkan minimum 2 meter.
5. Garis sempadan muka bangunan pada jalan-jalan buntu atau pada jalan-jalan umum lainnya yang belum diatur oleh Rencana Tata Ruang Kota ditetapkan minimum sebesar setengah lebar jalan atau minimum 3 meter.
6. Kepala Daerah dapat memberikan pembebasan antara garis sempadan muka bangunan dan garis sempadan pagar untuk mendirikan gardu kebun yang terbuka, pergola-pergola dan bangunan semacamnya, yang merupakan bagian dari perlengkapan kebun.
7. Ketentuan garis sempadan samping dan garis sempadan belakang bangunan untuk bangunan-bangunan non rumah tinggal, bangunan campuran dan bangunan khusus adalah sebagai berikut :
 - ✓ bangunan dengan ketinggian sampai dengan 4 lantai ditetapkan 3,00 meter ;
 - ✓ bangunan dengan ketinggian 5 lantai ditetapkan 5,50 meter ;
 - ✓ bangunan dengan ketinggian 6 lantai ditetapkan 6,00 meter ;
 - ✓ bangunan dengan ketinggian 7 sampai dengan 9 lantai ditetapkan 7, 00 meter ;
 - ✓ bangunan dengan ketinggian 10 sampai dengan 16 lantai ditetapkan 9,00 meter ;
 - ✓ bangunan dengan ketinggian 17 sampai dengan 24 lantai ditetapkan 10,00 meter ;

- ✓ bangunan dengan ketinggian 25 sampai dengan 30 lantai ditetapkan 12,00 meter ;
 - ✓ bangunan dengan ketinggian 30 sampai dengan 120 lantai ditetapkan 30,00 meter ;
8. Untuk penetapan garis sempadan dan garis sempadan belakang bangunan bagi bangunan berlantai 30 keatas dengan sistem sudut ditetapkan sebesar 77 dengan ketentuan titik sudut pada sepanjang batas persil tersebut.
 9. Untuk penetapan garis sempadan bangunan samping dan belakang bangunan non perumahan khusus untuk ukuran minimum ditetapkan sebagai berikut :
 - ✓ dikenakan satu sisi samping dan belakang jarak 3 meter untuk ukuran lebar kapling minimum 20 meter dan panjang minimal 20 meter dengan ketentuan bahwa bangunan lain yang bersebelahan yang berhimpit disyaratkan sama ;
 - ✓ dikenakan dua sisi samping untuk ukuran lebar kapling minimum 20 meter dan panjang lebih dari 20 meter.
 10. Untuk bangunan industri, garis sempadan samping dan belakang bangunan ditetapkan minimum 6 meter.
 11. Garis sempadan merupakan jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu masa bangunan terhadap :
 - ✓ batas lahan yang dikuasai ;
 - ✓ batas tepian sungai/pantai ;
 - ✓ antar masa bangunan lainnya atau
 - ✓ rencana saluran, jaringan tegangan listrik, pipa gas dan lain-lain.
 12. Pada bangunan rumah tinggal rapat tidak terdapat jarak bebas samping. Jarak bebas belakang ditentukan minimal $\frac{1}{2}$ dari besar garis sempadan muka.
 13. Jarak antar masa bangunan :
 - ✓ jarak antar masa bangunan satu lantai minimum 4 meter ;
 - ✓ untuk bangunan umum sekurang-kurangnya 6 meter dan 3 meter ;
 - ✓ untuk bangunan bertingkat, setiap kenaikan satu lantai ditambah 0,5 meter ;
 - ✓ mengikuti standart yang berlaku.

c. Ketentuan Luas Lantai, Tinggi Maksimum Bangunan Dan Jarak antar Bangunan

1. Penetapan besarnya KDB, KLB, tinggi maksimum bangunan dan jarak antar bangunan pada setiap persyaratan permohonan IMB ditetapkan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dituangkan dalam syarat zoning.
2. Ketentuan tentang KLB, KDB Garis sempadan dan Garis Sempadan Belakang bangunan pada masing-masing klasifikasi bangunan akan

- diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Persyaratan tinggi maksimum bangunan pada bangunan rumah tinggal kecuali rumah susun, tinggi maksimum bangunan ditetapkan sebanding dengan jaraknya terhadap as jalan yang berdekatan di depannya, bagi jalan-jalan yang lebarnya 20 meter ke atas, titik sudutnya ditetapkan 10 meter dan garis sempadan pagar ke tengah jalan.
 4. Tinggi maksimum bangunan maksimum pada bangunan-bangunan non rumah tinggal, bangunan campuran, rumah susun dan bangunan khusus tidak boleh melebihi 1, 5 x jaraknya terhadap as jalan di depannya yang berdekatan. Untuk jalan-jalan yang lebarnya 20 meter kebawah, pada jalan-jalan yang lebarnya lebih dari 20 meter, titik sudut ditetapkan 10 meter dari garis sempadan pagar ke tengah.
 5. Bangunan tidak permanen tidak diperkenankan bertingkat.
 6. Jarak muka pada bangunan tinggi II bagi bangunan non rumah tinggal ditetapkan Kepala Daerah.

7.4. ARAHAN RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (RISPAM)

Berdasarkan Permen PU No. 18 Tahun 2007, Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya. RI-SPAM dapat berupa RISPAM dalam satu wilayah administrasi maupun lintas kabupaten/kota/provinsi. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM memperhatikan aspek keterpaduan dengan prasarana dan sarana sanitasi sejak dari sumber air hingga unit pelayanan dalam rangka perlindungan dan pelestarian air.

Secara umum tingkat pelayanan air minum di Kabupaten Lamongan sudah terlayani semua, baik menggunakan sistem perpipaan maupun sistem non perpipaan. Untuk sistem distribusi air minum sistem perpipaan di Kabupaten Lamongan dilayani oleh PDAM Kabupaten Lamongan, sementara untuk sistem distribusi non perpipaan masyarakat memanfaatkan air dari SGL (Sumur Gali) dan SPT (Sumur Pompa Tangan). Cakupan pelayanan untuk sistem distribusi perpipaan hampir sudah menjangkau semua kelurahan, sementara untuk sistem distribusi non perpipaan semua ada di setiap kelurahan.

Program pengembangan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum bertujuan meningkatkan pelayanan Air minum perkotaan, khususnya bagi masyarakat miskin kawasan rawan air, selain itu juga untuk meningkatkan keikutsertaan swasta dalam investasi dalam pembangunan PS Air Minum di perkotaan.

Dalam penyusunan RPIJM harus memperhatikan Rencana Indum Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM) yang ada di Kabupaten/Kota, RI-SPAM merupakan rencana jangka panjang suatu wilayah baik di dalam Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dan antar propinsi.

Pelayanan air bersih di Kabupaten Gresik relatif masih kurang di bandingkan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Hal ini dapat digambarkan pelayanan kepada masyarakat perkotaan 70% dan masyarakat pedesaan 30%. Sedangkan jumlah penduduk pedesaan jauh lebih besar bila dibandingkan dengan penduduk perkotaan.

Penanganan ketersediaan air bersih senantiasa dilakukan, baik dari segi manajemen, pengembangan jaringan, maupun optimalisasi sumberdaya air yang ada. Namun demikian pemenuhan kebutuhan air bersih yang bisa terlayani baru mencapai 20% dari kebutuhan masyarakat. Kegiatan yang telah dilaksanakan :

- Sistem Pengembangan Air Minum Umbulan.
- Penambahan Jaringan dan Peningkatan Kapasitas Produksi Air Bersih PDAM
- Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaan (SIPAS/HU)

Berdasarkan perhitungan dari RTRW 2008, diketahui perkiraan kebutuhan air bersih pada tahun 2008 dan tahun 2028 berturut-turut sebesar 2468,11 liter/detik 4874,78 liter/detik. Kebutuhan air sebesar ini harus mampu disediakan oleh PDAM dengan memanfaatkan berbagai sumber air baku yang ada, baik air permukaan maupun air tanah. Apalagi mengingat pertumbuhan industri besar akan masih signifikan di tahun-tahun kedepan, maka PDAM Kabupaten Gresik harus memikirkan alternatif rencana penyediaan air bersih yang meliputi pencarian sumber-sumber air baku alternatif.

Disamping itu harus dicatat bahwa perkiraan kebutuhan air di atas belum memperhitungkan kebutuhan air untuk proses produksi industri. Kebutuhan air semacam ini tidak bisa diprediksi karena besarnya sangat tergantung pada jenis proses produksi itu sendiri, tetapi harus tersedia secara kontinyu. Oleh sebab itu untuk memenuhi kebutuhan air ini, industri-industri pada umumnya menggunakan air tanah.

Penggunaan air tanah harus sepengetahuan dan dibawah pengawasan dinas yang terkait untuk mencegah akibat negatif dari pengambilan air tanah yang berlebihan seperti perubahan kualitas, serta terganggunya keseimbangan air dalam tanah yang berdampak intrusi air laut.

7.5. ARAHAN STRATEGI SANITASI KOTA (SSK)

Strategi Sanitasi Kabupaten Gresik adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif pada tingkat Kabupaten yang dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi Kabupaten Gresik dengan

tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan.

7.5.1. Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten/Kota

Visi misi sanitasi untuk memberi arahan bagi pengembangan sanitasi Kabupaten Gresik dalam rangka mencapai visi misi kabupaten Gresik

7.5.1.1. Visi

Terwujudnya Lingkungan yang Bersih dan Sehat menuju Masyarakat Sejahtera

7.5.1.2. Misi

- Stop Buang Air Besar Sembarangan
- Perluasan layanan air limbah melalui sistem sewerage
- Peningkatan layanan air limbah setempat dan komunal
- Penerapan praktik 3R secara nasional .
- Peningkatan sistem Tempat Pemrosesan Akhir Sampah menjadi *sanitary landfill*
- Pengurangan genangan /banjir

7.5.2. TUJUAN, SASARAN, DAN TAHAPAN PENCAPAIAN

7.5.2.1. Sub Sektor Air Limbah

Tujuan:

Meningkatkan lingkungan yang sehat dan bersih di Kabupaten Gresik melalui pengelolaan air limbah domestik dan industri rumah tangga yang berwawasan lingkungan.

Sasaran:

1. Tersedianya 2 dokumen perencanaan pengelolaan air limbah domestik dan industri rumah tangga skala kabupaten pada akhir tahun 2013
2. Meningkatnya cakupan kepemilikan jamban keluarga dengan penggunaan tangki septik dari 67 % menjadi 80 % untuk rumah tangga miskin pada akhir tahun 2016
3. Meningkatnya jumlah dan cakupan layanan pengelolaan air limbah secara komunal dari 3 unit menjadi 50 unit di wilayah padat kumuh miskin kabupaten di akhir tahun 2016.
4. Tersedianya dan berfungsinya IPAL Komunal untuk industri rumah tangga sebanyak menjadi 30 unit pada akhir tahun 2014
5. Tersedianya dan berfungsinya 2 unit layanan pengelolaan Air Limbah Domestik skala kabupaten pada akhir tahun 2016

Tabel 7.5. Tahapan Pencapaian Sub Sektor Air Limbah

No	Sasaran	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Tersedianya 2 dokumen perencanaan pengelolaan air	√				

	limbah domestik dan industri rumah tangga skala kabupaten pada akhir tahun 2013					
2.	Meningkatnya cakupan kepemilikan jamban keluarga dengan penggunaan tangki septik dari 67 % menjadi 80 % untuk rumah tangga miskin pada akhir tahun 2016	√	√	√	√	√
3.	Meningkatnya jumlah dan cakupan layanan pengelolaan air limbah secara komunal dari 3 unit menjadi 50 unit di wilayah padat kumuh miskin kabupaten di akhir tahun 2016.	√	√	√	√	√
4.	Tersedianya dan berfungsinya IPAL Komunal untuk industri rumah tangga sebanyak menjadi 30 unit pada akhir tahun 2014	√	√	√	√	√

7.5.2.2. Sub Sektor Persampahan

Tujuan:

Mewujudkan lingkungan yang sehat , nyaman dan bersih di Kabupaten Gresik melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan untuk seluruh kabupaten di atas Standar Pelayanan Minimum/SPM.

Sasaran:

1. Tersedianya 3 dokumen perencanaan sistem Persampahan Kabupaten yang terintegrasi di akhir tahun 2013
2. Meningkatnya efektifitas cakupan layanan pengelolaan persampahan dari 17,25% menjadi 70% pada akhir tahun 2016
3. Terwujudnya pengurangan sampah sebesar 20% di Tahun 2016

Tabel 7.6. Tahapan Pencapaian Sub Sektor Persampahan

No	Sasaran	2012	2013	2014	2015	2016
1	Tersedianya dan berfungsinya 2 unit layanan pengelolaan Air Limbah Domestik skala kabupaten pada akhir tahun 2016	√	√	√	√	√
2	Meningkatnya efektifitas layanan pengelolaan persampahan dari 55 % menjadi 75 % pada akhir tahun 2015	√	√	√	√	√
3	Terwujudnya pengurangan sampah sebesar 20% di Tahun 2016		√	√	√	√

7.5.2.3. Sub Sektor Drainase Lingkungan

Tujuan:

Meningkatkan lingkungan yang sehat dan bersih di Kabupaten Gresik melalui penyediaan sarana dan prasarana drainase.

Sasaran:

1. Tersedianya 2 dokumen perencanaan sistem drainase kabupaten yang terintegrasi di akhir tahun 2013
2. Berkurangnya luas genangan di wilayah kota Kabupaten Gresik dari 391,611 Ha menjadi 100 Ha dengan memprioritaskan penanganan di wilayah permukiman di akhir Tahun 2016

Tabel 7.7. Tahapan Pencapaian Sub Sektor Drainase Lingkungan

No	Sasaran	2012	2013	2014	2015	2016
1	Tersedianya 2 dokumen perencanaan sistem drainase kabupaten yang terintegrasi di akhir tahun 2013	√	√	√	√	√
2	Berkurangnya luas genangan di wilayah kota Kabupaten Gresik dari 391,611 Ha menjadi 100 Ha dengan memprioritaskan penanganan di wilayah permukiman di akhir Tahun 2016	√	√	√	√	√

7.5.2.4. Aspek PHBS

Tujuan:

Mewujudkan Kabupaten Gresik yang sehat dengan membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Sasaran:

1. Meningkatkan cakupan PHBS strata utama dan paripurna dari 67% pada Tahun 2011 menjadi 80% pada akhir Tahun 2016
2. Meningkatnya peran media dalam promosi PHBS
3. Meningkatnya jumlah dukungan sektor swasta (CSR) dalam promosi PHBS sampai tahun 2015.

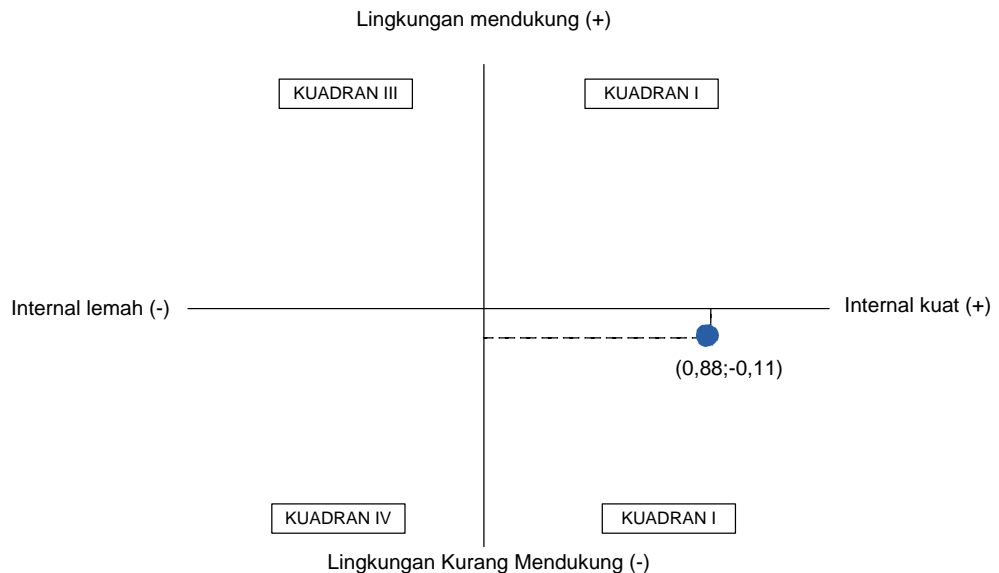
Tabel 7.8. Tahapan Pencapaian Sub Sektor PBHS

No	Sasaran	2012	2013	2014	2015	2016
1	Meningkatnya cakupan PHBS strata utama dan paripurna dari 67% pada Tahun 2011 menjadi 80% pada akhir Tahun 2016	√	√	√	√	√
2	Meningkatnya peran media dalam promosi PHBS	√	√	√	√	√
3	Meningkatnya jumlah dukungan sektor swasta (CSR) dalam promosi PHBS sampai tahun 2015	√	√	√	√	√

7.5.3. STRATEGI ASPEK TEKNIS DAN PHBS

7.5.3.1. Sub Sektor Air Limbah Domestik

A. Matrik Pemilihan Strategi



B. Strategi Air Limbah

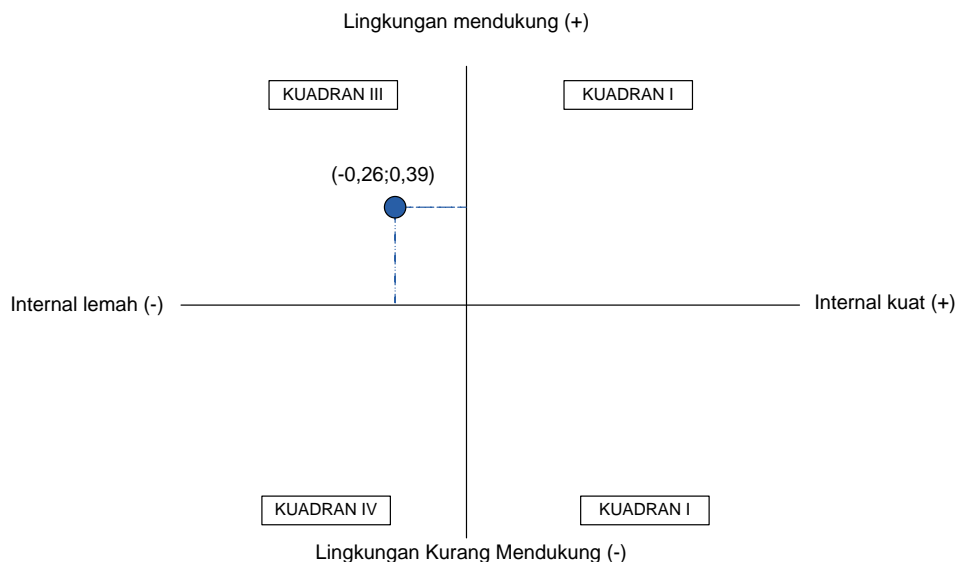
Berdasarkan pada hasil matriks pilihan strategi sub sektor air limbah berada diantara kuadran II (**dua**) **mendukung strategi diversification (pertukaran usaha)** sehingga strategi yang dikembangkan untuk memanfaatkan kekuatan untuk mengurangi ancaman, adalah :

1. Tersedianya 2 dokumen perencanaan pengelolaan air limbah domestik dan industri rumah tangga skala kabupaten pada akhir tahun 2013
 - Mengembangkan perencanaan pengelolaan air limbah skala kabupaten
 - Meningkatkan pemahaman, kemitraan dan komitmen pengelolaan air limbah domestik dan industri rumah tangga Meningkatkan pemahaman, kemitraan dan komitmen pengelolaan air limbah domestik dan industri rumah tangga dengan off site system pada wilayah CBD dan wilayah padat.
2. Meningkatnya cakupan kepemilikan jamban keluarga dengan penggunaan tangki septik dari 67 % menjadi 80 % untuk rumah tangga miskin pada akhir tahun 2016 :
 - Mengoptimalkan dan inovasi program stimulus kepemilikan jamban keluarga sehat.
 - Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan stakeholder tentang pengelolaan jamban keluarga
3. Tersedianya dan berfungsinya IPAL Komunal untuk industri rumah tangga sebanyak menjadi 30 unit pada akhir tahun 2014, adalah:

- Membangun sarana IPAL komunal industri rumah tangga di wilayah baru
 - Optimalisasi fungsi Sarana dan Prasarana pengolah air limbah industri rumah tangga yang ada
4. Tersedianya dan berfungsinya 2 unit layanan pengelolaan Air Limbah Domestik skala kabupaten pada akhir, adalah:
- Menyediakan sarana & prasarana pengolahan air limbah domestik skala kabupaten
 - Mendorong minat swasta dalam layanan pengelolaan air limbah domestik

7.5.3.2. Sub Sektor Persampahan

A. Matrik Pemilihan Strategi



B. Strategi Persampahan

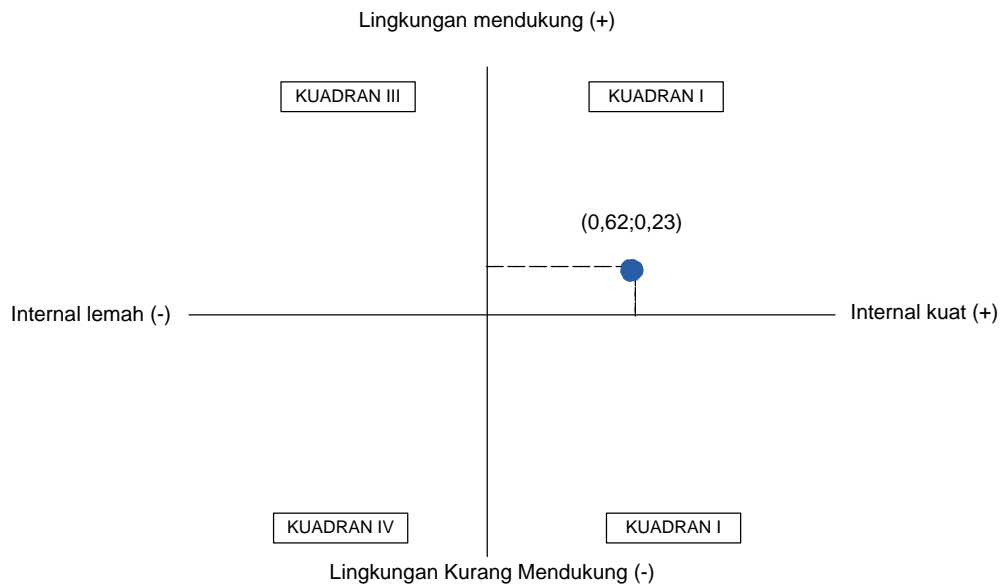
Berdasarkan pada hasil matriks pilihan strategi sub sektor air limbah berada diantara kuadran III (**tiga**) **mendukung strategi stabilisasi** sehingga strategi adalah memaksimalkan peluang untuk mengurangi kelemahan, adalah :

1. Tersedianya 3 dokumen perencanaan sistem Persampahan Kabupaten yang terintegrasi di akhir tahun 2013, adalah :
 - Mengembangkan perencanaan sistem Persampahan Kabupaten yang terintegrasi dan komprehensif
2. Meningkatnya efektifitas cakupan layanan pengelolaan persampahan dari 17,25% menjadi 70% pada akhir tahun 2016
 - Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
 - Meningkatkan kinerja pengelolaan layanan persampahan.
 - Meningkatkan investasi dalam layanan pengelolaan persampahan
 - Mengoptimalkan kebijakan pengelolaan persampahan
3. Terwujudnya pengurangan sampah sebesar 20% di Tahun 2016

- Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan dalam pengolahan sampah 3R
- Meningkatkan peranserta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan persampahan dengan konsep 3R

7.5.3.3. Sub Sektor Drainase Lingkungan

A. Matrik Pemilihan Strategi



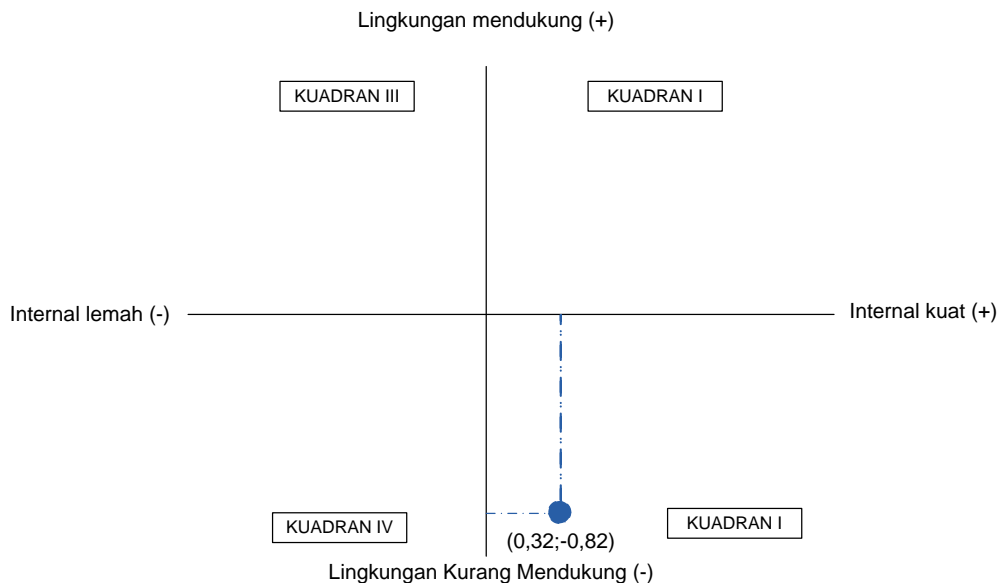
B. Strategi Drainase

Berdasarkan pada hasil matriks pilihan strategi sub sektor drainase lingkungan berada pada kuadran I (**satu**) dan pada posisi strategi "**mendukung strategi growth (pertumbuhan)**", sehingga strategi yang dikembangkan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, adalah :

1. Tersedianya perencanaan pengelolaan Drainase perkabupatenan pada akhir tahun 2013 adalah:
 - Mengembangkan perencanaan sistem drainase kabupaten yang terintegrasi dan komprehensif.
2. Berkurangnya luas genangan di Kota Tegal dari 4,3 Ha menjadi 1,3 Ha dengan memprioritaskan penanganan di wilayah permukiman di akhir Tahun 2015, adalah:
 - Mengoptimalkan Fungsi Sistem Drainase Lingkungan Yang Sudah Ada
 - Mengoptimalkan daya dukung kebijakan pengelolaan drainase lingkungan.

7.5.3.4. Aspek PHBS

A. Matrik Pemilihan Strategi



B. Strategi Higiene

Berdasarkan pada hasil matriks pilihan strategi sub sektor air limbah berada diantara kuadran II (**dua**) **mendukung strategi diversification (pertukaran usaha)** sehingga strategi yang dikembangkan untuk memanfaatkan kekuatan untuk mengurangi ancaman, adalah :

1. Meningkatkan cakupan PHBS strata utama dan paripurna dari 67% pada Tahun 2011 menjadi 80% pada akhir Tahun 2016
 - Mengoptimalkan program UKBM untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam PHBS
 - Meningkatkan kuantitas dan kualitas kader kesehatan lingkungan dalam promosi PHBS
 - Mengoptimalkan peran instansi pemerintah dan sekolah dalam pemicuan dan penerapan PHBS.
 - Meningkatkan komitmen penentu kebijakan anggaran untuk PHBS.
2. Meningkatkan peran media dalam promosi PHBS
 - Mengembangkan program promosi PHBS yang menarik dan menjangkau semua lapisan masyarakat
3. Meningkatkan jumlah dukungan sektor swasta (CSR) dalam promosi PHBS sampai tahun 2016
 - Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dalam promosi PHBS

7.5.4. PROGRAM DAN KEGIATAN ASPEK TEKNIS DAN HIGIENE

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan sanitasi Kabupaten Gresik Tahun 2012 – 2016 ini disusun sesuai dengan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari masing-masing sub sektor sanitasi yaitu air limbah, persampahan, drainase dan higine/PHBS.

7.5.4.1. Sub sektor Air Limbah Domestik

No	Strategi	Program	Kegiatan
Sasaran I: Tersedianya 2 dokumen perencanaan pengelolaan air limbah domestik dan industri rumah tangga skala kabupaten pada akhir tahun 2013			
1	Mengembangkan perencanaan pengelolaan air limbah skala kabupaten	Program Perencanaan pengembangan wilayah perkotaan menengah	1. Penyusunan Master Plan air limbah skala kabupaten. 2. Penyusunan DED pengolahan air limbah skala kabupaten
2	Meningkatkan pemahaman, kemitraan dan komitmen pengelolaan air limbah domestik dan industri rumah tangga	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1. Penyusunan Perbup tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik 2. Penyusunan Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik.
Sasaran II: Meningkatnya cakupan kepemilikan jamban keluarga dengan penggunaan tangki septik dari 67 % menjadi 80 % untuk rumah tangga miskin pada akhir tahun 2016.			
1	Mengoptimalkan dan inovasi program stimulus kepemilikan jamban keluarga sehat.	Program Lingkungan sehat perumahan.	Replikasi program jamban keluarga untuk rumah tangga (keluarga miskin)
		Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.	Replikasi kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni
		Pemberdayaan komunitas perumahan	Fasilitasi pembiayaan pembangunan dan perbaikan perumahan (arisan jamban non-keluarga miskin)
		Program Perumusan kerangka acuan kegiatan sosialisasi jamban keluarga.	konsolidasi penanganan air limbah
3	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan stakeholder tentang pengelolaan jamban keluarga.	Program Pendidikan Kedinasan.	1. Diklat/ Bimtek tentang pembangunan dan pemeliharaan tangki septik sesuai standart kesehatan. 2. Diklat PPNS. 3. Pendidikan S1 dan S2 bidang sanitasi
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.	1. Pembinaan Teknis Pengelolaan Jamban keluarga kepada masyarakat. 2. Pelatihan tentang pembangunan dan pemeliharaan tangki septic kepada kader kesehatan, tukang bangunan, dan perusahaan swasta penyedia jasa penyedotan tinja. 3. Pelatihan pembuatan dan

No	Strategi	Program	Kegiatan
			<p>pemasaran toilet leher angsa bagi Karang Taruna dan Tukang Bangunan.</p> <p>4. Sosialisasi tentang standar tangki septic (SNI 03-2398-2002) kepada PKK, Kepala Desa/Lurah, Camat dan Pers</p>
<p>Sasaran III: Meningkatnya jumlah dan cakupan layanan pengelolaan air limbah secara komunal dari 3 unit menjadi 50 unit di wilayah padat kumuh miskin kabupaten di akhir tahun 2016.</p>			
1	<p>Mengoptimalkan operasi dan pemeliharaan MCK dan IPAL/Septiktank komunal melalui pengorganisasian masyarakat dalam kelompok</p>	<p>Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa</p>	<p>1. Pembinaan KSM Pengelola MCK dan IPAL/Septic tank komunal.</p> <p>2. Pelatihan Teknik dan Sosialisasi Pengelolaan MCK dan IPAL/Septic tank Komunal.</p>
		<p>Program Monitoring dan Evaluasi Perkembangan KSM</p>	<p>Monitoring dan evaluasi KSM</p>
2	<p>Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan stakeholder pengelolaan IPAL/Septiktank komunal yang ramah lingkungan</p>	<p>Program Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Pengelolaan IPAL Sehat</p>	<p>Pembinaan Teknis Pengelolaan MCK dan IPAL/Septic tank Komunal untuk KSM</p>
3	<p>Replikasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah domestic berbasis komunal pada wilayah padat penduduk, kumuh dan miskin kabupaten</p>	<p>Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah</p>	<p>1. Pembangunan MCK komunal (Sanimas)</p> <p>2. Pembangunan IPAL/Septic tank komunal</p>
<p>Sasaran IV: Tersedianya dan berfungsinya IPAL Komunal untuk industri rumah tangga sebanyak menjadi 30 unit pada akhir tahun 2014</p>			
1	<p>Membangun sarana IPAL komunal industri rumah tangga di wilayah baru</p>	<p>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</p>	<p>Pembangunan IPAL Industri Rumah Tangga</p>
2	<p>Optimalisasi fungsi Sarana dan Prasarana pengolah air limbah industri rumah tangga yang ada</p>	<p>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</p>	<p>1. Pengadaan peralatan pendukung operasional IPAL</p> <p>2. Pembentukan KSM Pengelola IPAL Industri Rumah Tangga</p> <p>3. Bimbingan Teknis Pengelolaan IPAL Industri Rumah Tangga bagi KSM</p> <p>4. Penyusunan Standar Operasional Procedure (SOP) pengelolaan IPAL Industri Rumah Tangga</p> <p>5. Bimbingan Teknis Penerapan produksi bersih bagi pelaku industri rumah tangga</p>
<p>Sasaran V: Tersedianya dan berfungsinya 2 unit layanan pengelolaan Air Limbah Domestik skala kabupaten pada akhir tahun 2016</p>			
1	<p>Menyediakan sarana & prasarana pengolahan air limbah domestic skala kabupaten</p>	<p>Program Pengembangan Pengelolaan Sanitasi</p>	<p>1. Penyusunan DED Pembangunan IPLT</p> <p>2. Pembangunan (konstruksi) IPLT</p> <p>3. Pengadaan Mobil sedot tinja.</p>

No	Strategi	Program	Kegiatan
2	Mendorong minat swasta dalam layanan pengelolaan air limbah domestik	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pameran dan temu bisnis pengelolaan air limbah 2. Event bersama tentang pengelolaan air limbah 3. Penyusunan Pra Studi Kelayakan investasi pengelolaan air limbah

7.5.4.2. Sub sektor Persampahan

No	Strategi	Program	Kegiatan
Sasaran I: Tersedianya 3 dokumen perencanaan sistem Persampahan kabupaten yang terintegrasi di akhir tahun 2013.			
1	Mengembangkan perencanaan sistem Persampahan kabupaten yang terintegrasi dan komprehensif	Perencanaan pengembangan wilayah perkotaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Master Plan Persampahan. 2. Penyusunan DED TPA 3. Penyusunan DED TPS/ TPST
		Pengembangan Data / Informasi kinerja persampahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, updating, dan analisis data persampahan 2. Penyusunan Profil pengelolaan persampahan.
Sasaran II: Meningkatnya efektifitas cakupan layanan pengelolaan persampahan dari 17,25% menjadi 70% pada akhir tahun 2016.			
1	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan dumptruck. 2. Pengadaan Armroll truck 3. Pengadaan dozer 4. Pengadaan excavator. 5. Pengadaan container 6. Pengadaan Gerobak sampah 7. Pembangunan TPS. 8. Pembangunan TPST. 9. Pembangunan TPA ramah lingkungan skala Kabupaten. 10. Pembangunan TPA ramah lingkungan skala Regional (terpadu)
		Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan komposter & mesin pencacah u/ komposting skala kota. 2. Pengadaan incenerator
2	Meningkatkan kinerja pengelolaan layanan persampahan.	Program Peningkatan Efektivitas Organisasi Pemerintah Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian Analisis Beban Kerja dan Analisis Tupoksi pada Bidang Kebersihan BLH 2. Pembentukan Unit Pengaduan Masalah Pengelolaan Sampah.
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diklat/ Bimtek tentang Pengelolaan Sampah 2. Diklat/ Bimtek tentang Pemeliharaan Alat-Alat Berat.
		Peningkatan Kerjasama Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama pengelolaan persampahan 2. Pembenahan Kerjasama Pemungutan Retribusi Kebersihan.
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan <ol style="list-style-type: none"> 1. Operasional dan pemeliharaan TPA 2. Operasional dan pemeliharaan

No	Strategi	Program	Kegiatan
			TPS/ TPST 3. Penyusunan SOP operasi dan pemeliharaan prasana dan sarana persampahan
3	Mengoptimalkan kebijakan pengelolaan persampahan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah 1. Penyempurnaan Perda tentang Pengelolaan Persampahan 2. Penyusunan pedoman manajemen asset persampahan. 3. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan.
4	Meningkatkan investasi dalam layanan pengelolaan persampahan	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	4. Pameran dan temu bisnis pengelolaan persampahan 5. Event bersama tentang pengelolaan persampahan 6. Penyusunan Pra Studi Kelayakan investasi pengelolaan persampahan
Sasaran III: Mengurangi timbulan sampah dengan sistem 3R skala rumah tangga sebesar 20% pada tahun 2016			
1	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan stakeholder dalam pengelolaan sampah dengan konsep 3 R	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelatihan tentang pengelolaan sampah dengan konsep 3 R
		Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Sosialisasi dan Pembinaan tentang Sistem Pengelolaan Sampah dengan konsep 3 R.
2	Meningkatkan peranserta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan persampahan dengan konsep 3R	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1. Proyek percontohan (pilot project) pengelolaan sampah dengan konsep 3 R 2. Fasilitasi jaringan kerjasama dalam pengelolaan 3 R 3. Publikasi melalui website, leflet, dan radio 4. Lomba kebersihan tingkat RW 5. Pemberian penghargaan (<i>Sanitation Award</i>) bagi pelaku bisnis yang peduli pengelolaan sampah 6. Pengadaan bak sampah terpilah

7.5.4.3. Sub sektor Drainase Lingkungan

No	Strategi	Program	Kegiatan
Sasaran I: Tersedianya 2 dokumen perencanaan sistem drainase kabupaten yang terintegrasi di akhir tahun 2013			
1	Mengembangkan perencanaan sistem drainase kabupaten yang terintegrasi dn komprehensif	Perencanaan pengembangan wilayah perkotaan	1. Penyusunan Master Plan Drainase Gresik Selatan, Utara dan Bawean. 2. Penyusunan DED jaringan drainase primer, sekunder dan tersier. 3. Penyediaan ROW jaringan drainase, rumah pompa dan boozem
		Pengembangan Data / Informasi	1. Pendataan aset-aset untuk bangunan pengendali banjir 2. Pendataan kepemilikan tanah oloran, ROW saluran muara sungai dan kawasan konservasi pantai 3. Penyusunan Profilpengelolaan drainase

No	Strategi	Program	Kegiatan
Sasaran II: Berkurangnya luas genangan di wilayah kota Kabupaten Gresik dari 391,611 Ha menjadi 100 Ha dengan memprioritaskan penanganannya di wilayah permukiman di akhir Tahun 2016			
1	Meningkatkan pemahaman, kemitraan dan komitmen pengelolaan drainase lingkungan	Pengembangan kapasitas aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi website dan jaringan media massa serta saluran komunikasi Pemkot; iklan layanan masyarakat; rubrik Tanya Jawab di media massa dan talk show radio & televisi; oleh para pengambil kebijakan / tokoh kunci. 2. Pemberdayaan masyarakat dalam OP saluran drainase 3. Lomba lingkungan sehat
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diklat/ Bimtek pengelolaan drainase perkotaan 2. Pendidikan S1 dan S2 bidang Drainase 3. Strudi banding pengelolaan drainase perkotaan
2	Mengoptimalkan Fungsi Sistem Drainase Lingkungan Yang Sudah Ada	Program pembangunan drainase /gorong-gorong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan sarana drainase. 2. Pembangunan rumah pompa. 3. Normalisasi saluran Drainase dan muara. 4. Pembangunan pintu air di muara sungai/ saluran 5. Monitoring integrasi jaringan drainase lingkungan dengan jaringan drainase sekunder dan primer 6. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan drainase primer, sekunder dan tersier 7. Pembangunan dan normalisasi boozem
3	Mengoptimalkan Daya Dukung Kebijakan Pengelolaan Drainase Lingkungan	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perda Pengelolaan Drainase. 2. Pengubahan model pengawasan utilitas bangunan.
		Peningkatan kapasitas lembaga pengelola drainase	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan UPT Pengelola rumah pompa 2. Pembentukan Unit Pengaduan Masyarakat terkait Drainase

7.5.4.4. Aspek PHBS

No	Strategi	Program	Kegiatan
Sasaran I : Meningkatkan cakupan PHBS strata utama dan paripurna dari 67% pada Tahun 2011 menjadi 80% pada akhir Tahun 2016			
1	Mengoptimalkan program UKBM untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam PHBS	Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Pembuatan media promosi dan informasi sadar hidup sehat.
		Program Kerjasama informasi dengan mass media	Sosialisasi/ Penyuluhan masyarakat tentang PHBS
		Program Pemberdayaan komunitas perumahan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan
		Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Peningkatan peran serta organisasi wanita dalam menggalakkan PHBS
2	Meningkatkan kuantitas dan kualitas kader kesehatan lingkungan dalam promosi PHBS	Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Loklatih dan penyegaran kader kesehatan lingkungan, kader Posyandu, SKD tentang PHBS dan

No	Strategi	Program	Kegiatan
			teknik komunikasi
		Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	1. Pembinaan dan pendampingan kader kesehatan lingkungan, kader Posyandu, SKD 2. Pemicuan kreatifitas dan aktivitas kader kesehatan lingkungan
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1. Lomba Kader Kesehatan Lingkungan 2. Lomba Lingkungan Desa Sehat
		Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Stimulan untuk Kader Kesehatan dan Posyandu
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pendataan PHBS tatanan rumah tangga kepada seluruh keluarga di Kabupaten Gresik
3	Mengoptimalkan peran instansi pemerintah dan sekolah dalam penerapan PHBS	Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	1. Penerbitan surat edaran Bupati tentang PHBS 2. Sosialisasi PHBS di instansi pemerintah dan sekolah
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan sarana sanitasi dan CTPS dengan memisahkan toilet pria dan wanita di sekolah dan kantor
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Studi banding ke daerah lain yang sudah berhasil dalam pelaksanaan program PHBS 2. Diklat/ Bimtek bagi petugas sanitasi
4	Meningkatkan komitmen penentu kebijakan anggaran untuk PHBS	Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan POA PHBS
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Lokakarya PHBS
Sasaran II: Meningkatnya peran media dari 8 menjadi 16 media dalam promosi PHBS			
1	Mengembangkan program promosi PHBS yang menarik dan menjangkau semua lapisan masyarakat	Program Kerjasama informasi dan media massa	Publikasi website dan jaringan media massa Pemkot; iklan layanan masyarakat; rubrik Tanya Jawab di media massa dan talk show radio & televisi; oleh para pengambil kebijakan / tokoh kunci.
		Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan jender dan anak	Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang PHBS yang sensitif jender
Sasaran III: Meningkatnya jumlah dukungan sektor swasta (CSR) sebanyak 50 perusahaan dalam promosi PHBS sampai tahun 2016			
1	Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dalam promosi PHBS	Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	1. Sosialisasi dan advokasi bersama dengan swasta 2. Pendataan dan sinkronisasi program CSR 3. Penyusunan kebijakan insentif bagi pihak swasta yang peduli akan PHBS

7.6. ARAHAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL)

7.6.1. RTBL Koridor Jl. Akim Kayat - Jl. M.H. Tamrin dan Jl. KH. Abdul Karim

7.6.1.1. Konsep Tata Lingkungan

Tata lingkungan di koridor perencanaan secara konseptual ditujukan untuk menciptakan struktur koridor yang memiliki kejelasan fungsinya sebagai *city gate*, *city hall*, dan *city corridor* (Tange; 1985).

Koridor perencanaan tidak bisa dilihat dilihat hanya dalam lingkup koridor itu sendiri. Tetapi harus dilihat dalam konteks yang lebih luas; yaitu sebagai bagian dari kawasan Kota Lama yang berpusat di alun-alun Gresik, yang bisa diakses dari arah Selatan, Barat, Utara dan dari arah Timur. Dilihat dalam konteks tersebut, maka posisi koridor perencanaan bisa dijelaskan sebagai berikut :

- *City gate* :
 - Ditinjau pada lingkup kawasan Kota Lama, bagian koridor perencanaan yang berfungsi sebagai salah satu *gate* menuju kawasan Kota Lama, adalah pertigaan Jl. Usman Sadar-Jl. Akim Kayat yang berfungsi sebagai salah satu pintu masuk ke kawasan alun-alun Kota Gresik. Wujudnya berupa dua bangunan yang mengapit Jl. Akim Kayat yang lebih tinggi dari bangunan sekitarnya (bangunan dengan ketinggian setara 3-4 lantai yang bergungsi sebagai *landmark* yang menjadi penanda dan orientasi pengguna jalan yang akan menuju ke kawasan alun-alun dan sekitarnya (termasuk ke Makam Maulana Malik Ibrahim).
 - Ditinjau pada lingkup koridor perencanaan; terdapat empat spot yang berpotensi menjadi *city gate*; yaitu : (1) pertigaan Jl. Usman Sadar-Jl. Akim Kayat (*gate* ke alun-alun Gresik sekaligus *gate* koridor Akim Kayat-Thamrin); (2) pertigaan Jl. Akim Kayat-Thamrin dengan Abdul Karim, sebagai *gate* koridor Abdul Karim dari arah Selatan; (3) pertigaan Jl. Pahlawan-Jl. Thamrin, sebagai *gate* Jl. Thamrin dari arah Timur; dan (4) pertigaan Jl. Samanhudi-Jl. Abdul Karim sebagai *gate* koridor Abdul Karim dari arah Utara. *City gate* pertigaan Jl. Samanhudi-Jl. Abdul Karim bisa berfungsi sesudah *bottle neck* di sekitar pertigaan diurai dengan memperlebar Rumija di sekitar pertigaan tersebut.
- *City hall* :
 - Ditinjau pada lingkup kawasan Kota Lama; jantung kawasan Kota Lama Gresik adalah alun-alun, yang merupakan pusat kegiatan masyarakat baik secara simbolis maupun praktis. Pada lokasi yang diposisikan sebagai *node* kawasan Kota Lma ini, dijumpai banyak kegiatan masyarakat yang bersifat formal, tradisional maupun dalam bentuk kegiatan sehari-hari yang banyak dimanfaatkan untuk tempat rekreasi. Oleh karena itu, walaupun berada di luar koridor perencanaan; alun-alun Gresik diposisikan sebagai *city hall*. Jantung kegiatan Kota Lama lainnya adalah makam Maulana Malik Ibrahim yang banyak dikunjungi masyarakat terutama dari luar Kota Gresik.

Alun-alun Kota Gresik dan makam Maulana Malik Ibrahim adalah *city hall* yang menggerakkan kegiatan di kawasan Kota Lama termasuk koridor perencanaan.

- Ditinjau pada lingkup koridor perencanaan, bagian koridor yang diposisikan sebagai jantung kegiatan koridor perencanaan adalah aglomerasi fasilitas pelayanan umum di Jl. Abdul Karim yang terdiri dari : Kantor lurah Terate, RSIA Nyai Ageng Pinatih dan kompleks Sekolah MINU.

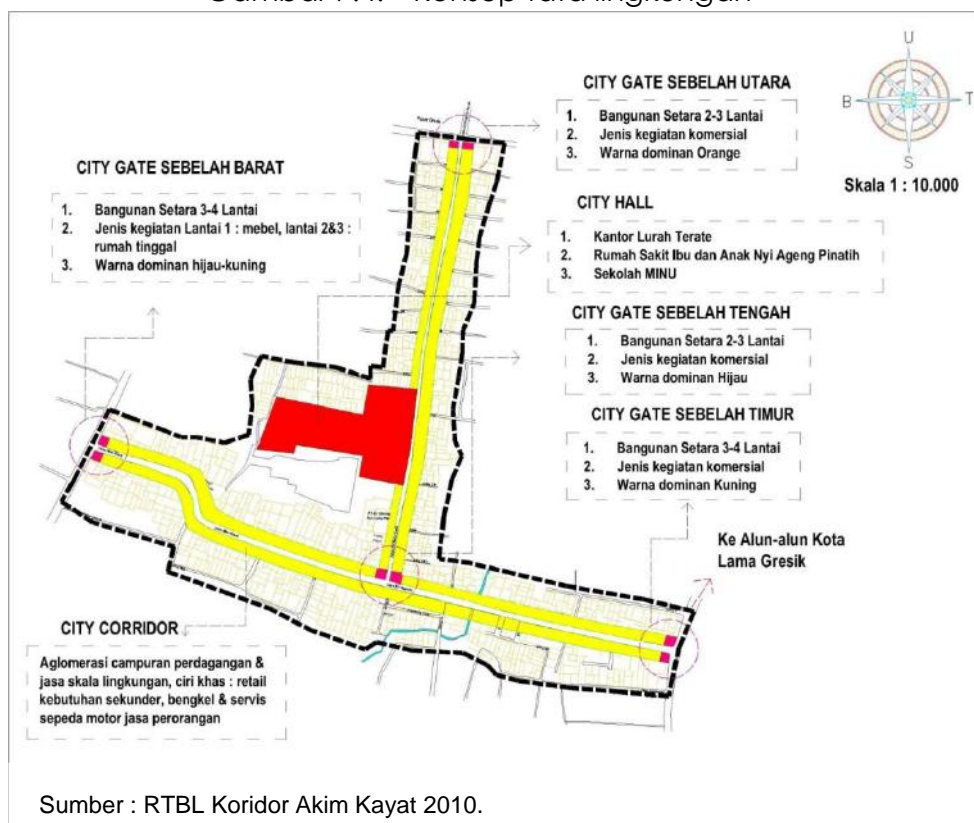
▪ *City corridor* :

Merupakan penghubung antara *city gate* dan *city hall*, yang diwujudkan dalam bentuk koridor untuk jalur kendaraan dan jalur pejalan kaki yang dilingkupi (*enclosed*) oleh deretan massa bangunan dan pepohonan di kiri kanannya. Koridor yang diposisikan sebagai *city corridor* adalah Jl. Akim Kayat-Thamrin dan Jl. Abdul Karim. Wujud *city corridor* adalah kegiatan komersial berskala lingkungan yang menampilkan aglomerasi linier toko retail, warung-warung kopi, kios dan kegiatan jasa yang melayani permukiman sekitarnya. Di sekitar kompleks sekolah disediakan toko eceran yang menjual peralatan dan perlengkapan sekolah.

Untuk mendukung kelancaran aktivitas koridor disediakan jalur sirkulasi kendaraan yang bisa dilewati dari dua arah (terdiri dari dua jalur), yang sepanjang kiri kanannya dilengkapi dengan trotoar untuk pejalan kaki.

Konsep tata lingkungan di koridor perencanaan dapat dilihat pada Gambar 5.13.

Gambar 7.4. Konsep tata lingkungan



7.6.1.2. Konsep Tata Bangunan

Konsep garis langit dari bangunan-bangunan di Jl. Akim Kayat-Thamrin diarahkan pada komposisi bangunan yang memiliki ketinggian rata-rata 1-2 lantai. Garis langit mendatar di sepanjang koridor, dan meninggi di bagian Bagat, bagian Tengah dan bagian Timur pada lokasi *city gate*, dengan ketinggian setara 3-4 lantai. Garis langit di Jl. Abdul Karim diarahkan pada bangunan dengan ketinggian rata-rata 1-2 lantai, dengan garis langit yang meninggi di bagian Selatan dan bagian Utara pada lokasi *city gate* yang mempunyai ketinggian bangunan setara 2-3 lantai (lihat Gambar 5.2.1).

Bangunan-bangunan di sepanjang koridor dikembangkan sebagai kumpulan kaveling yang diperlakukan sebagai blok. Dengan konsep ini kaveling dan bangunan di sepanjang koridor tetap bisa dikembangkan secara individual dengan merujuk pada konsep pengembangan blok yang diposisikan sebagai satu kesatuan blok yang utuh secara sekuensial. Kesatuan blok dikendalikan melalui instrumen selubung bangunan yang menetapkan ketinggian level yang seragam dan tampilan wajah bangunan yang harmonis dengan komposisi ulang atau varian.

Walaupun beberapa bangunan tampil dengan gaya arsitektur lokal, tetapi kecenderungan pengembangannya mengarah pada komposisi massa bangunan yang mengadopsi gaya arsitektur modern dan kontemporer yang disesuaikan dengan iklim setempat. Kesatuan (*unity*) dan keharmonisan (*harmony*) tatanan bangunan secara sekuensial diciptakan melalui komposisi varian dengan mengadopsi bentuk-bentuk atap yang serupa atau sejenis.

7.6.1.3. Konsep Sarana dan Prasarana

Konsep penataan sarana lingkungan diarahkan pada upaya untuk mempertahankan eksistensi dan pengembangan ke arah vertikal untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara tiga dimensi, dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan sekitarnya, terutama ketersediaan ruang terbuka untuk penghijauan dan persepan air di dalam kaveling. Dengan konsep ini keseimbangan antara bangunan dan ruang terbuka di dalam kaveling bisa dijaga komposisinya secara proporsional. Jenis sarana lingkungan yang eksistensinya dipertahankan adalah aglomerasi fasilitas lingkungan di Jl. Abdul Karim yang terdiri dari Kantor Lurah Terate, RSIA Nyai Ageng Pinatih dan Sekolah MINU. Sarana lingkungan yang sudah dikembangkan secara maksimum dikendalikan agar tidak diperluas lagi, kecuali melalui pembebasan lahan di bagian samping atau bagian belakang.

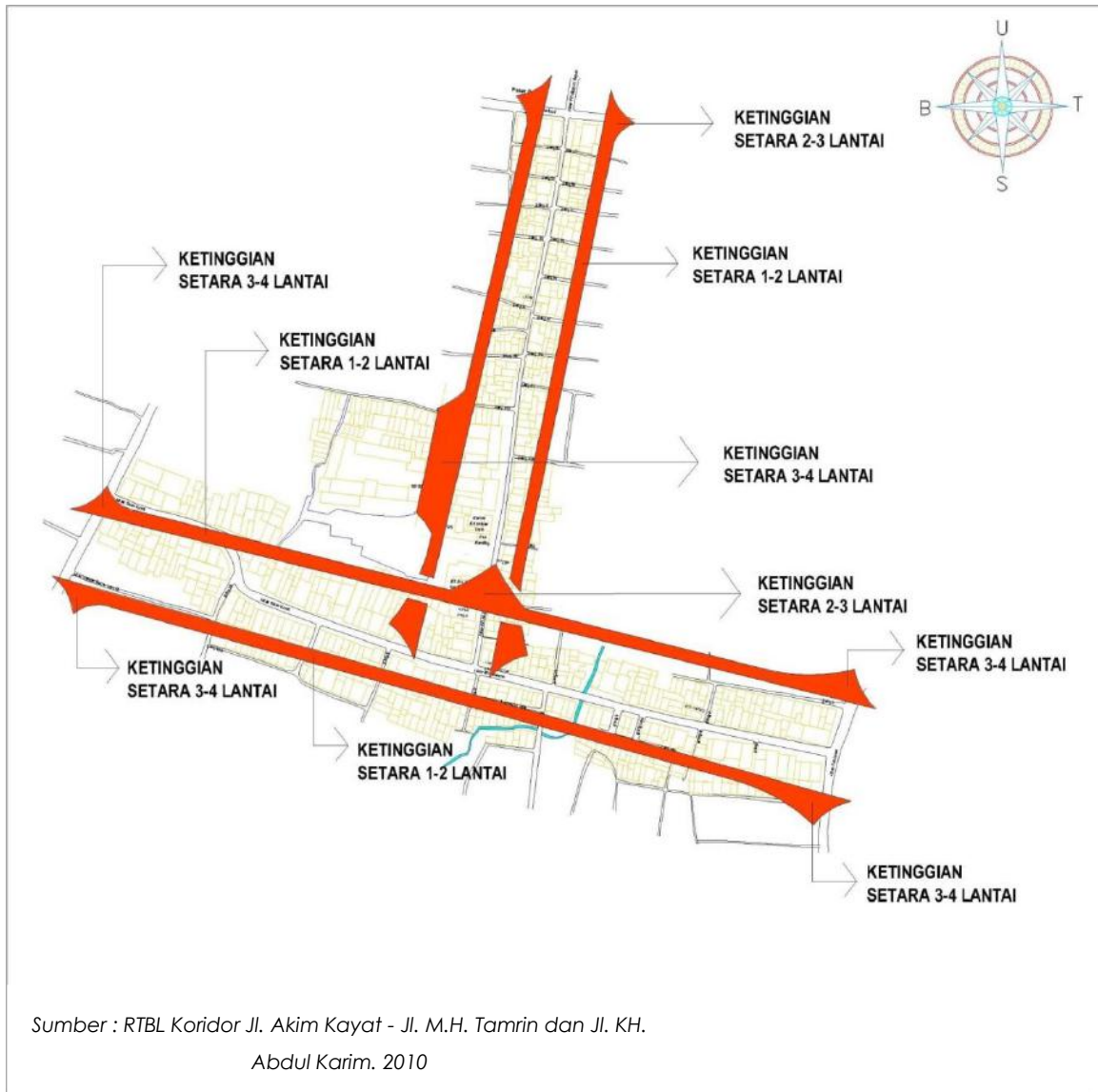
Sarana lingkungan yang berlokasi di luar aglomerasi tetap dipertahankan sebagaimana yang sudah ada (fasilitas peribadatan dan kantor). Pengembangannya dikendalikan sesuai kemampuan daya dukung lingkungan.

Konsep penataan prasarana atau utilitas lingkungan diarahkan pada upaya untuk menata kembali agar berfungsi secara optimal dan meminimalkan ketidak-teraturan jaringan utilitas pada ranah *urban design*.

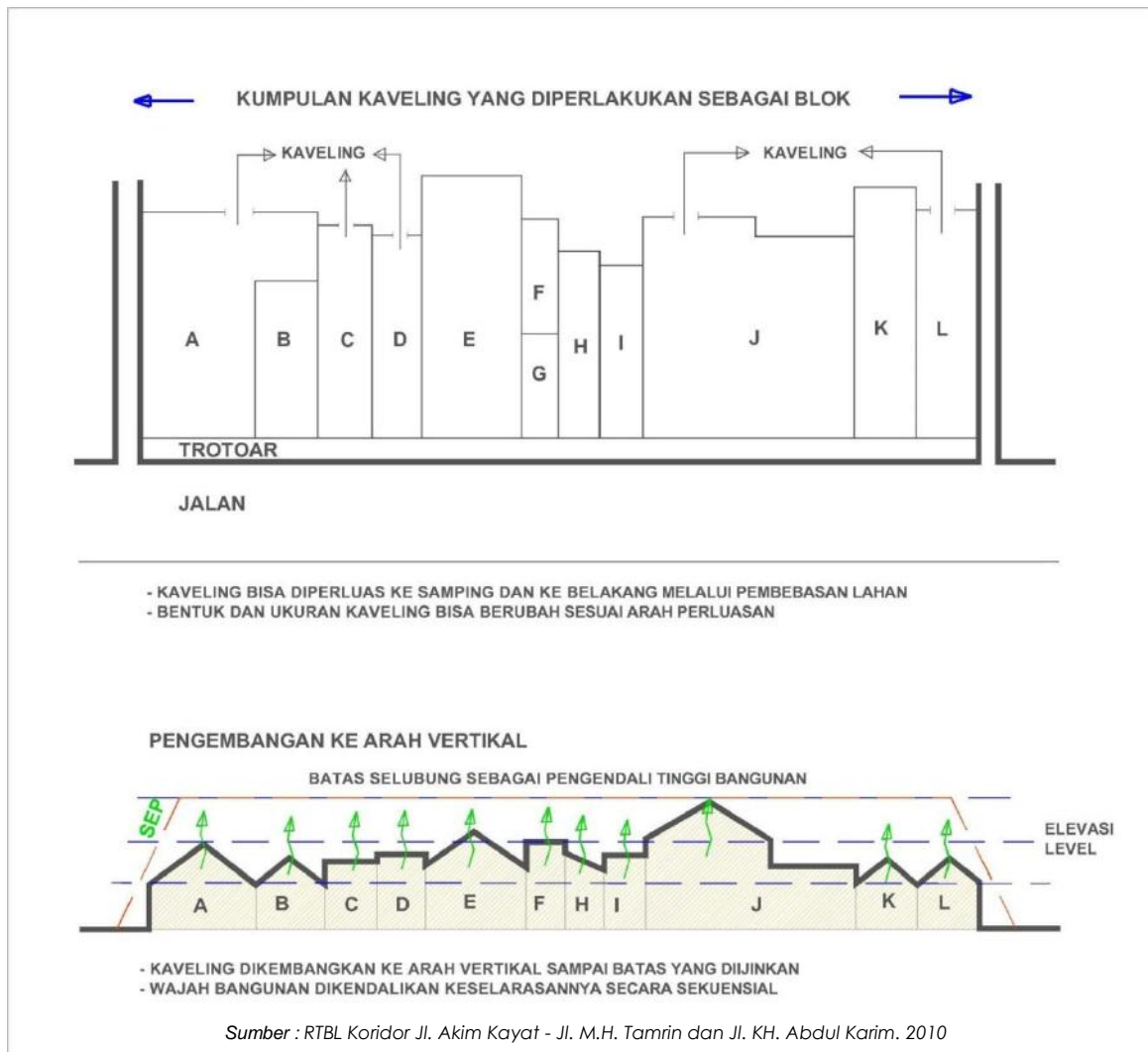
- Jaringan listrik dan jaringan telepon secara bertahap diarahkan pada penggunaan jaringan kabel bawah tanah dengan menggunakan *shaft* tersendiri. Walaupun biayanya relatif lebih mahal dari pada penggunaan kabel udara, penggunaan *shaft* menampilkan tatanan jaringan yang lebih rapih dan bersih sesuai tuntutan perkembangan kota-kota modern.
- Saluran drainase dan saluran pembuangan limbah cair rumah tangga yang saat ini berupa saluran tepi jalan yang sudah tertutup oleh perluasan bangunan, dinormalisasi dengan menggunakan *box culvert* yang ditempatkan di bawah badan jalan.

Penggunaan *box culvert* akan meminimalkan penggusuran bangunan di sepanjang kiri kanan jalan, karena bisa memanfaatkan ruang di bawah jalan. Untuk kepentingan pemeliharaan, pada setiap jarak tertentu disediakan *man hole* untuk pemeliharaan.

- Konsep penataan tempat sampah diarahkan pada upaya pengendalian sistem pembuangan sampah agar terjadi penumpukan sampah yang tidak terangkut di TPS. Upaya penyediaan dan penataan tempat sampah individu (*bin* sampah perorangan) yang mendukung kesehatan, kebersihan dan keindahan lingkungan. Penataan TPS di sekitar lokasi *boezem* Terate yang terintegrasi dengan lingkungan *boezem* dengan menghilangkan kesan kotor, jorok dan tidak digunakan sebagai tempat penimbunan atau penyimpanan barang bekas.
- Konsep penanggulangan kebakaran diarahkan pada upaya penyediaan jalan akses yang mencukupi untuk mobil PMK agar bisa menjangkau perkampungan perkampungan yang berada di wilayah belakang koridor. Termasuk penyediaan air dengan memanfaatkan *boezem* (pada saat terisi air mencukupi) dan penyediaan sumur kebakaran yang ditempatkan di lokasi strategis.



Gambar 7.5. Konsep tata bangunan : pembentukan garis langit



Gambar 7.6. Konsep tata bangunan

7.6.2. RTBL Kawasan Bunder

Menurut RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030, Terminal Bus Bunder rencananya direlokasi ke Desa Sumari Kecamatan Duduk Sampeyan terintegrasi dengan stasiun kereta api. Terminal Bunder hanya difungsikan untuk terminal angkutan kota dan angkutan perdesaan (terminal tipe C).

Sehubungan dengan hal tersebut diusulkan fungsi baru bekas terminal bus yang dipindahkan ke Duduk Sampeyan.

1. Alternatif

Beberapa alternatif fungsi baru yang diusulkan adalah : terminal kargo, pusat grosir, tempat rekreasi dan tempat bermain anak, pusat makanan khas Gresik.

2. Dasar Pertimbangan

Dasar pertimbangan yang digunakan untuk melakukan analisis adalah : (1) lokasi; (2) kebutuhan lahan; (3) gangguan yang ditimbulkan oleh pergerakan kendaraan yang masuk keluar tapak, terhadap lalu lintas umum; (4)

kemudahan aksesibilitas pengunjung yang memasuki lokasi tapak; (5) potensi sebagai magnet kegiatan; dan (6) kesesuaian dengan rencana tata ruang.

3. Fungsi Baru yang Diusulkan

Hasil analisis menunjukkan fungsi baru yang paling sesuai di antara empat alternatif fungsi yang diusulkan, adalah fungsi untuk pusat grosir. Dengan demikian fungsi baru yang diusulkan adalah pusat grosir. Pertimbangan lainnya adalah :

- Gresik belum memiliki pusat grosir.
- Selama ini masyarakat Gresik harus ke Surabaya jika membeli barang dalam jumlah besar (kulakan).
- Pusat grosir di lokasi bekas Terminal Bus Bunder tidak hanya melayani masyarakat Gresik, tetapi juga masyarakat Lamongan dan Kawasan Gresik Selatan.

Karena di dalam lokasi tapak terdapat kios-kios tempat penjualan makanan dan tempat penjualan tiket yang bangunannya bisa dimanfaatkan kembali, maka diusulkan fungsi baru di dalam tapak segitiga terminal adalah :

- Pusat grosir yang digunakan untuk menjual barang-barang dalam partai besar. Dalam hal ini pusat grosir tidak digunakan untuk menjual barang-barang secara eceran, dengan maksud untuk mengurangi intensitas kendaraan yang masuk keluar blok segitiga pusat grosir terutama sepeda motor, karena sangat membahayakan keselamatan pengendara, mengingat lokasinya berada di jalan arteri primer yang dilewati kendaraan besar.

Selain untuk pusat penjualan barang-barang dalam partai besar, secara periodik pusat grosir digunakan untuk tempat pameran produk industri Gresik, pameran otomotif (mobil dan sepeda motor), dan pameran lain yang berkaitan dengan pengembangan bisnis.

- Pusat penjualan makanan khas Gresik dengan memanfaatkan bangunan-bangunan yang sudah ada.
- Terminal angkutan kota dan angkutan perdesaan, dengan memanfaatkan bangunan dan fasilitas yang sudah ada.

Berkaitan dengan pemindahan terminal bus ke Duduk Sampeyan, lahan bekas terminal bus dan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik digunakan untuk pengembangan pusat grosir. Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik diusulkan untuk dipindahkan ke Duduk Sampeyan, menjadi satu kompleks dengan terminal bus, terminal kargo dan stasiun kereta api; agar pelayanannya lebih optimal.

Gambar 7.7. Kedudukan Wilayah Perencanaan pada Lingkup Kabupaten Gresik.

Sumber : Laporan Pendahuluan Penyusunan RTBL Kawasan Bunder; 2011.

7.6.2.1. Zoning

Zona kegiatan yang direncanakan di wilayah perencanaan mencakup kegiatan di dalam blok segitiga terminal dan kegiatan di sisi Utara Jl. Raya Ambeng-ambeng.

1. Blok Segitiga Terminal

Penentuan zoning untuk mendapatkan pemanfaatan ruang yang optimal di dalam tapak, dilakukan melalui analisis masing-masing alternatif terhadap kriteria yang ditetapkan atau dasar pertimbangan yang digunakan.

▪ Alternatif Zoning

Ada dua alternatif pengaturan zoning di dalam blok segitiga terminal, yaitu :

- Alternatif pertama :

Menempatkan zona makanan khas di bagian Utara, zona pusat grosir di bagian Tengah dan zona terminal di bagian Selatan.

- Alternatif kedua :

Menempatkan zona pusat grosir di bagian Utara, zona makanan khas di bagian Tengah, dan zona terminal di bagian Selatan.

▪ Dasar Pertimbangan

Pertimbangan yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis zoning adalah : (1) pemanfaatan aset; (2) pencapaian dari main entrance; (3) keseimbangan komposisi bangunan; dan (4) pemanfaatan vegetasi yang sudah ada.

▪ Usulan Rencana Zoning

Berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa alternatif yang lebih menguntungkan adalah alternatif pertama (nilai 19), yaitu menempatkan zona makanan khas di bagian Utara, zona pusat grosir di bagian Tengah, dan zona terminal di bagian Selatan.

2. Blok di Sisi Utara Jl. Raya Ambeng-ambeng

Zona penggunaan pada blok di sebelah Utara Jl. Raya Ambeng-ambeng direncanakan berdasarkan arahan rencana tata ruang dan kecenderungan perkembangan di lapangan. Penentuannya dipertimbangkan terhadap kondisi faktual, arahan rencana tata ruang, dan kecenderungan perkembangan di lapangan.

▪ Kondisi Faktual

Jenis penggunaan lahan di sepanjang periferi Jl. Raya Ambeng-ambeng adalah perdagangan, jasa, perumahan dan lahan belum terbangun. Di wilayah belakang pada saat ini sedang dibangun perumahan Grand Verona Regency.

▪ Dasar Pertimbangan

- RDTR dan Zoning regulation Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas merencanakan periferi Jl. Wahidin Sudirohusodo untuk perdagangan dan jasa berlingkup regional.

- Kecenderungan perkembangan di lapangan menunjukkan periferi Jl. Raya Ambeng-ambeng tumbuh menjadi kegiatan komersial berskala lokal. Sedangkan wilayah belakangnya tumbuh menjadi perumahan (Grand Verona Regency).
- Usulan Rencana Zoning
Bagian periferi diarahkan untuk perdagangan dan jasa berskala regional, sedangkan bagian belakang diarahkan untuk perumahan.

Gambar 7.8. Zona Penggunaan Lahan Blok Segitiga Pusat Grosir.

Sumber : Laporan Pendahuluan Penyusunan RTBL Kawasan Bunder; 2011.

Gambar 7.9. Zona Penggunaan Lahan Wilayah Perencanaan.

Sumber : Laporan Pendahuluan Penyusunan RTBL Kawasan Bunder; 2011.

7.6.2.2. Tinjauan Eksternal

Pengaruh eksternal terhadap rencana pengembangan wilayah perencanaan sebagai pusat grosir yang dilengkapi pusat makanan khas dan terminal angkutan kota, adalah :

1. Lingkup Lingkungan Sekitar Wilayah Perencanaan

- Sebelah Timur :
Di seberang Timur wilayah perencanaan terdapat Waduk Banjaranyar yang rencananya akan difungsikan juga untuk wisata pemancingan dengan membuat bangunan-bangunan yang bisa dibongkar pasang (*knock down*). Selain itu ada tradisi panen raya ikan yang dilakukan warga secara periodik setiap tahun.
Pengaruh pengembangan Waduk Banjaranyar terhadap wilayah perencanaan adalah :
 - Menghidupkan terminal angkutan kota dan perdesaan
Pengunjung wisata Waduk Banjaranyar yang menggunakan kendaraan angkutan umum membutuhkan terminal untuk tempat naik dan turunnya penumpang. Kondisi ini merupakan potensi yang diperkirakan mampu menghidupkan terminal, dengan syarat angkutan umum tidak menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal. Untuk memudahkan pergerakan pengunjung dari Waduk Banjaranyar ke terminal atau sebaliknya, dibutuhkan jalur pejalan kaki yang aman dan nyaman dilewati.
- Sebelah Barat :
Di seberang Barat wilayah perencanaan terdapat lahan kosong yang sudah dikuasai pengembang, dan rencananya akan dibangun untuk ruko,

rukan dan perumahan. Pengaruhnya terhadap wilayah perencanaan adalah :

- Warga yang bertempat tinggal di kompleks perumahan yang rencananya akan dikembangkan di seberang Barat wilayah perencanaan, diuntungkan oleh keberadaan pusat grosir.
- Ruko yang akan dibangun pengembang akan bersaing dengan pusat grosir, kecuali membuka usaha yang bidangnya berbeda.

Untuk memudahkan sirkulasi pengunjung dibutuhkan jalan akses yang tidak mengganggu jalan arteri primer, antara lain dengan membuat overpass atau underpass.

▪ Sebelah Utara :

Di sebelah Utara Jalan Raya Ambeng-ambeng terdapat lokasi perumahan Grand Verona Regency. Lahan kosong di sebelah Utara dan sebelah Selatan tapak perumahan Grand Verona Regency direncanakan untuk perluasan perumahan. Pengaruh keberadaan perumahan Grand Verona Regency adalah :

- Warga perumahan diuntungkan oleh pusat grosir karena lokasinya dekat.
- Sirkulasi masuk keluar perumahan akan membebani jalan arteri primer dan berpotensi menimbulkan hambatan lalu lintas.
- Kegiatan perdagangan di sisi Utara Jl. Raya Ambeng-ambeng juga tidak dirugikan jika mereka menjual barang yang tidak sama dengan barang yang dijual di pusat grosir.

▪ Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo :

- Di Jl. Wahidin Sudirohusodo sebelah Timur perempatan, akan dibangun gapura sebagai penanda gerbang masuk Kota Gresik dari arah Barat. Gerbang direncanakan mengadopsi bentuk Gapura Giri dengan ketinggian setidaknya tidak kurang dari tinggi gapura Kota Tuban. Pengaruhnya terhadap wilayah perencanaan adalah :

Keberadaan gapura menjadi penanda batas Kota Gresik sekaligus bisa dimanfaatkan sebagai penanda lokasi wilayah perencanaan dari arah kota (dari arah Timur). Untuk mengintegrasikan keberadaan gapura dan pusat grosir, direncanakan membuat ikon pusat grosir yang mengadopsi bentuk gapura batas kota.

- Terminal bayangan dan tempat ngetem angkutan kota dan bus yang menempati berm dan trotoar, dirancang menjadi tempat tanaman atau pot-pot tanaman permanen yang tidak bisa digunakan untuk tempat tunggu penumpang dan tempat menaikkan serta menurunkan penumpang. Dengan demikian terminal bayangan akan hilang dengan sendirinya.

2. Lingkup Kota dan Regional

▪ Rencana jalan tol :

Di sebelah Utara wilayah perencanaan direncanakan jalan tol Gresik-Lamongan yang menyambung dengan jalan tol Surabaya-Bunder dengan

posisi sejajar jalan arteri primer. Pengaruhnya terhadap wilayah perencanaan adalah :

- Keberadaan jalan tol Gresik-Lamongan akan mengurangi peluang pengunjung dari arah Timur yang lewat jalan tol, karena lokasi wilayah perencanaan akan terlewati oleh pengguna jalan tol Surabaya-Gresik dan Gresik-Lamongan. Wilayah perencanaan hanya akan dilewati oleh pengguna jalan tol Surabaya-Gresik yang keluar lewat pintu tol Bunder.
- Jalan arteri primer Lingkar Barat :
Di sebelah Selatan wilayah perencanaan, direncanakan jalan arteri primer kelanjutan dari jalan arteri primer Jl. Mayjen Sungkono yang menyambung dengan Jl. Raya Banjarsari dan Jl. Raya Ambeng-ambeng. Pengaruhnya pada wilayah perencanaan adalah :
 - Wilayah perencanaan dilewati oleh rencana Jalan Lingkar Barat yang lewat Jl. Raya Banjarsari. Rencana ini akan memudahkan pengunjung yang menggunakan angkutan umum. Untuk menampung penumpang yang turun perlu disediakan halte yang dilengkapi frontage road.
- Pengunjung dari Lamongan dan Gresik Selatan :
Posisi wilayah perencanaan mudah diakses dari poros jalan arteri primer Gresik-Lamongan dan Kota Gresik ke Kawasan Gresik Selatan. Dengan demikian warga Lamongan, Kota Gresik sampai Kawasan Gresik Selatan yang akan menuju lokasi pusat grosir akan mudah mengaksesnya lewat jalan arteri baik dengan menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi.
- Kompetitor
Di Kota Gresik, Lamongan sampai Gresik Selatan, belum tersedia pusat grosir terutama pusat grosir untuk kelompok berpenghasilan menengah. Selama ini warga yang ingin membeli barang dalam jumlah besar tetapi dengan harga yang miring, harus pergi ke pusat grosir di Kota Surabaya. Karena belum ada kompetitor yang sejenis, maka pengembangan pusat grosir di lokasi bekas terminal Bunder berpeluang besar untuk bisa hidup dan berkembang.
- Rencana pembangunan terminal kargo di sebelah Barat wilayah perencanaan :
Pemerintah Kabupaten Gresik saat ini sedang melakukan studi untuk menentukan lokasi terminal kargo yang rencananya akan ditempatkan di sekitar SPBU sebelah Barat wilayah perencanaan. Sementara itu Studi Kelayakan Bappeda merencanakan di Desa Sumari terintegrasi dengan terminal bus dan stasiun KA.
Eksistensi terminal kargo baik di sebelah Barat SPBU maupun di Desa Sumari, akan menguntungkan pusat grosir di wilayah perencanaan karena posisi wilayah perencanaan berada di antara lokasi terminal kargo dan Kota Gresik yang menjadi tujuan utama angkutan terminal kargo. Di samping itu kendaraan angkutan berat yang melewati wilayah

perencanaan menjadi berkurang, karena sudah dialihkan ke moda angkutan barang yang lebih kecil.

Gambar 7.10. Tinjauan Eksternal pada Lingkup Sekitar Wilayah Perencanaan.

Sumber : Laporan Pendahuluan Penyusunan RTBL Kawasan Bunder; 2011.

Gambar 7.11. Tinjauan Eksternal pada Lingkup Kota dan Regional.

Sumber : Laporan Pendahuluan Penyusunan RTBL Kawasan Bunder; 2011.

7.6.3. RTBL Koridor Jl. Pahlawan – Alun-Alun – Jl. Raden Santri – Jl. HOS Cokroaminoto – Jl. Basuki Rahmat

7.6.3.1. Alun-alun Gresik dan Lingkungan Sekitarnya

• Konsep Penataan

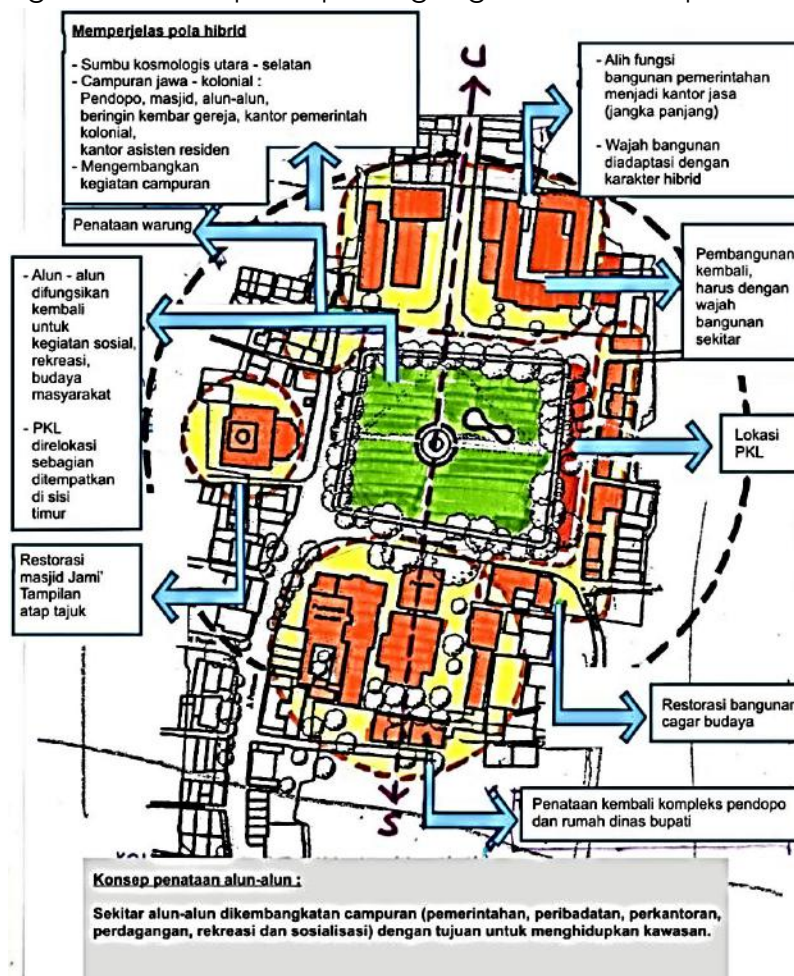
Penataan Kawasan Alun-alun Gresik ditujukan untuk menghidupkan kawasan agar kegiatan pada pagi, siang dan malam hari seimbang. Untuk mencapai tujuan tersebut Kawasan Alun-alun Gresik dikembangkan sebagai kawasan yang mempunyai kegiatan campuran, antara kegiatan pemerintahan, peribadatan, perkantoran, perdagangan, rekreasi dan sosialisasi bagi masyarakat. Rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Ciri utama Alun-alun kota di Jawa adalah pola hybrid yang merupakan campuran antara tatanan kota tradisional Jawa dan Belanda atau disebut juga Kromo-Belanda.

Ciri hybrid Alun-alun Gresik diperjelas melalui :

- a. Penguatan sumbu kosmologis Utara-Selatan yang merupakan poros pendopo-Alun-alun-Jl. Raden Santri-Gardu Suling.
 - b. Campuran pola atau tatanan tradisional Jawa yang terdiri dari pendopo, Alun-alun, beringin kembar, masjid; dengan pola kolonial yang terdiri dari gereja, kantor pemerintah kolonial, kantor dan tempat kediaman Asisten Residen.
 - c. Melestarikan bangunan-bangunan kolonial dan tradisional Jawa yang terdapat di Kawasan Alun-alun.
2. Alun-alun Gresik difungsikan kembali untuk taman bagi kegiatan budaya, sosial dan rekreasi masyarakat Gresik. PKL yang berjualan di dalam halaman Alun-alun direlokasi ke Jl. Noto Prayitno dan dekat Tempat Parkir Bus Makam Maulana Malik Ibrahim di Desa Lumpur. PKL diizinkan berjualan di trotoar sebelah Timur, di luar halaman Alun-alun.

3. Penataan kembali kompleks Pendopo dan Rumah Dinas Bupati Gresik menjadi kompleks yang lebih berkesan terbuka dan merefleksikan kedekatan antara pejabat dan masyarakat. Pada saat ini sedang dilakukan perencanaan kembali kompleks Pendopo dan Rumah Dinas Bupati Gresik.
4. Restorasi bangunan cagar budaya yang terdapat di sekeliling Alun-alun dengan menghilangkan tambahan-tambahan dan mengembalikan ke wajah asal bangunan. Termasuk dalam restorasi ini adalah atap Masjid Jami' yang seharusnya beratap tajuk sesuai dengan bentuk asal atap masjid.
5. Dalam RDTR dan Zoning Regulation Kota Gresik disebutkan bahwa kegiatan pemerintahan secara bertahap dipindahkan ke Bunder. Untuk mengantisipasi hal tersebut, bangunan yang saat ini digunakan untuk Kantor DPRD, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kantor Dinas Sosial, dan Badan Lingkungan Hidup, dalam jangka panjang dipindahkan ke Bunder. Bekas kantor pemerintah tersebut dialihfungsikan untuk perkantoran jasa yang memiliki karakter sama dengan kantor pemerintah. Kedua bangunan tersebut tidak diizinkan untuk dialihfungsikan menjadi kegiatan perdagangan terutama pusat perdagangan, mall atau plaza.



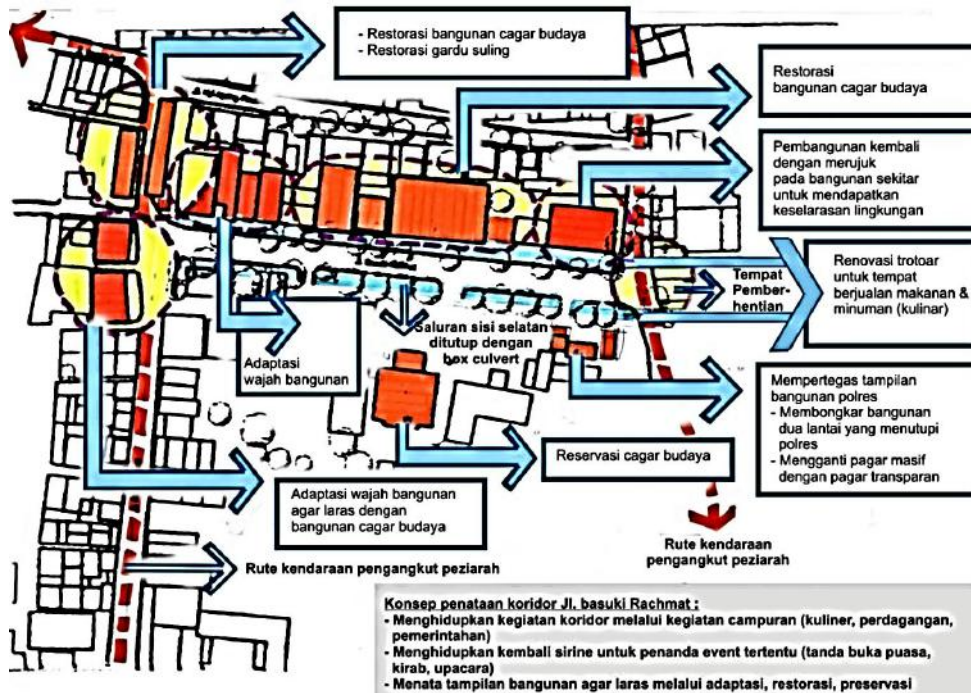
Gambar 7.12. Konsep Penataan Alun-alun

7.6.3.2. Koridor Jl. Basuki Rachmat

• Konsep Penataan

Konsep penataan Koridor Jl. Basuki Rachmat adalah menghidupkan kegiatan koridor melalui kegiatan campuran yang berlangsung pada pagi, siang dan malam hari. Arahannya secara lebih rinci adalah sebagai berikut :

1. Menghidupkan kegiatan campuran yang terdiri dari perdagangan, pemerintahan dan kuliner. Penjualan kuliner harus dilakukan secara periodik, jika dilakukan secara insidental dan sporadis, maka usaha untuk menghidupkan koridor tidak bisa optimal. Kegiatan penjualan kuliner memanfaatkan peziarah ke Makam Maulana Malik Ibrahim yang rutanya melewati Jl. KH. Cholil, dan diarahkan agar mampir membeli makanan dan minuman.
2. Untuk mendukung kegiatan kuliner, di sekitar pertigaan Jl. Basuki Rachmat dan Jl. KH. Cholil dan sekitar pertigaan Jl. Basuki Rachmat-Jl. Raden Santri, disediakan shelter atau semacam halte tempat berhenti sementara kendaraan pengangkut peziarah. Untuk penyediaan tempat berjualan kuliner, saluran di sisi Selatan jalan ditutup dengan box culvert yang diberi lubang bukaan pada setiap jarak 20 meter.
3. Untuk memperkuat karakter koridor sebagai bagian dari Kawasan Kota Lama yang bersejarah dilakukan penataan yang mencakup :
 - a. Mengaktifkan atau menghidupkan kembali sirine Gardu Suling sebagai penanda event tertentu, misalnya tanda berbuka puasa, tanda mulai kirab budaya, tanda mulai upacara di Alun-alun. Selain itu membebaskan Gardu Suling dari kegiatan warung di dalam gardu listrik tersebut.
 - b. Menata kembali tampilan bangunan-bangunan agar laras melalui adaptasi, restorasi, dan preservasi. Dalam hal ini bangunan-bangunan bergaya arsitektur kolonial di sepanjang koridor direstorasi agar kembali ke wajah asalnya. Sedangkan bangunan-bangunan modern harus diadaptasi terhadap karakteristik bangunan cagar budaya. Kaveling yang saat ini sudah kosong karena didemolisi; pembangunannya kembali harus diselaraskan dengan wajah bangunan di sekitarnya melalui persetujuan Tim Cagar Budaya atau semacam Tim Penasehat Arsitektur Kota.
4. Mempertegas tampilan kompleks Polres Gresik dengan cara :
 - a. Membongkar bangunan dua lantai di bagian depan yang menutupi pandangan ke arah bangunan Polres.
 - b. Merubah pagar massif menjadi pagar transparan yang tidak menutupi pandangan ke arah kompleks bangunan Polres.



Gambar 7.13. Konsep penataan Koridor jl. Basuki Rachmat

7.6.3.3. Koridor Nyai Ageng Arem-arem

• Konsep

Konsep utama penataan koridor Jl. Nyai Ageng Arem-arem adalah menghidupkan koridor melalui preservasi bangunan cagar budaya dan meningkatkan aktivitas koridor. Ada dua hal yang harus dilakukan agar pelestarian bangunan cagar budaya bisa menhidupkan kawasan bersangkutan, yaitu :

1. Melestarikan secara fisik bangunan-bangunan cagar budaya melalui perawatan, pemeliharaan, perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi. Upaya pelestarian bangunan cagar budaya yang hampir seluruhnya dimiliki oleh perorangan bukanlah hal yang mudah karena membutuhkan biaya besar. Pelestarian bangunan, lingkungan, dan kawasan cagar budaya tidak bisa dilakukan sendirian oleh pemilik bangunan, tetapi harus didukung semua pihak termasuk Pemerintah Kabupaten Gresik melalui pemberian insentif dalam bentuk fiskal maupun non fiskal. Insentif fiskal antara lain berbentuk pemberian bantuan biaya perawatan bangunan secara rutin, pengurangan PBB. Insentif non fiskal antara lain berbentuk kemudahan pengurusan perizinan, kemudahan pemasangan infrastruktur, pemberian penghargaan, dan lainnya.

2. Pelestarian fisik harus diiringi dengan upaya menghidupkan kawasan melalui berbagai kegiatan periodikal yang diagendakan (misalnya bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, tahunan). Antara lain berupa kegiatan seni, budaya, industri kecil, serta kegiatan lain yang mampu menggerakkan roda perekonomian kawasan.

Beberapa jenis kegiatan yang sudah dilakukan dan dapat diselenggarakan secara periodik dan diagendakan, antara lain adalah:

- a. Kegiatan seni budaya : pencak macan, hadrah jidor, kedundangan, permainan anak- anak.
- b. Pembuatan kuliner khas Gresik, seperti : pudak, nasi krawu, otak-otak bandengbongolan, ayas, ubus, gajih pinggir; serta minuman khas seperti es siwalan, legen, temulawak, wedang pokak dan kopi.
- c. Kerajinan kriya khas Gresik, seperti : seperti damar kurung, songkok, sarung, tikar dan konveksi.

Arahan selanjutnya adalah :

1. Memperjelas eksistensi kawasan cagar budaya di Jl. Nyai Ageng Arem-arem, melalui pembuatan penanda dalam bentuk gerbang yang ditempatkan di pertigaan dengan Jl. KH. Cholil dan pertigaan Jl. Nyai Ageng Pinatih. Saat ini terdapat gerbang yang terletak di mulut Jl. Nyai Ageng Arem-arem Gang III sebagai penanda aglomerasi bangunan cagar budaya dan sekretariat komunitas Mataseger.
2. Memanfaatkan rute kendaraan pengangkut peziarah ke Makam Maulana Malik Ibrahim yang melewati Jl. KH. Cholil untuk singgah ke kawasan ini. Untuk keperluan tersebut perlu disediakan shelter atau tempat pemberhentian di sekitar pertigaan Jl. KH. Kholil dan Jl. Nyai Ageng Arem-arem.



Gambar 7.14. Konsep penataan koridor Jl. Nyai Ageng Arem-arem

7.6.4. RTBL Koridor Jl. Panglima Sudirman, Jl. Jaksa Agung Suprpto, dan Jl. Usman Sadar

7.6.4.1. Konsep Penataan Koridor

Secara konseptual penataan koridor perencanaan ditujukan untuk menciptakan struktur koridor yang memiliki kejelasan fungsinya sebagai *city gate*, *city hall*, dan *city corridor* (Tange; 1985).

Koridor Jl. Panglima Sudirman, Jl. Jaksa Agung Suprpto, dan Jl. Usman Sadar tidak bisa dilihat hanya dalam lingkup koridor itu sendiri. Pada dasarnya koridor tersebut merupakan bagian dari kawasan kota lama yang berpusat di alun-alun Gresik, yang bisa diakses dari arah Selatan, Barat, Utara dan dari arah Timur. Dilihat dalam konteks tersebut, maka posisi koridor perencanaan bisa dijelaskan sebagai berikut :

- *City gate* atau gerbang kawasan kota lama, posisinya berada pada setiap jalan masuk utama menuju alun-alun, yaitu dari arah Selatan (Jl. Veteran), Barat (Jl. Ahmad Yani, Jl. Akim Kayat, dan Jl. Samanhudi), dan arah Utara (Jl. Raden Santri). Di antara akses pencapaian tersebut yang masuk koridor perencanaan adalah akses dari arah Selatan melalui Jl. Panglima Sudirman; dari arah Barat melalui Jl. Jaksa Agung Suprpto, Jl. Akim Kayat dan Jl. Samanhudi.

Wujud *city gate* berupa dua bangunan mengapit Jl. Panglima Sudirman yang lebih tinggi dari bangunan sekitarnya (bangunan menara dengan ketinggian 6 lantai) yang ditempatkan di sebelah Utara persimpangan Jl. Panglima Sudirman-Jl. Kartini-Jl. Veteran-Jl. Dolasim. *City gate* merupakan landmark yang menjadi penanda dan orientasi pengguna jalan yang akan menuju ke kawasan alun-alun.

- Sebagai satu kesatuan yang utuh, jantung kawasan kota lama Gresik adalah alun-alun, yang merupakan pusat kegiatan masyarakat baik secara simbolis maupun praktis. Pada lokasi yang diposisikan sebagai *node* kawasan kota lama ini, dijumpai banyak kegiatan masyarakat yang bersifat formal, tradisional maupun dalam bentuk kegiatan sehari-hari yang banyak dimanfaatkan untuk tempat rekreasi. Oleh karena itu, walaupun berada di luar koridor perencanaan; alun-alun Gresik diposisikan sebagai *city hall*. Jantung kegiatan kota lama lainnya adalah makam Maulana Malik Ibrahim yang banyak dikunjungi masyarakat terutama dari luar Kota Gresik. Alun-alun Kota Gresik dan makam Maulana Malik Ibrahim adalah *city hall* yang menggerakkan kegiatan di kawasan kota lama.
- *City corridor* merupakan penghubung antara *city gate* dan *city hall*, yang diwujudkan dalam bentuk koridor untuk jalur kendaraan dan jalur pejalan kaki yang dilingkupi (*enclosed*) oleh deretan massa bangunan dan pepohonan di kiri kanannya. Koridor yang diposisikan sebagai *city corridor*

adalah Jl. Panglima Sudirman untuk pencapaian dari arah Selatan, dan Jl. Jaksa Agung Suprpto untuk pencapaian dari arah Barat. Wujud *city corridor* Jl. Panglima Sudirman adalah koridor dengan dominasi perdagangan dan jasa retail skala lokal yang menampilkan aglomerasi linier warung-warung kopi. Sedangkan wujud *city corridor* Jl. Jaksa Agung Suprpto, adalah dominasi kantor pemerintah BUMN/BUMD yang berorientasi pelayanan publik, perkantoran dan sekolah, dengan lingkup pelayanan kota dan regional. Perdagangan dan jasa di koridor ini diarahkan pada jenis penggunaan yang mendukung kegiatan perkantoran dan sekolah.

Konsep per-massa-an bangunan di Jl. Panglima Sudirman diarahkan pada komposisi bangunan yang memiliki ketinggian 2-3 lantai, dengan garis langit yang meninggi di bagian Selatan di sekitar lokasi *city gate* dengan ketinggian 6 lantai. Sedangkan per-massa-an di Jl. Jaksa Agung Suprpto diarahkan pada bangunan dengan ketinggian 2-3 lantai, dengan garis langit yang meninggi di bagian tengah pada lokasi perkantoran dengan ketinggian 8 lantai. Per-massa-an bangunan di Jl. Usman Sadar diarahkan dengan ketinggian rata-rata 2-3 lantai.

Karakteristik visual koridor diwujudkan dalam bentuk komposisi massa bangunan yang mengadopsi gaya arsitektur modern dan kontemporer yang menyesuaikan dengan iklim setempat. Kesatuan (*unity*) dan keharmonisan (*harmony*) tatanan bangunan secara sekuensial diciptakan melalui komposisi varian dengan mengadopsi bentuk-bentuk atap yang serupa. Konsep penataan koridor dapat dilihat pada Gambar 5.1.

7.6.4.2. Penggunaan Lahan Makro dan Penggunaan Lahan Mikro

Jenis penggunaan lahan dalam penyusunan RTBL di koridor perencanaan dibagi menjadi penggunaan lahan makro dan penggunaan lahan mikro.

- **Penggunaan Lahan Makro**

Jenis penggunaan lahan makro yang direncanakan di koridor perencanaan adalah perdagangan dan jasa, perkantoran dan pemerintahan, pelayanan umum, perumahan, RTH dan lindung. Rencana penggunaan lahan makro di koridor perencanaan dibagi menjadi tiga segmen, yaitu segmen koridor Jl. Panglima Sudirman, Jl. Jaksa Agung Suprpto, dan segmen koridor Jl. Usman Sadar. Rencana penggunaan pada masing-masing koridor adalah sebagai berikut :

1. Koridor Jl. Panglima Sudirman

- Mengembangkan koridor untuk dominasi penggunaan perdagangan dan jasa skala lokal (lingkungan sampai kota) dan perkantoran skala lokal. Pengembangan perdagangan dan jasa diijinkan bercampur (*mix used*) dengan perkantoran dan pelayanan kesehatan individual (praktek dokter, apotik, pengobatan tradisional, laboratorium). Pengembangan dilakukan melalui perluasann lahan ke wilayah belakang dan ke arah vertikal.

- Merelokasi kantor pemerintah secara bertahap ke kawasan kota baru Bunder. Lokasi bekas kantor pemerintah dialihfungsikan menjadi perkantoran jasa.
- Mempertahankan fasilitas pelayanan umum (sekolah, peribadatan, kesehatan) dan RTH.
- Mempertahankan perumahan regency yang sudah ada (Samada Regency). Pengembangan baru (di wilayah belakang) disyaratkan memiliki jalan akses alternatif yang tidak membebani Jl. Panglima Sudirman.

Gambar 7.15. Konsep Penataan Koridor

2. Koridor Jl. Jaksu Agung Suprpto
 - Merelokasi kantor pemerintah ke kawasan kota baru Bunder. Lokasi bekas perkantoran pemerintah dialihfungsikan menjadi perkantoran (swasta).
 - Mempertahankan kantor lurah di lokasi yang sudah ada; merencanakan penggunaan untuk kantor pemerintah/BUMN/BUMD yang berorientasi pelayanan publik (kantor pelayanan pajak, kantor pos pembantu, kantor Telkom, PLN, PDAM).
 - Mengembangkan perkantoran melalui perluasan ke wilayah belakang dan pembangunan ke arah vertikal.
 - Mengembangkan perdagangan dan jasa yang mendukung perkantoran dan sekolah.
 - Mempertahankan lokasi waduk sebagai zona lindung.
 - Mempertahankan fasilitas pelayanan umum yang sudah ada (sekolah, tempat peribadatan, fasilitas kesehatan).
3. Koridor Jl. Usman Sadar
 - Mengembangkan koridor untuk perdagangan dan jasa berskala lokal dan regional.
 - Mengembangkan perkantoran.
 - Mempertahankan kantor pemerintah yang berorientasi pelayanan publik (Kantor Camat Gresik, Kantor Lurah Sukorame dan Karanturi, Kantor Polisi Resor Gresik) di lokasi yang sudah ada.
 - Mempertahankan fasilitas pelayanan umum yang sudah ada (peribadatan, sekolah).
 - Mempertahankan rusunawa di lokasi yang sudah ada.

Gambar 7.16. Rencana penggunaan lahan makro di koridor perencanaan

6.4.2.1.1. Penggunaan Lahan Mikro

Penggunaan lahan mikro adalah penggunaan lahan yang lebih rinci di dalam kaveling atau blok, yang mencakup penggunaan ruang ke arah vertikal maupun horisontal; baik di dalam maupun di luar bangunan. Kategori jenis penggunaan lahan mikro yang potensial berkembang di koridor perencanaan adalah :

1. Perdagangan dan jasa; terdiri dari penggunaan mikro perdagangan dan jasa.
 - a. Perdagangan terdiri dari :
Pusat perbelanjaan, showroom kendaraan bermotor, toko suku cadang kendaraan, alat pertanian; restoran; toko bahan bangunan, alat rumah tangga, elektronik, kain dan pakaian jadi, perhiasan; galeri dan barang seni; pasar kota; SPBU; warung; toko peracangan, kelontong, barang kebutuhan sehari-hari, mini market; PKL, tempat penjualan tanaman hias, buku dan kuliner.
 - b. Jasa terdiri dari :
Jasa servis (sepeda motor, sepeda, alat elektronik rumah tangga, komputer, arloji); jasa personal (salon kecantikan, pangkas rambut, laundry, rias pengantin, penjahit, studio foto, wartel, persewaan video, persewaan buku dan majalah); jasa pelayanan bisnis (foto kopi, pengurusan surat dan dokumen); biro perjalanan; pengiriman dan pengepakan barang; pelayanan bongkar muat barang; pergudangan; jasa komputasi; periklanan; jasa pengurusan pemakaman; jasa keamanan; jasa keuangan (bank, asuransi, *leasing*, *money changer*); jasa usaha makanan dan minuman; penyiaran radio; tempat penitipan anak; tempat penyewaan kendaraan; pameran ruang terbuka (produk unggulan, kuliner, kendaraan bermotor); jasa hiburan (gedung pertunjukan, gedung serba guna).
2. Perkantoran dan pemerintahan, terdiri dari penggunaan mikro pemerintahan dan perkantoran.
 - a. Perkantoran, terdiri dari :
Kantor bisnis dan profesional (notaris, pengacara, akuntan, konsultan, kontraktor, kantor lembaga profesi); kantor organisasi sosial-politik-kemasyarakatan (kantor partai politik, LSM, yayasan, lembaga independen).
 - b. Pemerintahan; terdiri dari :
Kantor pemerintah yang berorientasi pelayanan publik (kantor camat, kantor lurah, kantor pelayanan pajak, kantor pos, kantor polisi); dan kantor BUMN/BUMD (kantor Telkom, PDAM, PLN).

3. Pelayanan Umum; terdiri dari penggunaan mikro : pendidikan, kesehatan, peribadatan, olah raga, sarana sosial, pelayanan utilitas dan pelayanan transportasi.
 - a. Pendidikan; terdiri dari :
TK/playgroup, SD, SMP, SMU, akademi, universitas, lembaga pendidikan, tempat kursus (bahasa, kecantikan, musik, tari, desain, akuntansi, komputer, mengetik, menjahit, memasak, mengemudi, montir), bimbingan belajar, perpustakaan.
 - b. Kesehatan; terdiri dari
Puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, posyandu, tempat praktek dokter, bidan, poliklinik, apotik, pengobatan tradisional, laboratorium.
 - c. Peribadatan; terdiri dari : masjid, langgar, gereja. Vihara dan pura berada di luar koridor perencanaan.
 - d. Olah raga; terdiri dari : olah raga di dalam ruang tertutup (beladiri, tenis meja, bulu tangkis, futsal).
 - e. Sarana sosial; terdiri dari : balai pertemuan warga.
 - f. Pelayanan utilitas; terdiri dari : TPS, STO dan BTS.
 - g. Pelayanan transportasi; terdiri dari : lapangan parkir dan bangunan parkir.
4. Ruang Terbuka Hijau; terdiri dari :
 - a. RTH Binaan, yang meliputi : taman kota, rekreasi kota, sabuk hijau, tempat penjualan bunga.
 - b. RTH Tata Air, yang meliputi : : tepi saluran, tepi waduk.
 - c. RTH prasarana jalan dan jalan kereta api : yang meliputi : median, berm, pulau jalan dan sempadan kereta api.
5. Perumahan, terdiri dari :
 - a. Perumahan formal berpola regency.
 - b. Perumahanm susun (rusunawa).

Rencana penggunaan lahan mikro pada masing-masing koridor adalah sebagai berikut:

1. Koridor Jl. Panglima Sudirman
 - Mengembangkan penggunaan dengan dominasi perdagangan dan jasa, yang diijinkan bercampur dengan perkantoran dan pelayanan kesehatan yang bersifat individu (praktek dokter, pengobatan tradisional, laboratorium, apotok). Pengertian campuran adalah :
 - dalam satu bangunan terdapat lebih dari satu macam penggunaan;
 - dalam satu kaveling terdapat lebih dari satu macam penggunaan;
 - dalam satu blok terdapat lebih dari satu macam penggunaan;baik secara horisontal maupun vertikal; dengan syarat penggunaan yang dicampur adalah jenis penggunaan yang tidak menimbulkan konflik dan saling mendukung. Jenis penggunaan lahan mikro yang direncanakan terdiri dari :
 - Perdagangan :

Pusat perbelanjaan, showroom kendaraan bermotor, toko suku cadang kendaraan; restoran; toko bahan bangunan, alat rumah tangga, elektronik, kain dan pakaian jadi, perhiasan; galeri dan barang seni; warung; toko peracangan, kelontong, barang kebutuhan sehari-hari, mini market; tempat penjualan tanaman hias.

- Jasa :

Jasa servis (sepeda motor, sepeda, alat elektronik rumah tangga, komputer, arloji); jasa personal (salon kecantikan, pangkas rambut, *laundry*, rias pengantin, penjahit, studio foto, wartel, persewaan video, persewaan buku dan majalah); jasa pelayanan bisnis (foto kopi, pengurusan surat dan dokumen); biro perjalanan; pengiriman dan pengepakan barang; pelayanan bongkar muat barang; pergudangan; jasa komputasi; periklanan; jasa pengurusan pemakaman; jasa keamanan; jasa keuangan (bank, asuransi, *leasing*, *money changer*); jasa usaha makanan dan minuman.

- Perkantoran :

Kantor bisnis dan profesional (notaris, pengacara, akuntan, konsultan, kontraktor, kantor lembaga profesi); kantor organisasi sosial-politik-kemasyarakatan (kantor partai politik, LSM, yayasan, lembaga independen).

Ciri yang ditonjolkan adalah perdagangan dan jasa retail kebutuhan sekunder, warung kopi, dan perkantoran berskala lokal.

- Mempertahankan fasilitas pendidikan, masjid dan gereja di lokasi yang sudah ada.
- Mengembangkan fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi : tempat praktek dokter individu maupun bersama, praktek bidan, pengobatan tradisional, apotik, laboratorium diagnostik, klinik.
- Mengembangkan jalur hijau di sepanjang lintasan rel kereta api yang menuju kawasan Petrokimia, sebagai jalur hijau pengaman rel kereta api dan tempat penjualan tanaman hias.
- Mempertahankan perumahan regency di lokasi yang sudah ada. Pengembangan perumahan regency baru di wilayah belakang disyaratkan memiliki jalan akses alternatif yang tidak membebani Jl. Panglima Sudirman.

2. Koridor Jl. Jaksa Agung Suprpto

- Mengembangkan koridor di bagian Tengah dan Timur untuk perkantoran berskala lokal dan regional. Di dalam bangunan, kaveling dan blok perkantoran diijinkan penggunaan campuran dengan jasa pelayanan bisnis dan keuangan.

Jenis penggunaan lahan mikro yang direncanakan terdiri dari :

- Perkantoran :

Kantor bisnis dan profesional (notaris, pengacara, akuntan, konsultan, kontraktor, kantor lembaga profesi); kantor organisasi sosial-politik-

kemasyarakatan (kantor partai politik, LSM, yayasan, lembaga independen).

- Jasa pelayanan bisnis dan keuangan :

Jasa jasa pelayanan bisnis (foto kopi, pengurusan surat dan dokumen); biro perjalanan; pengiriman dan pengepakan barang; pelayanan bongkar muat barang; pergudangan; jasa komputasi; periklanan; jasa pengurusan pemakaman; jasa keamanan; jasa keuangan (bank, asuransi, *leasing*, *money changer*).

- Mengembangkan kegiatan jasa pelayanan personal, pelayanan bisnis, jasa usaha makanan dan minuman; tempat penyewaan kendaraan; pameran ruang terbuka (produk unggulan, kuliner, kendaraan bermotor).
- Mengembangkan koridor bagian Barat untuk campuran perdagangan dan jasa berskala lingkungan dan lokal yang mendukung perkantoran : toko komputer, alat tulis, buku, elektronik; toko kain dan pakaian jadi, galeri dan barang seni; warung; toko swalayan, mini market; SPBU.
- Mempertahankan fasilitas pendidikan : playgroup, SD, SMP di lokasi yang sudah ada.
- Mengembangkan kantor pemerintah dan BUMN yang berorientasi pelayanan publik, seperti : kantor lurah, kantor pelayanan pajak, kantor pos pembantu, kantor PLN, PDAM, Telkom.
- Mempertahankan fasilitas peribadatan yang sudah ada (masjid dan langgar).
- Mengembangkan waduk Tlogodendo untuk fungsi ekologi sebagai penampung air. Sebagian lokasi dimanfaatkan untuk tempat rekreasi dan tempat berjualan PKL.
- Mempertahankan jalur hijau taman bermain anak di depan waduk dan taman hias di persimpangan Jl. Jaksa Agung Suprpto-Jl. Panglima Sudirman.

3. Koridor Jl. Usman Sadar

- Mengembangkan penggunaan campuran perdagangan, jasa, dan perkantoran, skala lokal dan regional. Jenis penggunaan lahan mikro yang direncanakan terdiri dari :
 - Perdagangan :
Pusat perbelanjaan, showroom kendaraan bermotor, toko suku cadang kendaraan, alat pertanian; restoran; toko bahan bangunan, alat rumah tangga, elektronik, kain dan pakaian jadi, perhiasan, buku; warung; toko perancangan, kelontong, barang kebutuhan sehari-hari, swalayan; mini market.
 - Jasa :
Jasa servis (sepeda motor, sepeda, alat elektronik rumah tangga, komputer, arloji); jasa personal (salon kecantikan, pangkas rambut, *laundry*, rias pengantin, penjahit, studio foto, wartel, persewaan video, persewaan buku dan majalah); jasa pelayanan bisnis (foto kopi, pengurusan surat dan dokumen); biro perjalanan; pengiriman dan

- pengepakan barang; pelayanan bongkar muat barang; pergudangan; jasa komputasi; periklanan; jasa pengurusan pemakaman; jasa keamanan; jasa keuangan (bank, asuransi, *leasing*, *money changer*); jasa usaha makanan dan minuman; tempat penyewaan kendaraan.
- Perkantoran :
Kantor bisnis dan profesional (notaris, pengacara, akuntan, konsultan, kontraktor, kantor lembaga profesi); kantor organisasi sosial-politik-kemasyarakatan (kantor partai politik, LSM, yayasan, lembaga independen).
 - Mempertahankan perkantoran pemerintah yang berorientasi pelayanan publik di lokasi yang sudah ada (Kantor Camat Gresik, Kantor Lurah Sukorame dan Karangturi, Kantor Polisi Resor Gresik).
 - Mempertahankan SD, SMP, dan langgar, di lokasi yang sudah ada.
 - Mempertahankan rumah susun sewa di wilayah belakang yang suda ada.

Gambar 7.17. Rencana penggunaan lahan mikro di koridor perencanaan (A)

Gambar 7.18. Rencana penggunaan lahan mikro di koridor perencanaan (B)

7.6.4.3. Identitas Lingkungan

Identitas lingkungan dibentuk melalui tiga tahapan, yaitu : *pertama*; penelusuran identitas melalui sejarah dan potensi; *kedua*, identifikasi unsur-unsur lingkungan untuk mencitrakan jatidiri lingkungan; dan *ketiga*, menciptakan wujud identitas yang bisa ditangkap secara inderawi dan mudah dikenali oleh masyarakat.

1. Penelusuran identitas melalui sejarah menunjukkan bahwa:

- Kawasan kota lama Gresik mempunyai tradisi dan budaya yang telah berlangsung lama seperti pasar bandeng kawak, maleman di bulan puasa, ziarah ke makam wali, festival makanan khas. Selain itu muncul tradisi menyelenggarakan gelar pawai budaya dan kesenian dalam rangka ulang tahun kota Gresik; rekreasi di alun-alun pada malam Minggu dan hari libur lainnya; dan kebiasaan yang telah menjadi tradisi, yaitu cangkrukan di warung kopi yang dilakukan setiap hari oleh warga (umumnya laki-laki). Tradisi dan kebiasaan di kawasan kota lama tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kegiatan dan pemanfaatan ruang di koridor perencanaan. Pengaruhnya antara lain adalah meningkatnya intensitas kendaraan yang melewati koridor terutama Jl. Panglima Sudirman oleh pengunjung yang menuju alun-alun, makam Maulana Malik Ibrahim, dilewati rute pawai budaya, dan munculnya warung kopi yang menghidupkan koridor.
- Walaupun koridor perencanaan berada di kawasan pusat kota lama Gresik, tetapi tidak dijumpai peninggalan bangunan yang memiliki nilai kesejarahan; keunikan, keluarbiasaan, maupun kekhasan gaya arsitektur bangunannya, yang dikategorikan sebagai *urban heritage*. Lokasinya yang berada di antara kawasan pusat kota lama di sekitar alun-alun dan kawasan di bagian Selatan kota Gresik, menjadikannya sebagai koridor transisi antara kawasan pusat kota lama dan kawasan pinggiran kota. Sebagai kawasan transisi, wujud dan tampilan bangunannya bisa mengombinasikan gaya arsitektur bangunan di kawasan kota lama dengan gaya arsitektur modern dan kontemporer.

2. Penelusuran potensi lingkungan yang mencerminkan ciri khas masing-masing koridor menunjukkan :

- Koridor Jl. Panglima Sudirman :

Ditinjau dari dominasi dan kecenderungan penggunaannya, karakteristik yang menonjol adalah campuran perdagangan dan jasa berskala lingkungan sampai kota. Karakteristiknya yang lebih spesifik adalah kegiatan perdagangan retail barang-barang kebutuhan sekunder; perkantoran yang bergerak dalam bidang jasa keuangan; dan pelayanan kesehatan.

- Koridor Jl. Jaksa Agung Suprpto :

Karakteristik koridor di bagian Tengah dan Timur adalah perkantoran yang bergerak dalam bidang keuangan, konsultan, kantor dagang, lembaga

sosial dan politik, BUMN/BUMD. Identitas lainnya adalah tempat bermain anak-anak dan waduk untuk fungsi ekologi dan rekreasi.

- Koridor Jl. Usman Sadar :

Identitasnya adalah kegiatan campuran perdagangan dan jasa berskala lokal sampai regional; dengan ciri : perdagangan barang-barang kebutuhan sekunder.

3. Dengan menggunakan teori Lynch, unsur-unsur lingkungan di koridor perencanaan yang diidentifikasi dan potensial dikembangkan adalah *landmark*, *nodes*, dan *path*.

- *Landmark* adalah struktur visual yang digunakan sebagai titik orientasi suatu lingkungan; karena skalanya yang mendominasi lingkungan sekitarnya, keunikan yang sudah dikenal baik oleh masyarakat, atau karena posisinya yang strategis terhadap lingkungannya.
- *Nodes* adalah simpul-simpul kegiatan lingkungan yang khas, yang dititikberatkan pada rutinitas kegiatannya setiap hari, bukan oleh kegiatan yang bersifat sementara atau insidental.
- *Path* adalah jalur sirkulasi yang digunakan masyarakat untuk menuju atau meninggalkan suatu tempat dengan menggunakan kendaraan maupun berjalan kaki.

Sebagai pembentuk identitas lingkungan, unsur-unsur tersebut harus memiliki ciri yang khas, mudah diingat dan dikenali, dan tidak dimiliki oleh daerah lain. Ke-khas-an unsur lingkungan tersebut digali dari potensi setempat yang sudah ada atau dikenal warga.

- a. *Landmark*; lokasi yang potensial untuk menempatkan landmark adalah :
 - Ujung Selatan Jl. Panglima Sudirman di sekitar persimpangan dengan Jl. Kartini-Jl. Veteran-Jl. Dulasim; sebagai penanda memasuki kawasan alun-alun Kota Gresik dari arah Selatan.
 - Koridor Jl. Jaksa Agung Suprpto bagian Tengah; sebagai penanda node perkantoran.

- b. *Nodes*

Lokasi yang dikembangkan adalah :

- Kegiatan perdagangan di koridor Jl. Usman Sadar, sebagai titik-titik kegiatan yang berlangsung rutin sepanjang hari. Potensi yang dikembangkan adalah *nodes* dengan karakter campuran perdagangan dan jasa skala kota sampai regional yang menjadi simpul dan aglomerasi penjualan barang-barang kebutuhan sekunder.
- Aglomerasi perkantoran di Jl. Jaksa Agung Suprpto serta perdagangan dan jasa yang mendukung kegiatan perkantoran.
- Aglomerasi linier kegiatan campuran perdagangan dan jasa retail barang kebutuhan sekunder, perkantoran yang bergerak dalam bidang pelayanan bisnis dan keuangan, di Jl. Panglima Sudirman.
 - *Nodes* untuk kegiatan cangkruk-an warung kopi di Jl. Panglima Sudirman-Jl. Jaksa Agung Suprpto sebelah Barat-Jl. Usman Sadar.

- Tempat bermain anak-anak di depan waduk dan tempat rekreasi di sebagian waduk Tlogodendo.

c. *Path*

Bagian koridor yang potensial dikembangkan adalah penataan trotoar beserta fasilitas pendukungnya sebagai upaya untuk menciptakan identitas jalan yang khas.

4. Wujud Identitas yang direncanakan sebagai upaya untuk menciptakan koridor yang berjatidiri adalah :

a. *Landmark*; wujudnya berupa :

- Sepasang bangunan menara dengan ketinggian 6 lantai (lebih tinggi dari bangunan sekitarnya) di kanan kiri mengapit koridor, yang ditempatkan di ujung Selatan Jl. Panglima Sudirman sekitar persimpangan Jl. Kartini-Jl. Veteran-Jl. Dulasim. Landmark tersebut difungsikan sebagai titik orientasi, gerbang dan penanda memasuki kawasan alun-alun dari arah Selatan.
- Bangunan menara setinggi 8 lantai di Jl. Jaksa Agung Suprpto bagian Tengah sebagai titik orientasi dan penanda *nodes* perkantoran.

b. *Node*, wujudnya berupa :

- Aglomerasi kegiatan campuran perdagangan dan jasa retail, serta perkantoran berskala lokal; dengan kekhasan perdagangan dan jasa kebutuhan sekunder dan perkantoran yang bergerak di bidang pelayanan bisnis dan keuangan; di Jl. Panglima Sudirman.
- Aglomerasi kegiatan perkantoran, jasa dan perdagangan yang mendukung perkantoran; taman bermain anak dan waduk untuk fungsi lindung.
- Aglomerasi kegiatan campuran perdagangan dan jasa berskala kota sampai regional dengan spesifikasi pusat penjualan barang-barang kebutuhan sekunder di Jl. Usman Sadar.
- Aglomerasi linier warung kopi yang ditempatkan di antara kegiatan perdagangan, jasa dan perkantoran untuk menghidupkan kegiatan di sepanjang koridor.

c. *Path*

Path di koridor perencanaan wujudnya berupa jalur pedestrian atau trotoar yang ramah dan nyaman bagi pejalan kaki; elevasi rata, lebar mencukupi, berada di bawah keteduhan, tidak mengganggu aktivitas lain (PKL, parkir kendaraan, tiang listrik atau tempepon, tiang reklame), dan estetis.

Landmark, *nodes* dan *path* di koridor perencanaan merupakan unsur-unsur lingkungan yang tidak dapat dilihat secara terpisah, tetapi harus dilihat secara menyeluruh sebagai suatu kesinambungan yang saling mendukung antara satu dan lainnya.

Gambar 7.19. Konsep Penataan Identitas Lingkungan

7.7. ARAHAN STRATEGI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN (SPPIP) KABUPATEN GRESIK

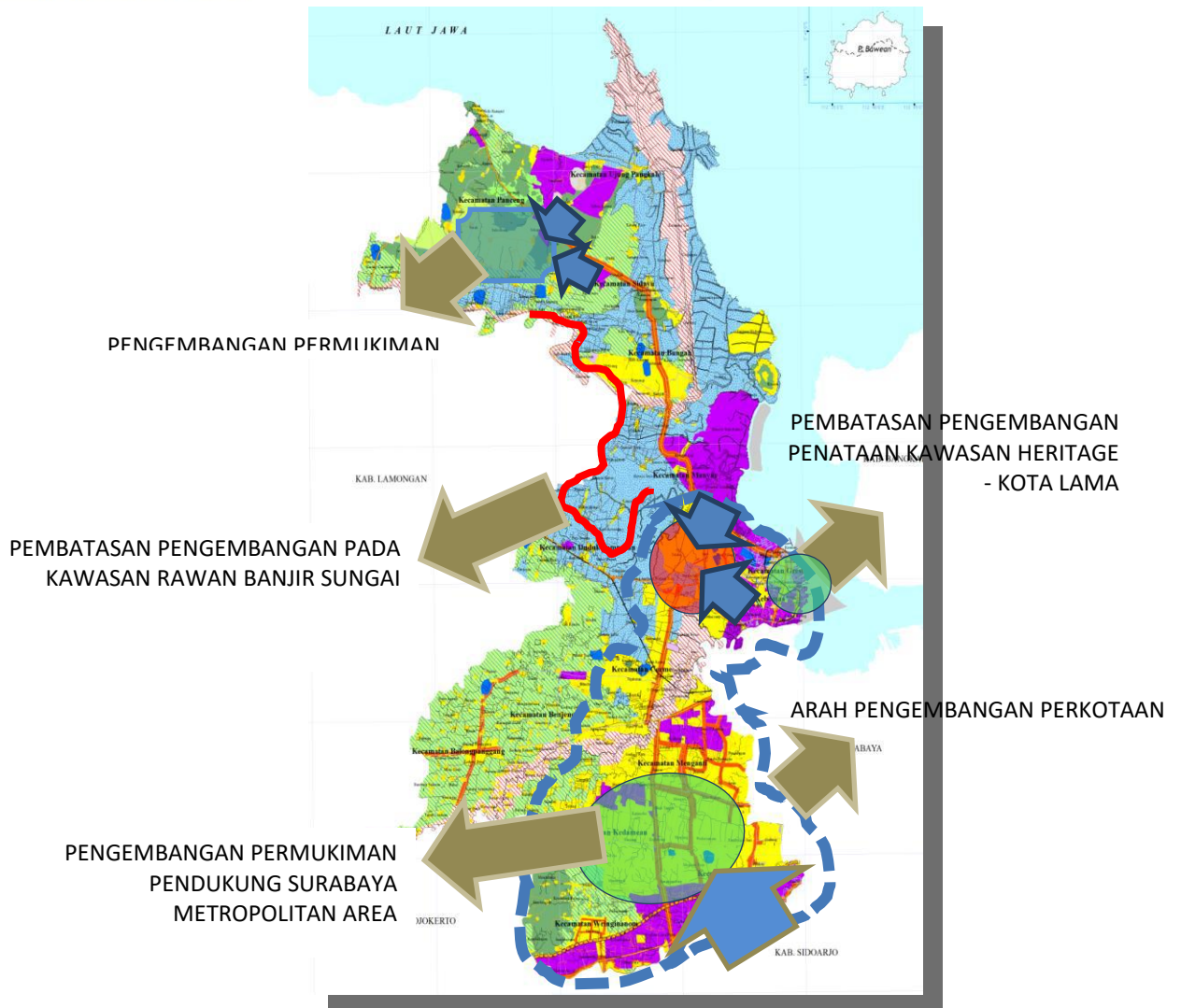
7.7.1. DASAR PERUMUSAN STRATEGI

Rumusan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan di Kabupaten Gresik didasarkan pada kondisi, permasalahan serta peluang pengembangan yang selanjutnya dirumuskan dalam konsepsi dan arahan pengembangan wilayah berikut:

- Pengembangan permukiman pendukung agropolitan dan minapolitan di wilayah bagian utara yaitu di Kecamatan Panceng, Ujungpangkah, Kecamatan Sidayu, Bungah, dan Dukun
- Pembatasan pengembangan permukiman pada kawasan rawan bencana banjir sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong
- Pembatasan pengembangan dan revitalisasi kawasan pusat kota lama di Kecamatan Gresik dan Kebomas
- Pengembangan permukiman pendukung Surabaya Metropolitan Area pada wilayah bagian selatan yaitu di : kecamatan Driyorejo, Kedamean, Menganti dan Cerme

Strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan di Kabupaten Gresik merupakan penjabaran kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan di Kabupaten Gresik ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan mempunyai kaitan logis dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan bersifat jelas, realistis serta dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan secara efisien dan efektif.

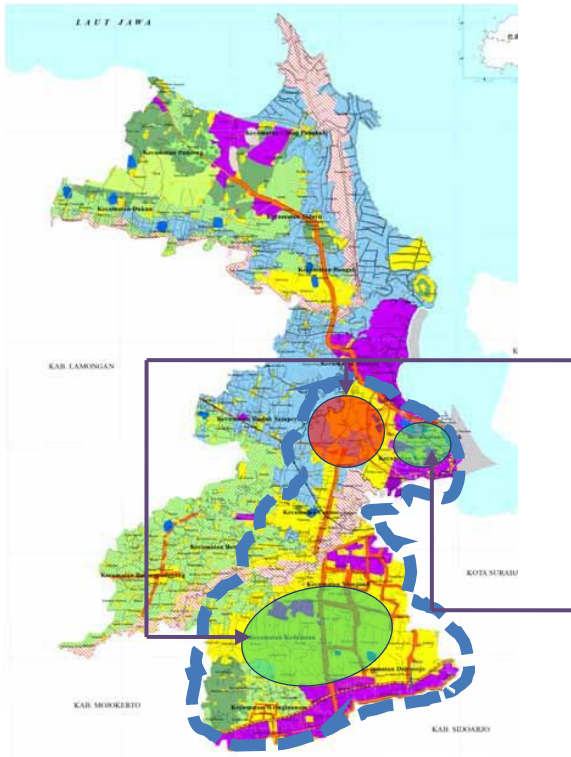
Dalam implementasinya, strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan di Kabupaten Gresik dapat dibedakan menjadi dua hal; pertama strategi skala kabupaten, merupakan strategi yang bersifat makro pada level kabuapten; kedua strategi skala kawasan, merupakan strategi yang lebih spesifik dan berlaku bagi kawasan-kawasan permukiman prioritas dalam upaya mengatasi persoalan spesifik pada setiap kawasan permukiman prioritas di Kabupaten Gresik sebagaimana telah ditetapkan pada bagian terdahulu.



Gambar 5. 2 *Konsepsi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur perkotaan di wilayah Kabupaten Gresik*

7.7.2. Strategi Pembangunan Permukiman Dan Infrastruktur Perkotaan Di Kabupaten Gresik

Strategi untuk mewujudkan keenam kebijakan dasar pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan di Kabupaten Gresik dirumuskan sebagai berikut:



KEBIJAKAN 1

Menyediakan perumahan yang layak huni sesuai standar pelayanan minimal bagi perumahan rakyat

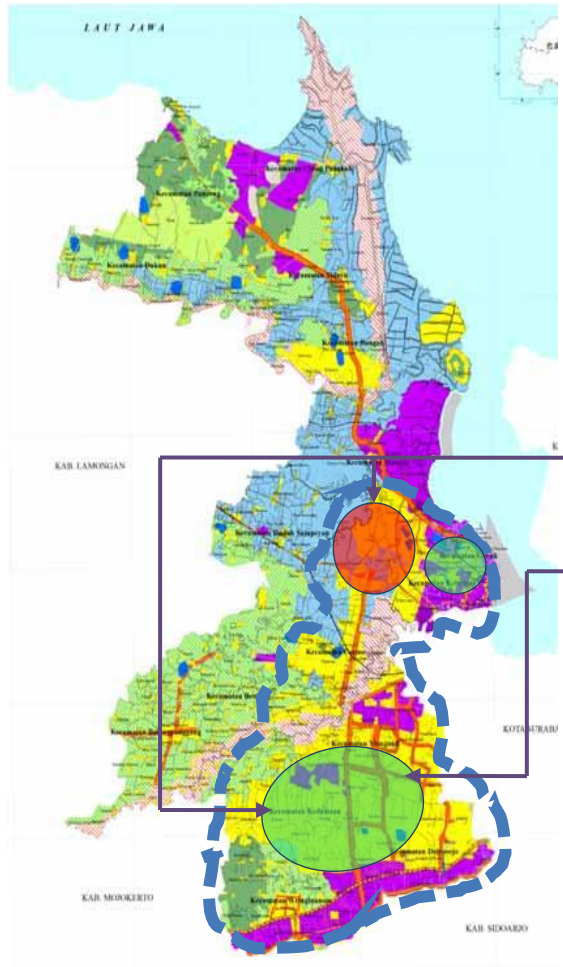
STRATEGI

- Menyiapkan Lahan untuk pembangunan fasilitas perumahan yang memenuhi SPM bidang perumahan
- Menyediakan prasarana lingkungan yang memadai sesuai SPM bidang perumahan di setiap kawasan permukiman yang dibangun
- Memberikan fasilitasi bagi perbaikan bangunan rumah dan lingkungan bagi masyarakat menengah kebawah

Gambar 7.20. Strategi Kebijakan 1 Pengembangan Kawasan Permukiman

Strategi untuk mewujudkan kebijakan 1 Menyediakan perumahan yang layak huni sesuai standar pelayanan minimal bagi perumahan rakyat:

- Menyiapkan Lahan untuk pembangunan fasilitas perumahan yang memenuhi SPM bidang perumahan;
- Menyediakan prasarana lingkungan yang memadai sesuai SPM bidang perumahan di setiap kawasan permukiman yang dibangun; dan
- Memberikan fasilitasi bagi perbaikan bangunan rumah dan lingkungan bagi masyarakat menengah kebawah.



KEBIJAKAN 2

Mendorong pengembangan kawasan permukiman yang mendukung pengembangan kawasan perkotaan dan industri

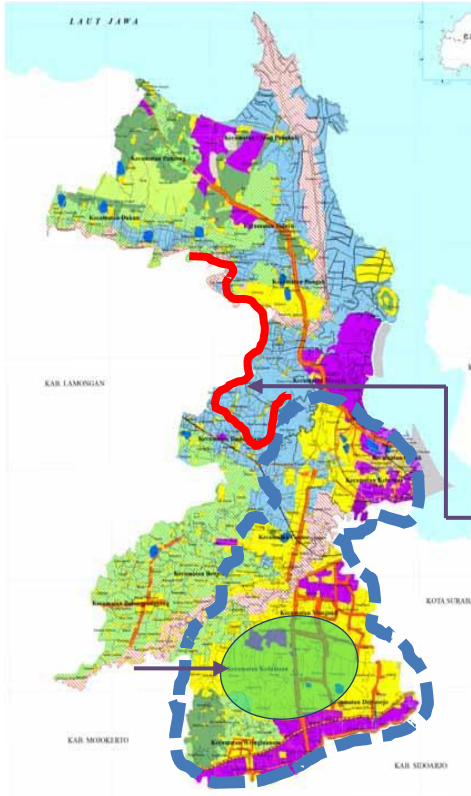
STRATEGI

- Mendorong pembangunan Rusunami dan Rusunawa khususnya di Kawasan Perkotaan
- Pengembangan dan penataan Kasiba dan Lisiba BS pada kawasan hinterland SMA
- Peningkatan peran serta dunia usaha dalam pengadaan dan pemeliharaan kawasan permukiman

Gambar 7.21. Strategi Kebijakan 2 Pengembangan Kawasan Permukiman

Strategi untuk mewujudkan kebijakan 2 Mendorong pengembangan kawasan permukiman yang mendukung pengembangan kawasan perkotaan dan industri

- Mendorong pembangunan Rusunami dan Rusunawa khususnya di Kawasan Perkotaan;
- Pengembangan dan penataan Kasiba dan Lisiba BS pada kawasan hinterland Surabaya Metropolitan Area; dan
- Peningkatan peran serta dunia usaha dalam pengadaan dan pemeliharaan kawasan permukiman.



KEBIJAKAN 3

Mengendalikan perkembangan permukiman pada kawasan-kawasan yang beresiko tinggi terhadap keselamatan, keamanan dan kenyamanan bermukim

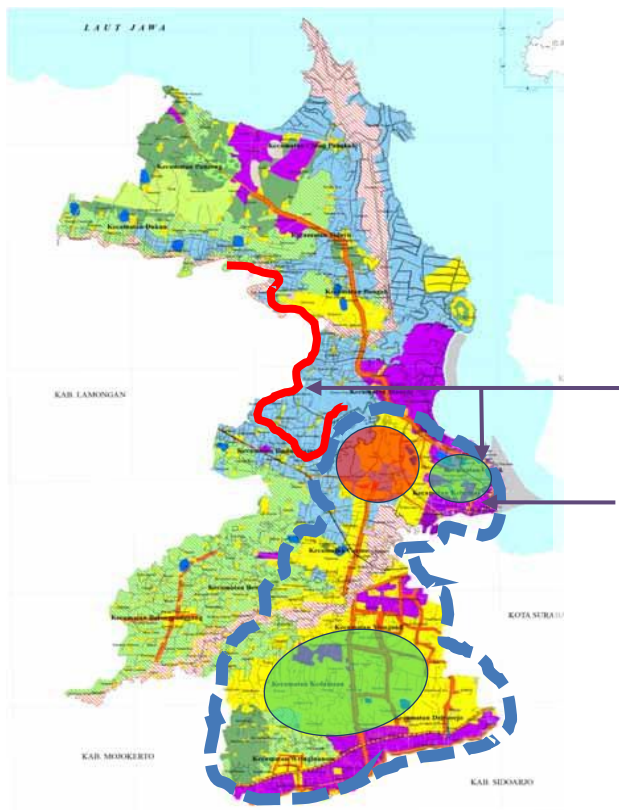
STRATEGI

- Mengendalikan perkembangan permukiman di sekitar kawasan konservasi dan kawasan lindung
- Mengendalikan perkembangan permukiman yang berada di sempadan sungai

Gambar 7.22. Strategi Kebijakan 3 Pengembangan Kawasan Permukiman

Strategi untuk mewujudkan kebijakan 3 Mengendalikan perkembangan permukiman pada kawasan-kawasan yang beresiko tinggi terhadap keselamatan, keamanan dan kenyamanan bermukim:

- Mengendalikan perkembangan permukiman di sekitar kawasan konservasi dan kawasan lindung;
- Mengendalikan perkembangan permukiman yang berada di sempadan sungai.



KEBIJAKAN 4

Menata dan merehabilitasi kawasan permukiman dan infrastruktur permukiman yang mengalami kerusakan dan penurunan kualitas

STRATEGI

- Menata kawasan permukiman padat dan kumuh di kawasan pusat kota, kawasan heritage dan di kawasan bantaran sungai
- Memenuhi penyediaan infrastruktur yang layak bagi kawasan minim pelayanan infrastruktur
- Memperkuat kelembagaan antara pemerintah pusat/daerah, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengelolaan permukiman dan infrastruktur pendukungnya

Gambar 7.23. Strategi Kebijakan 4 Pengembangan Kawasan Permukiman

Strategi untuk mewujudkan kebijakan 4 Menata dan merehabilitasi kawasan permukiman dan infrastruktur permukiman yang mengalami kerusakan dan penurunan kualitas :

- Menata kawasan permukiman padat dan kumuh di kawasan pusat kota, kawasan heritage dan di kawasan bantaran sungai;
- Memenuhi penyediaan infrastruktur yang layak bagi kawasan minim pelayanan infrastruktur; dan
- Memperkuat kelembagaan antara pemerintah pusat/daerah, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengelolaan permukiman dan infrastruktur pendukungnya.

Strategi untuk mewujudkan kebijakan 5 Memberikan akses bagi masyarakat berpendapatan menengah ke bawah untuk dapat menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau :

- Memberikan fasilitasi dan mekanisme yang memudahkan bagi masyarakat untuk memiliki atau menghuni rumah melalui lembaga-lembaga pembiayaan;

- Memberikan kemudahan pengembangan kawasan permukiman (perizinan, pemberian subsidi, pengurangan pajak, keringanan bunga cicilan, dan kemudahan pembayaran cicilan).

Strategi untuk mewujudkan kebijakan 6 Mengendalikan dan menata perkembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan yang mendukung perwujudan pola dan struktur ruang wilayah kabupaten yang hirarkis, produktif dan berkelanjutan :

- Mengembangkan permukiman sesuai dengan peruntukkan pada rencana tata ruang;
- Melakukan penataan permukiman pada kawasan pesisir yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir; dan

Mendukung pengembangan kawasan permukiman perdesaan dalam kerangka agropolitan dan minapolitan.

7.7.3. Kawasan Permukiman Prioritas Di Kabupaten Gresik

Berdasarkan proses penilaian kawasan prioritas melalui pemetaan profil permasalahan serta dengan mempertimbangkan faktor kebijakan dan nilai strategis kawasan, selanjutnya dapat didefinisikan kawasan permukiman prioritas yang ada di Kabupaten Gresik yaitu :

1. Kota Gresik, merupakan wilayah kota lama Gresik yang berada di kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas. Pada kawasan ini terdapat beberapa spot-spot kawasan (sub kawasan), antara lain : kawasan cagar budaya (makan sunan Giri dan sunan maulana malik ibrahim) serta kawasan kota lama (heritage), kawasan kumuh pesisir.
2. Kawasan Pesisir yaitu pada desa nelayan di Kecamatan Panceng dan Ujung Pangkah;
3. Agropolitan dan Minapolitan di yaitu Kecamatan Panceng dan Ujungpangkah untuk Kawasan Agropolitan, dan Kecamatan Sidayu, Bungah, dan Dukun untuk Kawasan Minapolitan. Merupakan kawasan yang dipersiapkan bagi pengembangan industri dengan fungsi permukiman pada kawasan ini adalah untuk mendukung pengembangan Agropolitan dan Minapolitan.
4. Kota Mandiri, merupakan pengembangan Kasiba di 4 Kecamatan : Driorejo, Kedamean, Menganti dan Cerme). Direncanakan akan dibangun kota mandiri seluas 13. 000 hektar, merupakan pengembangan lebih lanjut dari kawasan permukiman eksisting di wilayah hinterland Surabaya Metropolitan Area.
5. Kawasan Rawan Bencana; didefinisikan sebagai kawasan permukiman yang terkena dampak banjir Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong. Secara spasial terbagi menjadi dua spot kawasan.

Bagian berikut akan dipaparkan profil dari kawasan-kawasan prioritas tersebut.

Gambar 7.24. Peta Kawasan Prioritas

7.8. ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN (RPKPP)

7.8.1. KONSEP DAN RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITYAS

Berdasarkan potensi dan permasalahan pada setiap kawasan sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, selanjutnya dirumuskan konsep pembangunan kawasan yang nantinya akan digunakan dalam pengembangan kawasan prioritas.

7.8.1.1. Konsep Pengembangan Permukiman Kawasan Pesisir Lumpur-Kroman

a. Infill Kawasan

Infill kawasan merupakan pengisian bangunan pada lahan kosong disuatu lingkungan yang memiliki karakter kuat dan memiliki ciri khas tertentu. Infill kawasan dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan fasilitas penunjang permukiman nelayan Lumpur-Kroman (misalnya dengan pembangunan dermaga nelayan (tambatan perahu), tepat penjemuran/ pengeringan ikan, tempat pengolahan ikan), dan pemenuhan kebutuhan kebutuhan sub terminal kawasan wisata religi Maulana Malik Ibrahim. Infill kawasan ini dilakukan pada area tanah hasil reklamasi pantai.

b. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman

Merupakan program perbaikan lingkungan permukiman dengan tanpa merubah struktur kawasan yang sudah terbentuk. Peningkatan kualitas lingkungan pada kawasan ini bertujuan perbaikan kualitas infrastruktur permukiman. Selain itu juga dilakukan upaya legalisasi status tanah sehingga kawasan ini menjadi kawasan legal. Upaya legalisasi status tanah ini dilakukan pada area tanah akibat pendangkalan pantai (reklamasi). Untuk kawasan permukiman kampung yang berstatus tanah legal, peningkatan kualitas lingkungan dilakukan dengan perbaikan saluran drainase. Sedangkan perbaikan kawasan industry kecil dan pengolahan dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana kawasan dan upaya pengolahan limbah (limbah industry kecil dan pengolahan).

c. Konsolidasi Lahan

Merupakan kegiatan penatagunaan tanah melalui pengaturan kembali penggunaan dan penguasaan tanah dengan tujuan optimalisasi penggunaan tanah dalam hubungan pemanfaatan, peningkatan produktifitas dan konservasi bagi kelesatريان lingkungan. Konsolidasi lahan pada kawasan permukiman kampung tanah milik PT KAI dan PT Pelabuhan dilakukan dengan upaya koordinasi dengan pemilik Tanah (PT.KAI dan PT.Pelabuhan) agar mendapat kejelasan tentang status tanah. Kemudian penghambatan perkembangan permukiman pada kawasan status illegal ini karena kondisi permukiman yang padat.



Gambar 7.25. Konsep Pengembangan Permukiman kawasan pesisir Lumpur-Kroman

7.8.1.2. Konsep Pengembangan Permukiman Kawasan Pasar

a. Revitalisasi kawasan kompleks Pasar

Konsep revitalisasi kawasan merupakan suatu upaya yang bertujuan meningkatkan kembali pemanfaatan tanah dan bangunan yang tidak sesuai dengan rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi yang telah ditetapkan. Konsep revitalisasi kawasan kompleks pasar dilakukan dengan men-sinergikan seluruh bangunan yang ada di kompleks tersebut karena kawasan kompleks pasar memberikan efek pada kawasan permukiman sekitar. Kemudian penyediaan parkir komunal agar parkir tidak menggunakan bahu jalan sebagai tempat parkir dan tidak mengganggu aktifitas jalan. Parkir komunal ini tidak hanya melayani konsumen pasar tapi juga melayani konsumen pertokoan.

Revitalisasi ini bertujuan agar kawasan perdagangan tidak memberikan efek kumuh pada kawasan. Revitalisasi ini dilakukan pada kawasan kompleks pasar dan pertokoan (pada kawasan berwarna biru).

b. Redevelopment bangunan pertokoan

Konsep redevelopment adalah suatu upaya yang dilakukan dengan cara pembangunan kembali kawasan perdagangan dan jasa di sepanjang kawasan yang berdekatan dengan pasar. Konsep ini dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan agar tidak terjadi kekumuhan. Redevelopment dilakukan dengan memaksimalkan lahan pertokoan dengan konsep *street building* dengan *system corridor pedestrian way*. Sehingga pedestrian dapat digunakan pejalan kaki untuk menikmati perbelanjaan.

Dalam penerapan konsep *street building* dengan *system corridor pedestrian way*, juga dilakukan pelarangan parkir *on-street* dan penghijauan pada sepanjang koridor Jl.Gubernur Suryo- Jl. H Samanhudi, Jl. Usman Sadar-Jl. Sindujoyo. Pelarangan parkir ini bertujuan supaya jalan dapat berfungsi maksimal dan tidak terjadi kemacetan. Sedangkan penghijauan bertujuan memberikan kesan sejuk dan mengurangi polusi sehingga memberikan kenyamanan masyarakat bila berkunjung ke pusat perbelanjaan. Konsep ini dilakukan pada pertokoan/perdagangan yang berada pada area yang berwarna merah.

c. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman

Merupakan program perbaikan lingkungan dengan tanpa merubah struktur kawasan yang sudah terbentuk. Peningkatan kualitas lingkungan pada kawasan ini bertujuan perbaikan kualitas infrastruktur permukiman. Didalamnya terdapat rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana lingkungan serta bangunan. Konsep ini dilakukan pada kawasan permukiman (dapat dilihat pada gambar berwarna kuning).



Gambar 7.26. Konsep Pengembangan Permukiman Kawasan Pasar

7.8.1.3. Konsep Pengembangan Permukiman Kawasan Heritage dan Kawasan Kuliner

a. Peningkatan kualitas bangunan

Konsep peningkatan kualitas bangunan merupakan perbaikan bangunan dengan cara merehab kembali bangunan kuliner sehingga kawasan kuliner memberikan kesan bersih, tidak kumuh dan diharapkan dapat menarik pengunjung lebih banyak.

b. Preservasi

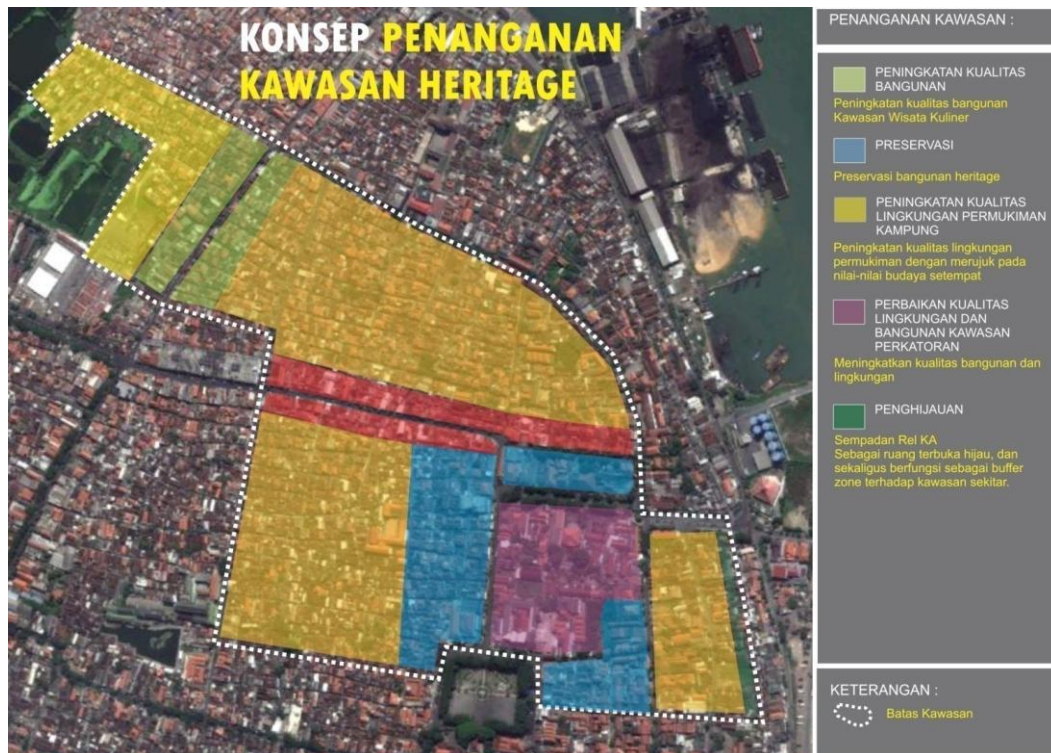
Preservasi merupakan pemeliharaan bangunan bersejarah agar terhindar dari kerusakan. Dalam preservasi ini terdapat restorasi dan rehabilitasi. Preservasi mencakup pelestarian, penjagaan, dan perawatan terhadap bangunan bersejarah. Restorasi dan rehabilitasi dilakukan tanpa menghilangkan nilai sejarah. Diharapkan dengan adanya preservasi ini bangunan lama kondisi bangunannya terawat dan fungsi bangunannya tidak berubah sehingga dapat dijadikan kawasan wisata dan edukasi. Konsep preservasi ini dilakukan pada bangunan lama/heritage.

c. Peningkatan Kualitas Lingkungan

Peningkatan kualitas lingkungan merupakan program perbaikan lingkungan dengan tanpa merubah struktur kawasan yang sudah terbentuk. Peningkatan kualitas lingkungan dilakukan pada permukiman kampung dengan tujuan perbaikan kualitas infrastruktur permukiman yang merujuk pada nilai-nilai budaya setempat. Sedangkan peningkatan kualitas pada bangunan perkantoran dilakukan renovasi pada bangunan perkantoran yang sudah mengalami penurunan kualitas.

d. Penghijauan

Konsep penghijauan ini bertujuan untuk memfungsikan sempadan rel KA sebagai kawasan ruang terbuka hijau dan sekaligus berfungsi sebagai buffer zone terhadap kawasan sekitar.



Gambar 7.27. Konsep Pengembangan Permukiman Heritage dan Kawasan Kuliner

7.8.1.4. Konsep Pengembangan Permukiman Kawasan Makam Maulana Malik Ibrahim Dan Alun-Alun

a. Preservasi

Preservasi merupakan pemeliharaan bangunan bersejarah agar terhindar dari kerusakan. Dalam preservasi ini terdapat restorasi dan rehabilitasi. Preservasi mencakup pelestarian, penjagaan, dan perawatan terhadap bangunan bersejarah. Restorasi dan rehabilitasi dilakukan tanpa menghilangkan nilai sejarah. Diharapkan dengan adanya preservasi pada kawasan Makam Maulana Malik Ibrahim, areal makam kondisi bangunannya terawat sehingga dapat dijadikan kawasan wisata religi yang tepat.

b. Peningkatan Kualitas lingkungan permukiman

Peningkatan kualitas lingkungan permukiman merupakan program perbaikan lingkungan dengan tanpa merubah struktur kawasan yang sudah terbentuk. Peningkatan kualitas lingkungan pada permukiman sekitar Makam Maulana malik Ibrahim ini bertujuan perbaikan kualitas infrastruktur permukiman, dilakukan dengan merujuk pada nilai-nilai religi islam. Sedangkan perbaikan kualitas permukiman kampung bertujuan perbaikan kualitas infrastruktur permukiman, dilakukan dengan merujuk pada nilai-nilai budaya setempat.

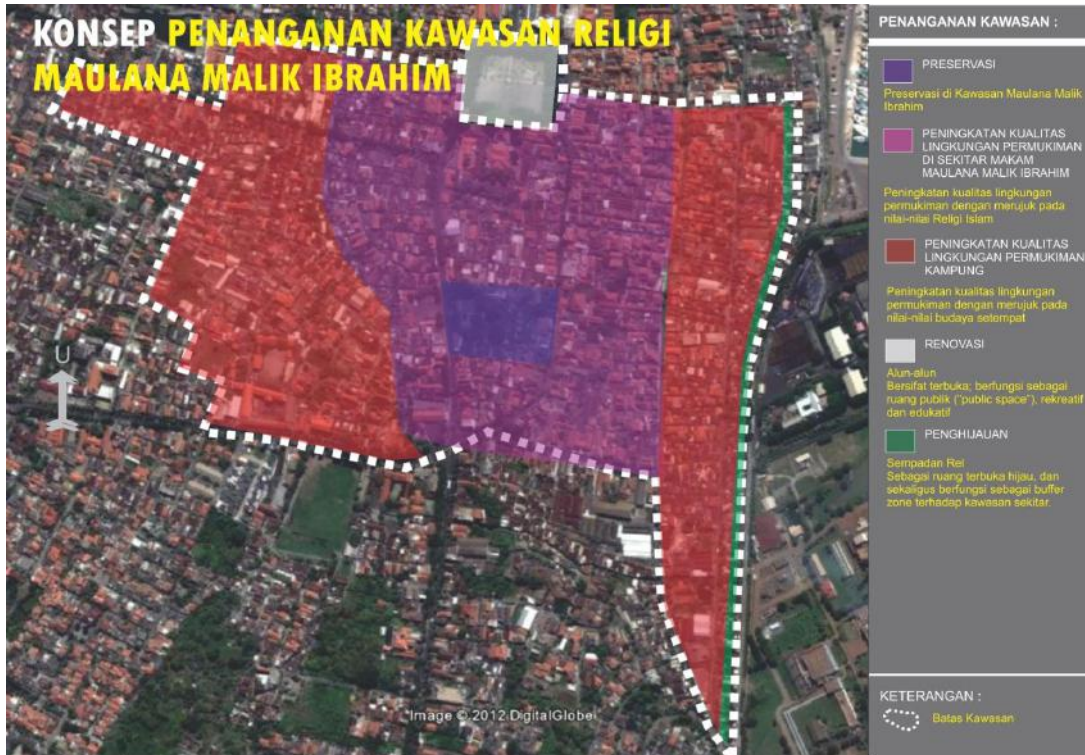
c. Renovasi

Merupakan pembangunan ulang atau perbaikan pada suatu bangunan atau situs yang memiliki makna historis. Renovasi dilakukan pada alun-alun

guna alun-alun difungsikan sebagai ruang public yang bersifat terbuka yang dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi dan edukasi.

e. Penghijauan

Konsep penghijauan ini bertujuan untuk memfungsikan sempadan rel KA sebagai kawasan ruang terbuka hijau dan sekaligus berfungsi sebagai buffer zone terhadap kawasan sekitar.



Gambar 7.28. Konsep Pengembangan Permukiman kawasan Makam Maulana Malik Ibrahim

7.8.1.5. Konsep Pengembangan Permukiman Kawasan Proling KA

a. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman

Merupakan program perbaikan lingkungan dengan tanpa merubah struktur kawasan yang sudah terbentuk. Peningkatan kualitas lingkungan pada kawasan ini bertujuan perbaikan kualitas infrastruktur permukiman. Didalamnya terdapat rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana lingkungan serta bangunan. Kemudian bangunan yang ada pada sepanjang rel KA diorientasikan pada rel KA. Penerapan konsep ini diharapkan mampu menjadikan kawasan permukiman pada Kawasan ProlingKA menjadi teratur dan jauh dari kesan kumuh.

b. Penghijauan

Konsep penghijauan ini bertujuan untuk memfungsikan sempadan rel KA sebagai kawasan ruang terbuka hijau (taman) dan sekaligus berfungsi sebagai buffer zone terhadap kawasan sekitar.

Pada jalur rel KA ini dilakukan penerapan aturan tentang sempadan rel KA : yakni 11 meter kiri-kanan untuk ruang kosong, dan 20 meter kiri-kanan sampai dengan batas pagar bangunan. Memaksimalkan jalan inspeksi (kiri dan kanan) di sepanjang rel KA sebagai jalan umum diantaranya 11 meter-20 meter sempadan. Selama belum beroperasinya Kereta Api, dimungkinkan penempatan bangunan PKL setelah jarak 11 meter dari rel KA. Dan saluran dimungkinkan ditempatkan pada sempadan Rel KA.



Gambar 7.29. Konsep Pengembangan Permukiman Kawasan ProlingKA

7.8.1.6. Konsep Pengembangan Permukiman Kawasan Makam Sunan Giri

a. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman

Peningkatan kualitas lingkungan permukiman merupakan program perbaikan lingkungan permukiman dengan tanpa merubah struktur kawasan yang sudah terbentuk. Peningkatan kualitas lingkungan pada kawasan permukiman ini bertujuan perbaikan kualitas infrastruktur permukiman dengan merujuk pada nilai-nilai budaya kawasan setempat.

- Peningkatan kualitas lingkungan pada kawasan permukiman disekitar Makam Sunan giri dan Sunan Prapen dilakukan dengan merujuk pada nilai religi Sunan Giri.
- Peningkatan kualitas lingkungan pada kawasan permukiman disekitar Giri Kedaton dilakukan dengan merujuk pada nilai historis kota Gresik.

- Peningkatan kualitas lingkungan pada kawasan permukiman disekitar Tlaga Pegat dilakukan dengan merujuk pada nilai rekreatif kawasan.
- Peningkatan kualitas lingkungan pada kawasan permukiman disekitar Makam Dewi Sekardadu dilakukan dengan merujuk pada nilai budaya dan religi.
- Peningkatan kualitas lingkungan pada kawasan permukiman disekitar permukiman kampung asli dan kampung baru dilakukan dengan merujuk pada nilai budaya setempat

b. Preservasi

Preservasi merupakan pemeliharaan bangunan bersejarah agar terhindar dari kerusakan. Dalam preservasi ini terdapat restorasi dan rehabilitasi. Pada kawasan ini dilakukan preservasi dengan merujuk pada nilai-nilai religius Sunan Giri, agar dapat tetap melestarikan kawasan religi tersebut dan mampu meningkatkan daya dukung kawasan. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan beberapa renovasi dan rehabilitasi, yakni merubah entrance kawasan, menata ulang PKL, dan membangun museum.

Preservasi juga dilakukan pada kawasan Giri Kedaton dengan merujuk pada nilai-nilai religius Giri Kedaton, agar dapat tetap melestarikan kawasan religi tersebut. Rehabilitasi Giri Kedaton dilakukan dengan cara renovasi bangunan masjid dan renovasi bangunan makam.

c. Penataan entrance kawasan Makam Sunan Prapen

Penataan entrance kawasan Makam Sunan Prapen ini bertujuan agar Makam Sunan prapen tertata sehingga dapat digunakan sebagai wisara religi.

d. Pengembangan RTH dan Rekreasi

Pengembangan RTH dan rekreasi bertujuan menjadikan Tlaga Pegat sebagai kawasan terbuka yang dapat digunakan sebagai kawasan rekreasi. Pada Tlaga pegat ini dilakukan pengerukan supaya tlaga pegat tidak kumuh. Kemudian terdapat kegiatan yang akan dilakukan dalam penataan tlaga pegat yaitu dengan membangun MCK dan menjadikan tlaga pegat sebagai kawasan public space dan rekreasi misalnya wisata sepeda air.

e. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan upaya untuk mengembalikan kondisi bangunan atau unsur-unsur kawasan kota ke fungsi yang sebenarnya. Rehabilitasi Makam Sekardadu dilakukan dengan pembangunan Gapura sebagai identitas kawasan Makam Sekardadu, merenovasi bangunan makam, pembuatan tempat parkir dan pembangunan prasarana penunjang, misalnya toilet.

Sedangkan rehabilitasi kawasan Makam Putri Cempo dilakukan dengan pembangunan dan perbaikan jalan akses menuju Makam Cempo, penataan PKL.

f. Redevelopment

Redevelopment merupakan pembangunan kembali kawasan parkir sunan giri di sepanjang kawasan yang berdekatan dengan pasar. Penataan area parkir ini dilakukan dengan merenovasi bangunan PKL dan pembangunan halte. Area parkir ini akan digunakan sebagai tempat parkir kendaraan para peziarah.



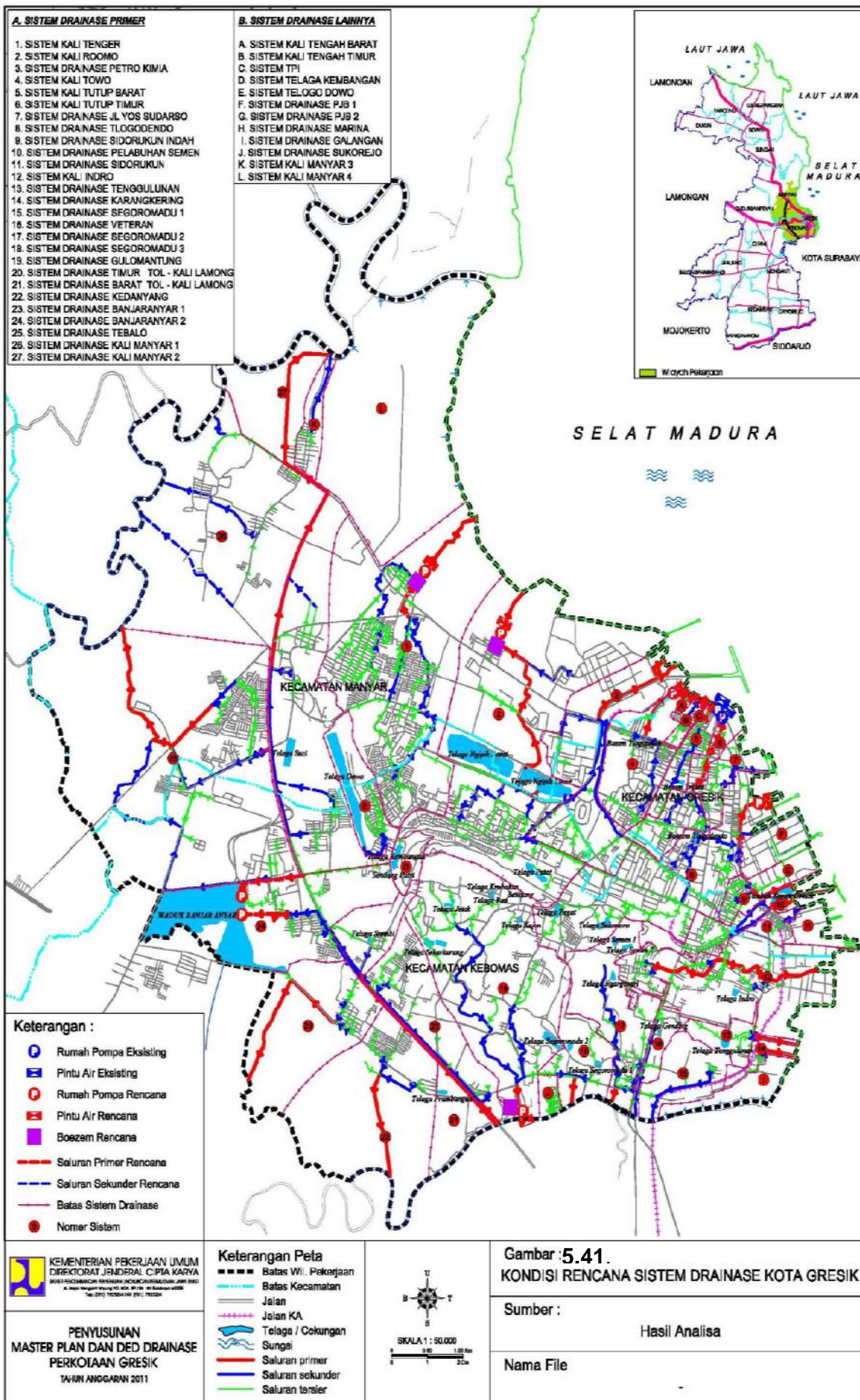
Gambar 7.30. Konsep Pengembangan Permukiman Kawasan Makam Sunan Giri

7.9. ARAHAN MASTERPLAN & DED DRAINASE PERKOTAAN GRESIK (GRS.K-2)

Pada sistem drainase Kota Gresik kerapatan saluran drainase berbeda antar sistem, pada wilayah yang berkembang seperti di wilayah Kota Gresik Barat dan Selatan banyak saluran drainase yang tidak ada sehingga perlu ditambah. Sebagai acuan untuk memperkirakan jumlah saluran drainase tiap luas *catchment area* 10 Ha dibutuhkan 1 (satu) saluran tersier dengan panjang saluran 35 m per hektar (35m/ha). Berdasarkan perkiraan tersebut maka dapat dihitung kebutuhan saluran drainase tersier tiap sistem drainase. Kebutuhan normalisasi saluran dan pembuatan saluran drainase tersier baru dapat dilihat pada Tabel 5.12. Selain itu rencana sistem drainase juga dapat dilihat pada Gambar 5.41., rencana rumah pompa beserta kapasitasnya dapat dilihat pada Gambar 5.42. sedang untuk rencana pembuatan bozem baru beserta dengan luasnya dapat dilihat pada Gambar 5.43.

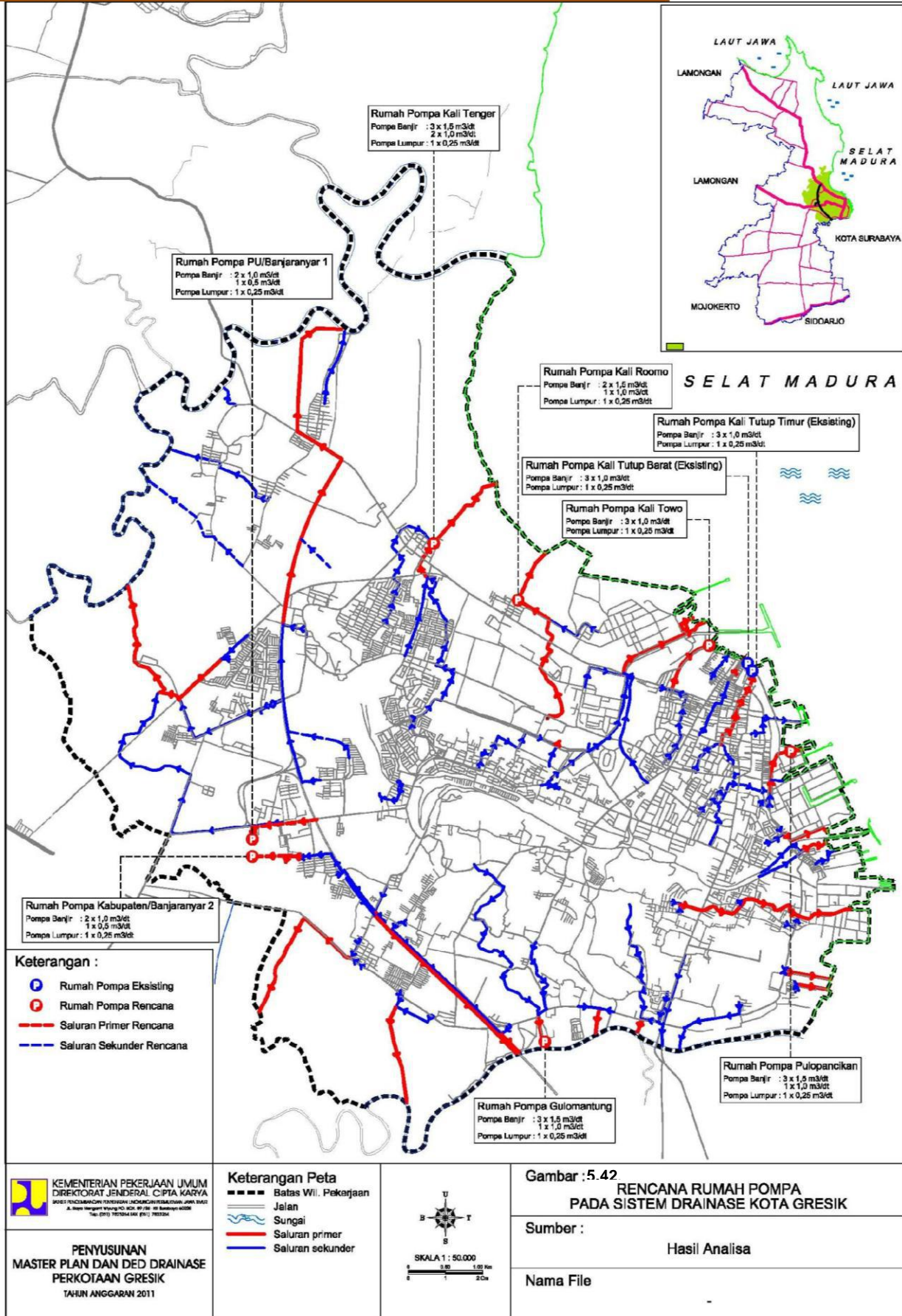
RPI2-JM

RENCANA TERPADU DAN PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015 - 2019



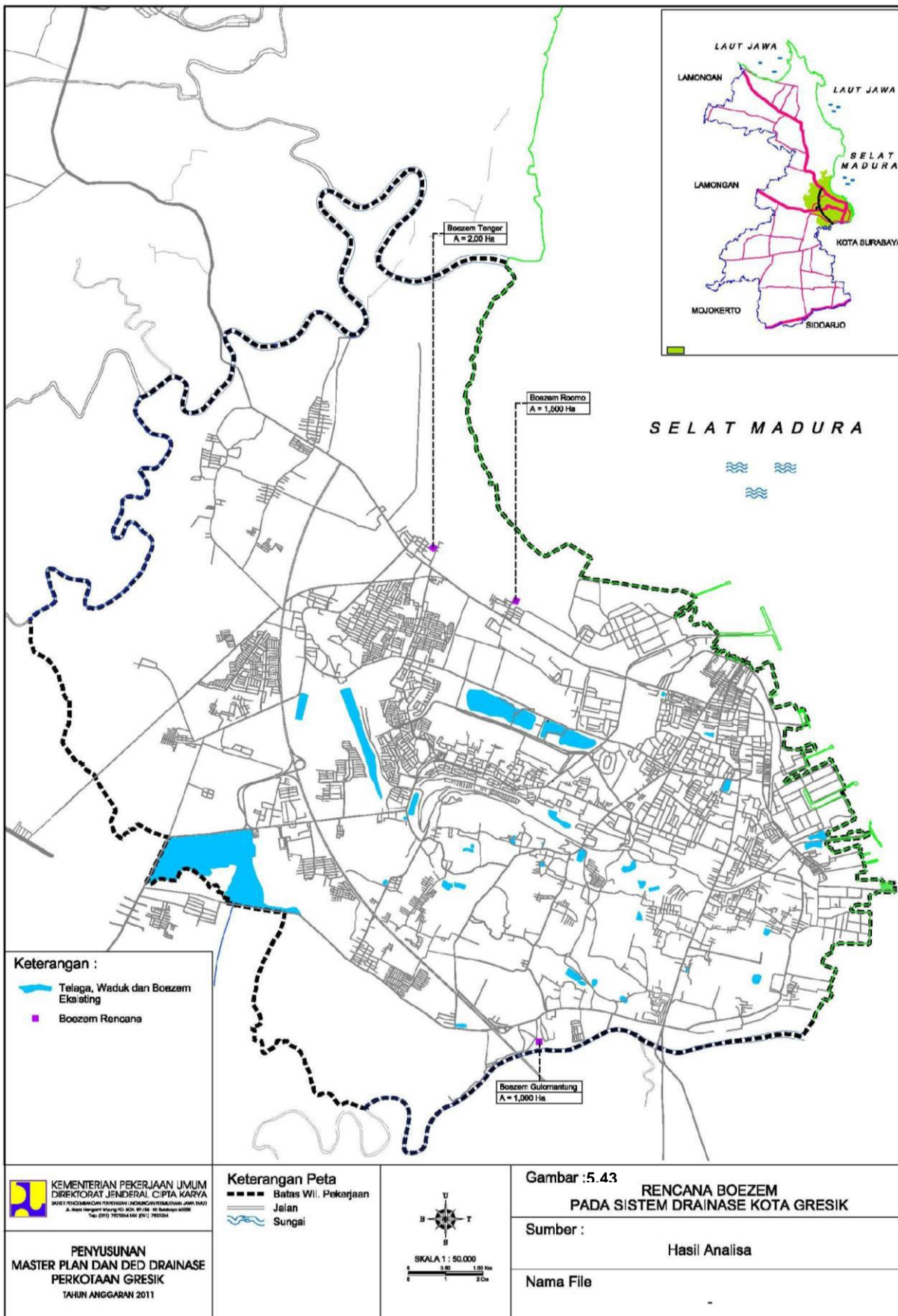
RPI2-JM

RENCANA TERPADU DAN PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015 - 2019



RPI2-JM

RENCANA TERPADU DAN PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH



Tabel 15.1
Perbandingan Kondisi Eksisting dan Rencana Sistem Drainase Kota Gresik

No.	Sistem Drainase	Eksisting				Rencana				Keterangan
		Luas CA (Ha)	Primer Jumlah/Panjang	Sekunder Jumlah/Panjang	Tersier Jumlah/Panjang	Luas CA (Ha)	Primer Jumlah/Panjang	Sekunder Jumlah/Panjang	Tersier Jumlah/Panjang	
1	Sistem Drainase Utama									
1	Sistem Kali Tengger	601.64	1 1791	3 6004	35 13440	601.64	1 1791	3 6004	35 13440	Rencana Bozem, Rumah Pompa, dan Pintu Air di pertemuan Saluran Sekunder Pongangan dan Kali Tengger. Rencana Bozem Tengger 2 Ha, kapasitas pompa yang dibutuhkan 3 x 1,5 m3/dt dan 2 x 1,0 m3/dt serta pompa lumpur 1 x 0,25 m3/dt
2	Sistem Kali Roomo	661.31	2 3874	4 3948	17 7583	661.31	2 3874	4 3948	17 7583	Rencana Bozem, Rumah Pompa, dan Pintu Air di pertemuan Saluran Tersier Roomo 2 dan Kali Roomo. Rencana Bozem Roomo 1,5 Ha, kapasitas pompa yang dibutuhkan 2 x 1,5 m3/dt dan 1 x 1,0 m3/dt serta pompa lumpur 1 x 0,25 m3/dt
3	Sistem Drainase Petrokimia	235.31	1 1414	3 4167	9 3986	235.31	1 1414	3 4167	9 3986	Rencana Rumah Pompa dan Pintu Air di hilir Kali Towo (telah ada DED dan dilaksanakan tahun 2012), normalisasi dan pembangunan Bozem. Topogojok
4	Sistem Kali Towo	124.72	1 925	2 1118	9 2852	124.72	1 925	2 1118	9 2852	Sudah ada Rumah Pompa dan Pintu Air di hilir Kali Tutup Barat
5	Sistem Kali Tutup Barat	44.14	1 347	3 903	11 2021	44.14	1 347	3 903	11 2021	Sudah ada Rumah Pompa dan Pintu Air di hilir Kali Tutup Timur
6	Sistem Kali Tutup Timur	80.24	1 1230	2 1035	8 1958	80.24	1 1230	2 1035	8 1958	Sudah ada Rumah Pompa dan Pintu Air di hilir Kali Tutup Timur
7	Sistem Drainase Jl. Yos Sudarso	46.77	1 925	4 1509	4 1509	46.77	1 925	4 1509	4 1509	
8	Sistem Drainase Tlogo Dendo	300.75	1 827	5 2977	18 8019	300.75	1 827	5 2977	18 8019	Rencana Rumah Pompa dan Pintu Air di hilir Saluran Primer Pulo Pancikan, Pengerukan Bozem Tlogodendo. Kapasitas Pompa yang dibutuhkan 3 x 1,5 m3/dt dan 1 x 1,0 m3/dt serta pompa lumpur 1 x 0,25 m3/dt
9	Sistem Drainase Sidonkum Indah	29.52	1 705	2 387	7 1758	29.52	1 705	2 387	7 1758	
10	Sistem Drainase Pelabuhan Semen	59.85	1 337	2 1481	5 2725	59.85	1 337	2 1481	5 2725	
11	Sistem Drainase Sidonkum	19.91	1 325	3 628	19 91	19.91	1 325	3 628	19 91	
12	Sistem Kali Indro	259.69	1 2648	4 784	21 6219	259.69	1 2648	4 784	21 6219	
13	Sistem Drainase Tengulunan	40.24	1 634	2 69	5 1453	40.24	1 634	2 69	5 1453	
14	Sistem Drainase Karangkeing	22.19	1 395	2 159	5 752	22.19	1 395	2 159	5 752	
15	Sistem Drainase Segromadu 1	81.27	1 1237	4 559	8 2800	81.27	1 1237	4 559	8 2800	
16	Sistem Drainase Veteran	36.43	1 1269	4 1823	36 43	36.43	1 1269	4 1823	36 43	
17	Sistem Drainase Segromadu 2	149.31	1 193	2 2395	7 2441	149.31	1 193	2 2395	7 2441	
18	Sistem Drainase Segromadu 3	78.90	1 318	2 508	6 1784	78.90	1 318	2 508	6 1784	
19	Sistem Drainase Gulomantung	441.40	1 446	2 4353	12 7055	441.40	1 446	2 4353	12 7055	Rencana Bozem, Rumah Pompa dan Pintu Air di pertemuan hilir Saluran Gulomantung. Rencana Bozem Gulomantung 1,0 Ha, kapasitas pompa yang dibutuhkan 3 x 1,5 m3/dt dan 1 x 1,0 m3/dt serta pompa lumpur 1 x 0,25 m3/dt
20	Sistem Drainase Timur Tol - Kali Lancong	149.87	1 335	2 2467	3 3208	149.87	1 335	2 2467	3 3208	
21	Sistem Drainase Barat Tol - Kali Lancong	224.02	1 2713	3 1890	8 2343	224.02	1 2713	3 1890	8 2343	Sebagian catchment area masuk ke Sistem Drainase Banjaranyar 2
22	Sistem Drainase Kedanyang	332.18	1 1292	2 920	6 1716	332.18	1 1292	2 920	6 1716	Sebagian catchment area masuk ke Sistem Drainase Banjaranyar 2
23	Sistem Drainase Banjaranyar 1	240.57	1 2235	2 566	7 1336	240.57	1 2235	2 566	7 1336	Rencana Rumah Pompa dan Pintu Air di hilir Saluran Primer Kantor Bupati Selatan dan di pertemuan Saluran PU dan Saluran Banjaranyar 2 (2 buah rumah pompa). Masing-masing rumah pompa memiliki kapasitas pompa 2 x 1,0 m3/dt dan 1 x 0,5 m3/dt serta pompa lumpur 1 x 0,25 m3/dt
24	Sistem Drainase Banjaranyar 2	187.68	1 257	3 402	8 2083	187.68	1 257	3 402	8 2083	
25	Sistem Drainase Teballo	929.76	1 2800	4 6726	13 5463	929.76	1 2800	4 6726	13 5463	
26	Sistem Kali Manyar 1	600.05	2 2022	5 3747	600 05	600.05	2 2022	5 3747	600 05	Membuat Saluran Sekunder Banjarasasi Selatan menuju Kali Manyar
27	Sistem Kali Manyar 2	498.16	1 2384	3 3295	14 3928	498.16	1 2384	3 3295	14 3928	Membuat Saluran Sekunder Alam Bukit Raya
Sub Total I		6474.88	23 28099	67 52333	254 92390	6474.88	24 29424	67 54456	257 91929	406 137003
II. Sistem Drainase Lainnya										
A	Sistem Kali Tengah Barat	3.63			1 242	3.63			1 242	Rencana Pintu Air di hilir Kali Tengah Barat
B	Sistem Kali Tengah Timur	14.50			4 553	14.50			4 553	Rencana Pintu Air di hilir Kali Tengah Timur
C	Sistem Drainase TPI	1.05			1 753	1.05			1 753	Rencana Pintu Air di hilir Saluran TPI
D	Sistem Telaga Kembangan	28.03			28 03	28.03			28 03	
E	Sistem Telaga Dowo	79.91			4 2347	79.91			4 2347	
F	Sistem Drainase PJB 1	44.61			44 61	44.61			44 61	Kawasan PJB, tidak di analisa
G	Sistem Drainase PJB 2	28.22			28 22	28.22			28 22	Kawasan PJB, tidak di analisa
H	Sistem Drainase Marina	27.92			27 92	27.92			27 92	Kawasan PJB, tidak di analisa
I	Sistem Drainase Galangan	41.21			41 21	41.21			41 21	Kawasan PT. Manna Shipyards, tidak di analisa
J	Sistem Drainase Sukorejo	14.01			5 1135	14.01			5 1135	
K	Sistem Kali Manyar 3	39.88			1 1020	39.88			1 1020	
L	Sistem Kali Manyar 4	655.51			655 51	655.51			655 51	
Sub Total II		978.48	0 3 2055	70 54388	17 5686	978.48	0 3 2055	70 56511	17 5686	99 34650
Total		7453.36	23 28099	70 54388	271 98076	7453.36	24 29424	70 56511	274 97615	495 167358

Ket: - Di setiap sistem perlu normalisasi di seluruhnya
- Ideanya setiap saluran tersier maksimal 10 Ha dan panjang saluran 35 m/ha, sehingga perlu perencanaan tersendiri dalam Sistem Jaringan Drainase Tersier (SJDT)

7.9.1. RENCANA SISTEM DRAINASE UTAMA

Sistem drainase utama terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) sistem, batas sistem kebanyakan tidak berubah hanya pada beberapa sistem yang mengalami perubahan. Hampir di setiap sistem dibutuhkan normalisasi saluran serta penambahan saluran tersier baru. Dibutuhkan rumah pompa baru selain rumah pompa yang sudah ada yaitu di Sistem Kali Tenger, Sistem Kali Roomo, Sistem Kali Towo, Sistem Drainase Tlogodendo, Sistem Drainase Gulomantung dan Sistem Drainase Banjaranyar 2. Pada sistem drainase Banjaranyar 2 ini direncanakan 2 lokasi rumah pompa yaitu Rumah Pompa PU (Rumah Pompa Banjaranyar 1) dan Rumah Pompa Kabupaten (Rumah Pompa Banjaranyar 2). Selain itu perlu dibuat mini bozem di Sistem Kali Tenger, Sistem Kali Roomo dan Sistem Drainase Gulomantung. Rencana sistem drainase utama Kota Gresik diuraikan di bawah ini.

1. Sistem Kali Tenger

Batas sistem Kali Tenger tidak mengalami perubahan dengan luas *cathment area* (CA) 601,64 Ha, sedang saluran-saluran pada Sistem Kali Tenger yang perlu dilakukan normalisasi meliputi :

- a. Saluran Tersier : Dengan panjang saluran 13.440 m dan berjumlah 35 saluran tersier, 27 saluran tersier perlu dilakukan normalisasi sedangkan 8 saluran tersier tidak perlu dilakukan normalisasi karena dimensi saluran yang lama masih dapat menampung debit rencana dengan periode ulang 2 tahun. Direncanakan untuk kebutuhan Sistem Jaringan Drainase Tersier (**SJDT**) untuk saluran tersier adalah 60 buah saluran dengan panjang 21.000 m, sehingga dari jumlah eksisting yang ada kurang 25 saluran dengan panjang 7.560 m.
- b. Saluran Sekunder : 3 saluran sekunder dengan panjang 6.004 m, disemua ruas saluran pada Saluran Yosowilangun dan Saluran Kalimantan perlu dilakukan normalisasi agar dapat menampung debit banjir rencana periode ulang 5 tahun, sedang Saluran Pongangan pada ruas 3 hingga ruas 6 perlu dilakukan normalisasi dan pada ruas yang lain dapat saluran yang lama masih dapat digunakan.
- c. Saluran Primer : Panjang saluran 1.791 m, Kali Tenger pada ruas 1 (hulu) perlu dilakukan normalisasi sedang di ruas 2 (hilir) saluran yang lama masih dapat dipergunakan.

Kondisi tersebut diatas berlaku bila tidak ada pengaruh air pasang di bagian hilir, sehingga untuk mengantisipasi air pasang yang datangnya bersamaan dengan air banjir dari hulu maka perlu dipasang rumah pompa dan pintu air yang lokasinya berada di hilir pertemuan antara Saluran Kali Tenger dan

Saluran Sekunder Pongangan serta adanya rencana bozem. Bozem direncanakan seluas 2,0 Ha dengan kedalaman 3 m, kapasitas pompa yang akan dipasang 3 x 1,5 m³/dt dan 2 x 1,0 m³/dt serta pompa lumpur 1 x 0,25 m³/dt.

2. Sistem Kali Roomo

Dengan luas CA 661.31 Ha dan batas sistem Kali Roomo tidak mengalami perubahan, aliran yang melimpas dari Telaga Ngipik menuju Kali Roomo dengan anggapan 25% dari luas CA di hulu Telaga Ngipik sedang sisanya 75% dapat ditampung di Telaga Ngipik. Saluran-saluran pada Sistem Kali Roomo yang perlu dilakukan normalisasi meliputi :

- a. Saluran Tersier : Dari 17 saluran tersier dengan panjang 7.583 m yang ada, 2 saluran tersier perlu dilakukan pengerukan saja, 9 saluran tersier perlu dilakukan normalisasi, dan 6 saluran tersier tidak perlu dilakukan normalisasi karena dimensi saluran yang lama masih dapat menampung debit rencana dengan periode ulang 2 tahun. Untuk kebutuhan SJD rencana diperlukan 66 saluran dengan panjang 23.100m sehingga dari jumlah saluran yang ada masih kurang 49 saluran dengan panjang 15.517m.
- b. Saluran Sekunder : 4 saluran dengan panjang 3.948m yaitu: Saluran Ngipik, Saluran Petrowidodo dan Saluran Dr Wahidin ruas 1 tidak perlu dilakukan normalisasi, sedang Saluran Tridharma dan Saluran Dr. Wahidin pada ruas lainnya perlu dilakukan normalisasi karena dimensi saluran yang ada belum mampu menampung debit banjir periode ulang 5 tahun.
- c. Saluran Primer : Ada 2 saluran dengan panjang 3.874m, Kali Roomo pada ruas 2 tidak perlu dilakukan normalisasi sedang di ruas 1, ruas 3 hingga muara perlu dilakukan normalisasi.

Kondisi tersebut diatas berlaku bila tidak ada pengaruh air pasang di bagian hilir, sehingga untuk mengantisipasi air pasang yang datangnya bersamaan dengan air banjir dari hulu maka perlu dipasang rumah pompa pada Kali Roomo yang lokasinya berada di hilir pertemuan Kali Roomo dengan Saluran Tersier Roomo 2 dan Roomo 3 atau pada tikungan luar Kali Roomo dari arah Timur menuju Utara. Rencana Bozem Roomo 1,5 Ha, kapasitas pompa yang Dibutuhkan 2 x 1,5 m³/dt dan 1 x 1,0 m³/dt serta pompa lumpur 1 x 0,25 m³/dt.

3. Sistem Drainase Petrokimia

Luas CA 235,31 Ha dan batas Sistem Drainase Petrokimia tidak mengalami perubahan, saluran-saluran pada Sistem Drainase Petrokimia ada yang sebagian berada di dalam lingkungan pabrik Petrokimia Gresik yaitu Saluran Tersier Pupuk ZA, Saluran Sekunder Gudang Pupuk ZA, dan Saluran Primer Petrokimia. Saluran

tersebut menjadi wewenang dari industri dan dalam masterplan ini hanya ditunjukkan dimensi minimal saluran yang dibutuhkan drainase. Saluran yang berada di luar lingkungan pabrik Petrokimia yang memerlukan penanganan meliputi :

- a. Saluran Tersier : Dari 9 saluran dengan panjang 1.414m tersier yang ada, 7 saluran tersier perlu dilakukan normalisasi, 1 saluran tersier wewenang pabrik Petrokimia, dan 1 saluran tersier tidak perlu dilakukan normalisasi karena dimensi saluran yang lama masih dapat menampung debit rencana dengan periode ulang 2 tahun. Direncanakan kebutuhan SJDT untuk saluran tersier berjumlah 24 saluran dengan panjang 8.400m sehingga tambahan saluran baru berjumlah 15 saluran dengan panjang 4.414m.
- b. Saluran Sekunder : Dari 3 saluran sekunder dengan panjang 4.167m, 2 saluran perlu dilakukan normalisasi yaitu Saluran Tridharma Barat dan Saluran Tridharma Timur (hanya pada ruas 1 yang dimensinya masih mencukupi), sedang Saluran Gudang Pupuk ZA menjadi tanggungjawab industri.
- c. Saluran Primer : Panjang Saluran Petrokimia 1414 m menjadi tanggungjawab industri yaitu PT. Petrokimia Gresik.

4. Sistem Kali Towo

Batas sistem Kali Towo tidak mengalami perubahan dengan luas CA 124.72 Ha, saluran-saluran pada Sistem Kali Towo yang perlu ditangani meliputi :

- a. Saluran Tersier : Dari 9 saluran tersier dengan panjang 2.852m yang ada, 1 saluran tersier berada dalam lingkungan perumahan Petrokimia yaitu Saluran Perum Petrokimia, 4 saluran perlu dilakukan normalisasi dan 4 saluran tersier tidak perlu dilakukan normalisasi karena dimensi saluran yang lama masih dapat menampung debit rencana dengan periode ulang 2 tahun. Tambahan 3 saluran tersier dengan panjang 1.348m untuk memenuhi rencana kebutuhan SJDT 12 saluran dan panjang 4.200m.
- b. Saluran Sekunder : Saluran Tlogopojok Timur dan Saluran Tlogopojok Barat dengan panjang 1.118m perlu dilakukan normalisasi hanya pada ruas 1 dan 2 Saluran Tlogopojok Timur masih dapat menggunakan dimensi saluran yang lama.
- c. Saluran Primer : Panjang Kali Towo 925m dimensinya masih mencukupi untuk mengalirkan debit banjir rencana.

Kondisi tersebut diatas berlaku bila tidak ada pengaruh air pasang di bagian hilir, sehingga untuk mengantisipasi air pasang yang datangnya

bersamaan dengan air banjir dari hulu maka perlu dipasang rumah pompa pada hilir Kali Towo dengan dilengkapi pintu air. Rencananya rumah pompa tersebut akan dipasang pada tahun anggaran 2012. Selain itu perlu mengaktifkan kembali Bozem Tlogopojok dengan cara menormalisasi dan membangun Bozem Tlogopojok agar dapat digunakan sebagai tampungan air banjir.

5. Sistem Kali Tutup Barat

Batas sistem Kali Tutup Barat tidak mengalami perubahan dengan luas CA 44,14 Ha, saluran-saluran pada Sistem Kali Tutup Barat yang perlu ditangani meliputi :

- a. Saluran Tersier : Dari 11 saluran dengan panjang 2.021m tersier yang ada, 9 saluran tersier perlu dilakukan normalisasi sedang 2 saluran masih dapat menggunakan dimensi yang lama yaitu pada Saluran Akhim Khayat dan Saluran Karang Poh dengan rencana kebutuhan untuk SJDT 4 saluran dan panjang 1.400m
- b. Saluran Sekunder : Panjang 3 saluran sekunder 903m, Saluran Tratee masih mencukupi untuk menampung debit banjir rencana sedang saluran Sekunder Kemuteran dan Saluran Sukodono perlu dinormalisasi agar dapat mengalirkan debit banjir rencana dengan periode ulang 5 tahun.
- c. Saluran Primer : Panjang saluran Kali Tutup Barat 347 m, dimensinya masih belum mencukupi untuk mengalirkan debit banjir rencana.

Kondisi tersebut diatas berlaku bila tidak ada pengaruh air pasang di bagian hilir, sehingga untuk mengantisipasi air pasang yang datangnya bersamaan dengan air banjir dari hulu maka saat ini telah dipasang rumah pompa pada hilir Kali Tutup Barat dengan jumlah $3 \times 1 \text{ m}^3/\text{dt}$ dengan dilengkapi pintu air.

6. Sistem Kali Tutup Timur

Sistem Kali Tutup Timur mempunyai luas CA 80.24Ha, pada kondisi rencana ini mengalami perubahan karena direncanakan menerima limpasan dari Bozem Tlogodendo sebesar 1/3 debit banjir yang masuk ke bozem ($1/3 \times 12,26 = 4,09 \text{ m}^3/\text{dt}$) sehingga di beberapa ruas saluran pada Sistem Kali Tutup Timur perlu disesuaikan dengan adanya tambahan debit tersebut, saluran-saluran pada Sistem Kali Tutup Timur yang perlu ditangani meliputi :

- a. Saluran Tersier : Dari 8 saluran tersier dengan panjang 1.958m yang ada hanya 1 saluran yang dimensi eksistingnya masih mencukupi untuk menerima debit banjir rencana yaitu Saluran GNI, sedang 7 saluran lainnya perlu dilakukan normalisasi sesuai debit banjir rencana yang harus dialirkan. Direncanakan kebutuhan SJDT yaitu 8 saluran

- dengan panjang 2.800m sehingga perlu tambahan panjang saluran 842m.
- b. Saluran Sekunder : ada 2 saluran sekunder dengan panjang saluran sekunder 1.035m, yang perlu dinormalisasi adalah Saluran Sidokumpul sedangkan Saluran Tlogobendung masih mencukupi meskipun menerima tambahan debit dari bozem Tlogodendo.
- c. Saluran Primer : Kali Tutup Timur mempunyai panjang saluran 1.230m dimana dimensinya masih belum mencukupi untuk mengalirkan debit banjir rencana sehingga perlu dinormalisasi di beberapa ruas saluran yang tidak sesuai dengan dimensi rencananya.

Kondisi tersebut diatas berlaku bila tidak ada pengaruh air pasang di bagian hilir, sehingga untuk mengantisipasi air pasang yang datangnya bersamaan dengan air banjir dari hulu maka saat ini telah dipasang rumah pompa pada hilir Kali Tutup Timur dengan jumlah $3 \times 1 \text{ m}^3/\text{dt}$ dengan dilengkapi pintu air.

7. Sistem Drainase Jl. Yos Sudarso

Batas sistem Drainase Jl. Yos Sudarso tidak mengalami perubahan dengan luas CA 46.77 Ha, saluran-saluran pada Sistem Drainase Jl. Yos Sudarso yang perlu ditangani meliputi :

- a. Saluran Tersier : Dari 4 saluran tersier yang ada dan panjangnya 1.509m, 3 saluran tersier perlu dilakukan normalisasi sedangkan 1 diantaranya masih dapat menggunakan dimensi yang lama yaitu Saluran Basuki Rahmat. Kebutuhan untuk SJDT direncanakan yaitu 5 saluran dengan panjang 1.750m sehingga dibutuhkan tambahan saluran tersier baru 1 dan panjang 241m.
- b. Saluran Sekunder : Saluran Yos Sudarso dengan panjang 925m perlu dilakukan normalisasi agar mampu menampung debit banjir rencana, sedangkan pada hilir saluran menggunakan dimensi yang lama.

8. Sistem Drainase Tlogo Dendo

Luas CA Sistem Drainase Tlogo Dendo 300.75Ha, aliran yang masuk ke dalam Bozem Tlogo Dendo akan dialirkan menuju ke gorong-gorong di sebelah Timur Bozem menuju Saluran Tlogodendo (2/3Q) dan ke utara menuju Sistem Kali Tutup Timur (1/3Q).

Saluran tidak mengalami perubahan berubah dengan anggapan menerima aliran dari Bozem Tlogodendo, saluran-saluran pada Sistem Drainase Tlogo Dendo yang perlu ditangani meliputi :

- a. Saluran Tersier : Panjang dari 18 saluran tersier adalah 8.019m, 9 diantaranya perlu normalisasi dan 6 saluran menggunakan dimensi saluran lama dan 3 lainnya dimensi minimal yang digunakan. Direncanakan kebutuhan SJDT 30 saluran dengan panjang 10.500m sehingga dibutuhkan 12 saluran dengan panjang 2.481m.
- b. Saluran Sekunder : Ada 5 saluran sekunder dengan panjang 2.977m, untuk Saluran Sidokumpul menggunakan dimensi lama, sedangkan Saluran Sumur Songo perlu normalisasi.
- c. Saluran Primer : Dengan panjang saluran 827m Saluran Pulo Pancikan perlu normalisasi supaya mampu mengalirkan debit rencana. Direncanakan rumah pompa dan pintu air yang akan dipasang dihilirnya.

Untuk Saluran Tlogodendo direncanakan menerima debit air dari Boezem Tlogodendo sebanyak $2/3Q$ dengan menggunakan dimensi lama, sehingga gorong-gorong yang menuju ke arah Timur (ke Saluran Tlogodendo) perlu dinormalisasi dengan dimensi diameter 1,4 m sebanyak 2 buah ($2 \times \square 1,4$ m). Sedang yang menuju ke Sistem Kali Tutup Timur menerima aliran sebesar $1/3Q$ sehingga dibutuhkan 2 buah gorong-gorong dengan diameter 1,1 m ($2 \times \square 1,4$ m). Bozem Tlogodendo perlu dilakukan pengerukan, di bagian hilir Saluran Pulopancikan perlu dipasang rumah pompa dengan kapasitas pompa $3 \times 1,5$ m³/dt dan $1 \times 1,0$ m³/dt serta pompa lumpur $1 \times 0,25$ m³/dt.

10. Sistem Drainase Pelabuhan Semen

Batas sistem Drainase Pelabuhan Semen tidak mengalami perubahan dan luas CA 59,85 Ha, saluran-saluran pada Sistem Drainase Pelabuhan Semen yang perlu ditangani meliputi :

- a. Saluran Tersier : Panjang saluran 2.725m untuk Saluran Kapten Dulasim 4 perlu normalisasi, sedangkan 4 saluran tersier lainnya menggunakan dimensi lama. Direncanakan kebutuhan SJDT panjang saluran 2.100m dengan jumlah 6 saluran sehingga diperlukan 1 saluran tambahan.
- b. Saluran Sekunder : Saluran Guest House dan Saluran Ibrahim Zahir masih mampu mengalirkan debit rencana sehingga dimensi lama yang digunakan dengan panjang salurannya 1.481m.
- c. Saluran Primer : Panjang saluran 337m, Saluran Pelabuhan Semen perlu di normalisasi agar mampu mengalirkan debit rencana.

11. Sistem Drainase Sidorukun

Luas CA Sistem Drainase Sidorukun 19.91 Ha dan batas sistem tidak mengalami perubahan, saluran-saluran pada Sistem Drainase Sidorukun yang perlu ditangani meliputi :

- a. Saluran Tersier : Pada dasarnya saluran yang ada telah mencukupi kapasitasnya, banjir yang terjadi disebabkan permukiman yang lokasinya lebih rendah daripada jalan PT. Marina. Panjang saluran 628m dan kebutuhan rencan SJDT 2 saluran dengan panjang 700m sehingga diperlukan tambahan panjang 72m.
- b. Saluran Sekunder : Dimensi saluran eksisting dari Saluran Sidorukun masih mampu mengalirkan debit banjir rencana dengan panjang 325m.

12. Sistem Kali Indro

Luas CA Sistem Kali Indro 259,69 Ha batas sistem tidak mengalami perubahan, saluran-saluran pada Sistem Kali Indro yang perlu ditangani meliputi :

- a. Saluran Tersier : Panjang saluran 6.219m dari 21 saluran tersier yang ada 17 diantaranya perlu normalisasi, sedangkan 5 diantaranya masih mampu mengalirkan debit rencana sehingga dimensi lama yang digunakan. Tambahan saluran tersier baru 5 saluran dengan panjang 2.881m untuk memnuhi kebituhan SJDT yang perlu 26 saluran dengan panjang 9.100m.
- b. Saluran Sekunder : Ada 4 saluran dengan panjang seluruhnya 784m, Saluran Darmo Sugondo dan Saluran Veteran menggunakan dimensi lama, sedangkan Saluran A. Yani 1 dan Saluran Awikoen perlu normalisasi.
- c. Saluran Primer : Saluran Kali Indro di hilir masih mampu mengalirkan debit rencana dan unruk ruas berikutnya perlu normalisasi hingga hulu Saluran Kali Indro dengan panjang saluran 2.648m.

13. Sistem Drainase Tenggulunan

Batas sistem Drainase Tenggulunan tidak mengalami perubahan dan luas CA 40,24 Ha, saluran-saluran pada Sistem Drainase Tenggulunan yang perlu ditangani meliputi :

- a. Saluran Tersier : Panjang saluran 1.453m dari 5 saluran tersier 4 diantaranya perlu normalisasi sedangkan untuk Saluran Karangkering Utara dan Selatan menggunakan dimensi lama. Direncanakan untuk memenuhi kebutuhan SJDT 4 dengan panjang 1.400m.
- b. Saluran Sekunder : Saluran Karangkering 2 dan Karangkering 3 perlu normalisasi dengan panjang 69m.
- c. Saluran Primer : Panjang Saluran Karangkering 1 634m dan masih mampu mengalirkan debit renana sehingga dimensi lama yang digunakan.

14. Sistem Drainase Karangkering

Batas sistem Drainase Karangkering tidak mengalami perubahan mempunyai luas CA 22,19 Ha, saluran-saluran pada Sistem Drainase Sidorukun yang perlu ditangani meliputi :

- a. Saluran Tersier : Panjang saluran 752m, ada 4 saluran yang perlu normalisasi dan 1 saluran yang menggunakan dimensi yang lama. Direncanakan untuk kebutuhan SJDT diperlukan 2 saluran dengan panjang 700m.
- b. Saluran Sekunder : Saluran Karangkering 9B dan Saluran Karangkering 10A masih mencukupi dan mampu mengalirkan debit rencana dengan panjang saluran 159m.
- c. Saluran Primer : Saluran Karangkering 2 masih mencukupi dan mampu mengalirkan debit rencana yang mempunyai panjang 395m.

15. Sistem Drainase Segoromadu 1

Batas sistem Drainase Segoromadu 1 tidak mengalami perubahan dan luas CA 81,27 Ha, saluran-saluran pada Sistem Drainase Segoromadu 1 yang perlu ditangani meliputi :

- a. Saluran Tersier : Ada 3 saluran yang perlu dinormalisasi dan 1 lainnya masih mencukupi dan mampu mengalirkan debit rencana periode ulang 5 tahun dengan panjang saluran seluruhnya 559m, direncanakan untuk kebutuhan SJDT diperlukan 8 saluran dengan panjang 2.800m sehingga perlu tambahan tersier baru sebanyak 4 saluran dengan panjang 2.241m.
- b. Saluran Sekunder : Saluran Segoromadu perlu normalisasi sepanjang 1.237m.

16. Sistem Drainase Veteran

Batas sistem Drainase Veteran tidak mengalami perubahan dan luas CA 35,43Ha, saluran-saluran pada Sistem Drainase Veteran yang perlu ditangani meliputi :

- a. Saluran Tersier : Ada 4 saluran yang perlu normalisasi dengan panjang keseluruhan 1.823m dan direncanakan untuk kebutuhan SJDT 4 saluran dengan panjang 1.400m.
- b. Saluran Sekunder : panjang saluran 1.269m dengan Saluran Veteran Timur di ruas 1 masih mencukupi dan mampu mengalirkan debit rencana, sedangkan ruas 2 merupakan hulu saluran dan setelah perempatan lampu merah pabrik Nippon paint merupakan hilir saluran.

17. Sistem Drainase Segoromadu 2

Luas CA 149,31 Ha dan batas sistem Drainase Segoromadu 2 tidak mengalami perubahan, saluran-saluran pada Sistem Drainase Segoromadu 2 yang perlu ditangani meliputi :

- a. Saluran Tersier : Panjang keseluruhan saluran 2.441m dari 7 saluran yang ada 5 diantaranya perlu normalisasi sedangkan 2 lainnya masih mencukupi dan mampu mengalirkan debit rencana. Direncanakan untuk kebutuhan SJDT 15 saluran dengan panjang 5.250m sehingga diperlukan tambahan saluran sebanyak 8 dengan panjang saluran 2.809m.
- b. Saluran Sekunder : Saluran Ngargosari masih mencukupi dan mampu mengalirkan debit rencana, sedangkan Saluran Segoromadu ruas 1 dan 2 perlu pengerukan. Untuk ruas 3 masih mencukupi dan mampu mengalirkan debit rencana dengan panjang keseluruhan saluran 2.395m.
- c. Saluran Primer : Saluran Segoromadu perlu normalisasi sepanjang 193m.

18. Sistem Drainase Segoromadu 3

Batas sistem Drainase Segoromadu 3 tidak mengalami perubahan dan untuk luas CA 78,90 Ha, saluran-saluran pada Sistem Drainase Segoromadu 3 yang perlu ditangani meliputi :

- a. Saluran Tersier : Panjang keseluruhan saluran 1.784m dari 6 saluran tersier yang ada 4 diantaranya masih mencukupi dan mampu mengalirkan debit rencana sedangkan 2 saluran lainnya hanya perlu normalisasi. Diperlukan tambahan saluran tersier baru 2 dengan panjang 1.016m untuk memnuhi rencana kebutuhan SJDT dengan jumlah saluran 8 dan panjang 2.800m.
- b. Saluran Sekunder : Saluran Mayjen Sungkono Barat mencukupi dan mampu mengalirkan debit rencana, dan Saluran Mayjen Sungkono Selatan perlu normalisasi luas keseluruhan saluran 508m.
- c. Saluran Primer : Saluran Segoromadu 3 perlu normalisasi dengan panjang 318m.

19. Sistem Drainase Gulomantung

Batas sistem Drainase Gulomantung tidak mengalami perubahan dengan luas CA 441,40 Ha, saluran-saluran pada Sistem Drainase Gulomantung yang perlu ditangani meliputi :

- a. Saluran Tersier : Panjang keseluruhan saluran 7.055m dari 12 saluran yang ada 6 diantaranya perlu normalisasi sedangkan 6

lainnya dimensi saluran lama masih mampu dan mencukupi untuk mengalirkan debit banjir rencana. Diperlukan tambahan Tersier baru 32 saluran dengan panjang 8.345m untuk memenuhi rencana kebutuhan SJDT 44 saluran dengan panjang 15.400m.

- b. Saluran Sekunder : Saluran Sekarkurung perlu normalisasi, dan Saluran Makam Gulomantung ruas 1 dan ruas 3 dimensi lama mampu dan mencukupi untuk mengalirkan debit, panjang seluruhnya 4.353m.
- c. Saluran Primer : Panjang keseluruhan 446m, Saluran Gulomantung ruas 1 menggunakan dimensi lama karena masih mencukupi dan mampu mengalirkan debit rencana, sedangkan pada ruas 2 perlu normalisasi.

Direncanakan bozem, pembangunan rumah pompa dan pintu air di hilir Saluran Gulomantung sebelum bermuara di Kali Lamong. Direncanakan bozem seluas 1,0 Ha dan kapasitas pompa yang akan dipasang 3 x 1.5 m³/dt dan 1 x 1.0 m³/dt serta pompa lumpur 1 x 0,25 m³/dt.

20. Sistem Drainase Timur Tol – Kali Lamong

Batas sistem Drainase Timur Tol-Kali Lamong tidak mengalami perubahan, dengan luas CA 149,87 Ha. Saluran-saluran pada Sistem Drainase Timur Tol-Kali Lamong yang perlu ditangani meliputi :

- a. Saluran Tersier : Dari 8 saluran tersier dengan panjang 3.208m yang ada 4 diantaranya perlu normalisasi sedangkan 4 saluran lainnya menggunakan dimensi lama karena masih mencukupi dan mampu mengalirkan debit rencana. Diperlukan tambahan Tersier 7 saluran dengan panjang 2.042m guna memenuhi kebutuhan rencana SJDT 15 saluran dengan panjang keseluruhan 5.250m.
- b. Saluran Sekunder : Panjang total saluran 2.467m, Saluran Kedanyang ruas 1 sampai ruas 3 masih mencukupi dan mampu mengalirkan debit rencana sehingga dimensi lama yang digunakan, pada ruas 4 dan ruas 5 perlu normalisasi saluran, untuk saluran Prambangan juga perlu normalisasi.
- c. Saluran Primer : Saluran Timur Tol – Kali Lamong perlu normalisasi agar mampu mengalirkan debit rencana dengan panjang 335m.

21. Sistem Drainase Barat Tol – Kali Lamong

Batas sistem Drainase Barat Tol-Kali Lamong mengalami perubahan dengan berkurangnya debit air yang diterima karena diarahkan ke Saluran

Drainase Banjaranyar 2, luas CA eksisting 224,02 Ha setelah sebagian CA masuk ke Sistem Drainase Banjaranyar 2 luas CA berkurang menjadi 136 Ha. Saluran-saluran pada Sistem Drainase Barat Tol-Kali Lamong yang perlu ditangani meliputi :

- a. Saluran Tersier : Kondisi eksisting ada 8 saluran dengan panjang 2.343m setelah ada perubahan rencana saluran tersier menjadi 3 saluran 2 diantaranya saluran yang perlu normalisasi dan 1 saluran lainnya masih mencukupi dan mampu mengalirkan debit rencana. Direncanakan untuk memenuhi kebutuhan SJDT 22 saluran dengan panjang 7.700m diperlukan tambahan Tersier baru 19 saluran dan panjangnya 6.709m.
- b. Saluran Sekunder : Kondisi eksisting ada 3 saluran sekunder dengan panjang saluran 1.890m, setelah terjadi perubahan rencana saluran sekunder menjadi 2 dengan panjang saluran 1.061. Dan Saluran Tol Bunder Timur dan Saluran Mayjen Sungkono 3 perlu normalisasi agar mampu mengalirkan debit rencana.
- c. Saluran Primer : Saluran Barat Tol – Kali Lamong perlu normalisasi agar mampu mengalirkan debit rencana dengan panjang 1.292m.

22. Sistem Drainase Kedayang

Batas sistem Drainase Kedayang tidak mengalami perubahan, dengan luas CA 332,18 Ha. Saluran-saluran pada Sistem Drainase Kedayang yang perlu ditangani meliputi :

- a. Saluran Tersier : Panjang keseluruhan saluran 1.716m dari 6 saluran yang ada 5 diantaranya perlu normalisasi sedangkan 1 lainnya dimensi saluran lama masih mampu dan mencukupi untuk mengalirkan debit banjir rencana. Diperlukan tambahan Tersier baru 27 saluran dengan panjang 9.834m untuk memenuhi rencana kebutuhan SJDT 33 saluran dengan panjang 11.550m.
- b. Saluran Sekunder : Panjang total saluran 920m. Saluran Prambangan Selatan Saluran dan Griya Karya Giri Asri perlu normalisasi.
- c. Saluran Primer : Saluran Kedayang perlu normalisasi agar mampu mengalirkan debit rencana dengan panjang 1292m.

23. Sistem Drainase Banjaranyar 1

Batas sistem Drainase Banjaranyar 1 tidak mengalami perubahan dengan luas CA 240,57 Ha. Saluran-saluran pada Sistem Drainase Banjaranyar 1 yang perlu ditangani meliputi :

- a. Saluran Tersier : Panjang keseluruhannya 1.336m, dan dari 7 saluran yang ada 3 diantaranya perlu normalisasi dan 3 lainnya masih mencukupi sehingga menggunakan dimensi lama sedangkan 1 saluran memerlukan pengerukan. Diperlukan tambahan Tersier baru 17 saluran dengan panjang 7.064m untuk memenuhi rencana kebutuhan SJDT 24 saluran dengan panjang 8.400m.
- b. Saluran Sekunder : Panjang keseluruhannya 566m, Saluran Kedayang Barat masih mencukupi dan mampu menampung debit rencana, sedangkan Saluran Kedayang Utara perlu normalisasi.
- c. Saluran Primer : Saluran Banjaranyar 1 perlu normalisasi agar mencukupi debit rencana dengan panjang saluran 2.235m.

24. Sistem Drainase Banjaranyar 2

Batas sistem Drainase Banjaranyar 2 mengalami perubahan dengan bertambahnya debit air yang diterima dari Sistem Drainase Barat Tol-Kali Lamong dan Sistem Banjaranyar 1 sehingga luas CA menjadi 187,68 Ha. Saluran-saluran pada Sistem Drainase Banjaranyar 2 yang perlu ditangani meliputi :

- a. Saluran Tersier : Kondisi eksisting ada 8 saluran dengan panjang 2.083m setelah ada perubahan rencana saluran tersier menjadi 12 saluran 11 diantaranya saluran yang perlu normalisasi dan 1 saluran lainnya masih mencukupi dan mampu mengalirkan debit rencana. Untuk Saluran Sapphire Barat mendapat tambahan luas daerah tangkapan dari Sistem Banjaranyar 1. Direncanakan untuk memenuhi kebutuhan SJDT 19 saluran dengan panjang 6.650m diperlukan tambahan Tersier baru 7 saluran dan panjangnya 2.714m.
- b. Saluran Sekunder : Kondisi eksisting ada 3 saluran dengan panjang 402m setelah ada perubahan rencana saluran sekunder menjadi 2 saluran dengan panjang saluran 783m. Saluran Graha Bunder Asri ruas 1 perlu normalisasi dan ruas 2 mengalami peningkatan dari saluran tersier menjadi saluran sekunder dan arahnya dibalik, dan merupakan gabungan luas Catchment Area dari Sal.Tol

Bunder Barat ruas 2 dan ruas 3. Saluran Kembangan perlu normalisasi.

- c. Saluran Primer : Kondisi eksisting ada 1 saluran dengan panjang 257m setelah ada perubahan rencana saluran primer menjadi 2 dengan panjang 1.582m. Saluran Kantor Bupati Selatan perlu normalisasi, pada ruas 3 merupakan saluran baru.

Di Sistem Drainase Banjaranyar 2 direncanakan akan dibangun 2 dibelakang Kantor PU, Rumah Pompa PU (Rumah Pompa Banjaranyar 1) akan mengalirkan aliran dari sebagian Perumahan Bunder Utara dan sebagian wilayah di belakang PU yang mengalami peningkatan untuk long storage dan Rumah Pompa Kabupaten (Rumah Pompa Banjaranyar 2) direncanakan menerima limpasan dari selatan dan aliran dari Saluran Kantor Bupati 1 digabungkan ke Saluran Primer Kantor Bupati Selatan untuk selanjutnya dipompa ke Waduk Banjaranyar. Masing-masing rumah pompa akan dipasang pompa dengan kapasitas $2 \times 1,0 \text{ m}^3/\text{dt}$ dan $1 \times 0,5 \text{ m}^3/\text{dt}$ serta pompa lumpur $1 \times 0,25 \text{ m}^3/\text{dt}$.

25. Sistem Drainase Tebalo

Luas CA 929,76 Ha dan batas Sistem Drainase Tebalo mengalami tidak perubahan, saluran-saluran pada Sistem Drainase Tebalo yang perlu ditangani meliputi :

- a. Saluran Tersier : Dari 13 saluran yang ada 10 diantaranya perlu normalisasi dan 3 lainnya masih mencukupi sehingga menggunakan dimensi lama dengan panjang saluran total 5.463m, diperlukan tambahan saluran tersier 80 dan panjangnya 27.087m untuk memenuhi rencana kebutuhan SJDT 93 saluran dengan panjang 32.550m.
- b. Saluran Sekunder : Saluran Dahanrejo, Saluran KH Syafi'i, Saluran Permata Suci dan Saluran Sepuran perlu normalisasi dengan panjang total saluran 6.726m.
- c. Saluran Primer : Panjang Saluran Tebalo 2.800m ruas 1 sampai ruas 3 perlu normalisasi dan pada ruas 4 masih mencukupi dan mampu mengalirkan debit rencana sehingga dimensi lama yang digunakan.

26. Sistem Drainase Kali Manyar 1

Batas sistem Drainase Kali Manyar 1 mengalami tidak perubahan dengan luas CA 600,05 Ha, saluran-saluran pada Sistem Drainase Kali Manyar 1 yang perlu ditangani meliputi :

- a. Saluran Tersier : Pada kondisi eksisting jumlah saluran 5 dengan panjang 3.747m, setelah ada perencanaan terjadi perubahan menjadi 4 saluran dengan panjang 2.785m karena adanya peningkatan jenis saluran dimana Saluran

Banjarsari Selatan 1 semula saluran tersier menjadi saluran sekunder dan alirannya menuju Kali Manyar. Dibutuhkan tambahan saluran tersier baru 56 dengan panjang 18.215m untuk memenuhi rencana kebutuhan SJDT 60 dengan panjang 21.000m.

- b. Saluran Sekunder : Pada kondisi eksisting ada 2 saluran yaitu Saluran Banjarsari dan Saluran Banjarsari Selatan perlu normalisasi, dalam perencanaan bertambah menjadi 3 saluran dengan panjang 3.734m.

27. Sistem Drainase Kali Manyar 2

Luas CA Sistem Drainase Kali Manyar 2 498,16 Ha, untuk batas sistem tidak mengalami perubahan, saluran-saluran pada Sistem Drainase Kali Manyar 2 yang perlu ditangani meliputi :

- a. Saluran Tersier : Pada kondisi eksisting terdapat 14 saluran 2 diantaranya masih mampu dan mencukupi untuk menampung dan mengalirkan debit rencana, sedangkan yang 12 lainnya perlu normalisasi. Dibutuhkan tambahan Tersier baru 36 saluran dengan panjang 13.572m untuk memenuhi perencanaan kebutuhan SJDT 60 saluran dengan panjang 17.500m.
- b. Saluran Sekunder : Terdapat 3 saluran sekunder eksisting yaitu Saluran Tol Manyar Selatan, Saluran Suci, dan Saluran Alam Bukit raya perlu normalisasi. Sedangkan dalam perencanaan terjadi perubahan menjadi 4 saluran yaitu Saluran Tol Pongangan dengan panjang keseluruhan 4.154m.
- c. Saluran Primer : Saluran Timur Tol Manyar perlu normalisasi sepanjang 2.384m.

Rencana untuk Sistem Kali Manyar 2 adalah pada Saluran Alam Bukit Raya akan ditembuskan menuju Saluran Tol Manyar dan membuat Saluran Sekunder Pongangan Tol yang dan menerima aliran dari Saluran Tersier Pongangan 1 dan Pongangan 2 menuju Saluran Primer Timur Tol Manyar.

7.9.2. SISTEM DRAINASE LAINNYA

A. Sistem Drainase Kali Tengah Barat

Luas CA di Sistem Drainase Kali Tengah Barat 3,63 Ha dengan panjang 242m dimana saluran masih mencukupi dan mampu mengalirkan debit rencana sehingga dimensi lama yang digunakan, perlu tambahan saluran tersier sepanjang 108m untuk memenuhi rencana SJDT 350m dan dibuatkan pintu air yang ditempatkan dihilir Kali Tengah Barat.

B. Sistem Drainase Kali Tengah Timur

Luas CA di Sistem Drainase Kali Timur 14,50 Ha dengan batas sistem tidak mengalami perubahan, saluran-saluran pada Sistem Drainase Kali Tengah Timur yang perlu ditangani meliputi :

- a. Saluran Tersier : Ada 4 saluran yang perlu normalisasi dengan panjang 553m, kebutuhan SJDIT rencana yaitu 1 saluran dengan panjang 350m.
- b. Saluran Sekunder : Kondisi eksisting Saluran Kali Tengah Timur ruas 1 mampu dan masih mencukupi untuk menampung debit rencana sedangkan ruas 2 dan ruas 3 perlu normalisasi, dengan panjang saluran 411m.

Rencana untuk Sistem Kali Tengah Timur yaitu akan dipasang pintu air di hilir Kali Tengah Timur untuk mengatasi banjir yang diakibatkan pasang surut air laut.

C. Sistem Drainase TPI

Di Sistem Drainase TPI dengan luas CA 1,5 Ha salurannya masih mencukupi dan mampu mengalirkan debit rencana sehingga dimensi lama yang digunakan dengan panjang saluran tersier 753m, untuk memenuhi kebutuhan SJDIT rencana diperlukan 1 saluran dengan panjang 350m. Direncanakan pemasangan pintu air di hilir Saluran TPI untuk mengatasi banjir akibat pasang surut air laut yang terjadi dan mengakibatkan sering terjadinya banjir di daerah tersebut.

D. Sistem Telaga Kembangan

Luas CA di Sistem Telaga Kembangan 28,03 Ha, salurannya masih mencukupi dan mampu mengalirkan debit rencana sehingga dimensi lama yang digunakan. Diperlukan tambahan Saluran Tersier baru 3 dengan panjang saluran 1050m untuk memenuhi rencana kebutuhan SJDIT.

E. Sistem Telaga Dowo

Luas CA di Sistem Telaga Dowo 79,91 Ha dengan batas sistem tidak mengalami perubahan, saluran-saluran pada Sistem Telaga Dowo yang perlu ditangani meliputi :

- a. Saluran Tersier : Ada 4 saluran yang perlu normalisasi dengan panjang 2.347m dan kebutuhan rencana SJDIT 8 saluran dengan panjang keseluruhan 2.8200m sehingga diperlukan tambahan saluran tersier sepanjang 453m jumlahnya 4.
- b. Saluran Sekunder : Saluran Griya Kembangan Asri 1 perlu di normalisasi sepanjang 625m.

F. Sistem Drainase PJB 1

Luas CA 44,61 Ha, tambahan saluran 4 dengan panjang saluran 1.400m untuk memenuhi kebutuhan SJDIT rencana. Dalam perhitungan biaya Program

Jangka Panjang tidak di analisa karena berada dalam lingkungan PJB dan menjadi tanggung jawab PJB.

G. Sistem Drainase PJB 2

Luas CA 28,22 Ha, diperlukan tambahan saluran 3 sepanjang 1.050m untuk memenuhi kebutuhan SJDT rencana. Dalam perhitungan biaya Program Jangka Panjang tidak di analisa karena berada dalam lingkungan PJB dan menjadi tanggung jawab PJB.

H. Sistem Drainase Marina

Luas CA 27,92 Ha, diperlukan tambahan saluran 3 sepanjang 1.050m untuk memenuhi kebutuhan SJDT rencana. Dalam perhitungan biaya Program Jangka Panjang tidak di analisa karena berada dalam lingkungan PT. Marina Shipyard dan menjadi tanggung jawab mereka.

I. Sistem Drainase Galangan

Luas CA 41,21 Ha, diperlukan 4 saluran tersier untuk memenuhi kebutuhan SJDT dengan panjang total saluran 1400m. Semua saluran tersebut dialirkan menuju Kali Lamong.

J. Sistem Drainase Sukorejo

Luas CA Sistem Drainase Sukorejo 14,01 Ha dengan batas sistem tidak berubah, saluran-saluran pada Sistem Drainase Sukorejo yang perlu ditangani meliputi 5 saluran tersier yang perlu dinormalisasi dengan panjang 1.135 m, Banjir sering terjadi akibat pengaruh dari debit Kali Lamong yang tinggi saat hujan akan masuk ke perkampungan yang terletak dipinggir Kali Lamong. Tidak dibutuhkan tambahan saluran tersier.

K. Sistem Drainase Kali Manyar 3

Luas CA Sistem Drainase kali Manyar 39,88 Ha dengan batas sistem tidak mengalami perubahan, saluran-saluran pada Sistem Drainase Kali Manyar 3 yang perlu ditangani meliputi :

- a. Saluran Tersier : 2 saluran yang masih mencukupi untuk mengalirkan debit rencana sehingga dimensi lama masih digunakan dengan panjang 657m. Diperlukan tambahan 2 saluran dengan panjang total 743m untuk memenuhi rencana kebutuhan SJDT sebanyak 4 saluran dengan panjang 1.400m.
- b. Saluran Sekunder : Saluran Manyar Sidomukti masih memenuhi dan mencukupi untuk mengalirkan debit rencana dengan panjang 1.020m.

L. Sistem Kali Manyar 4

Luas CA Sistem Kali Manyar 4.655,51 Ha, diperlukan tambahan saluran tersier 66 saluran dengan total panjang 23.100m untuk memenuhi kebutuhan rencana SJDT.

7.10. ARAHAN BUKU PUTIH SANITASI

7.10.1. Strategi Penanganan Sanitasi Kabupaten Gresik

Strategi penanganan sanitasi di Kabupaten Gresik merupakan arahan kebijakan dari misi sanitasi yang telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan misi **Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pelayanan air bersih dan sanitasi kepada masyarakat untuk dapat hidup bersih dan sehat**, maka ditetapkan strategi :
 - Peningkatan koordinasi dan keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan perencanaan sehingga peningkatan program pelayanan sanitasi kepada masyarakat dapat terwujud
 - Peningkatan kualitas SDM dibidang sanitasi baik aparat pemerintah , masyarakat dan kelompok masyarakat serta pihak-pihak lain yang berkepentingan
 - Peningkatan sistem informasi, komunikasi sanitasi kabupaten Gresik sebagai upaya untuk mempermudah penyampaian konsep sanitasi kepada seluruh lapisan masyarakat
 - Peningkatan sistem administrasi dibidang sanitasi lingkungan agar tahapan pelaksanaan dapat terdokumentasi, termonitor sebagai laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kemajuan pembangunannya
2. Untuk mewujudkan misi **Mewujudkan penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan yang memadai bagi kepentingan masyarakat**, maka ditetapkan strategi :
 - Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi kepada masyarakat secara bertahap
 - Peningkatan upaya pemeliharaan fasilitas sanitasi dan air bersih agar tidak terjadi gangguan sistem pada yang dapat merugikan masyarakat
 - Peningkatan mutu pelayanan sanitasi dan air minum I(kualitas dan kuantitas) melalui perbaikan sistim jaringan sanitasi (jaringan drainase, air bersih, air limbah dan jaringan persampahan) ;
 - Peningkatan upaya pelestarian, perlindungan dan penyelamatan sumber daya air untuk keberlanjutan penyediaan cadangan air
3. Untuk mewujudkan misi **Mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengutamakan kondisi sanitasi lingkungan**, maka strategi yang ditetapkan
 - Peningkatan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat melalui jalur pendidikan dan organisasi

- Mewujudkan kondisi sanitasi lingkungan yang memenuhi standar kehidupan secara mandiri
- 4. Untuk mewujudkan misi Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerjasama pihak swasta untuk dapat terpadu, bersinergi dalam mewujudkan sanitasi yang bersih dan sehat, maka strategi yang ditetapkan adalah
 - Peningkatan sistem koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain pembentukan forum-forum komunikasi sanitasi lingkungan, forum kelompok-kelompok yang berkepentingan, pemerhati dan pecinta sanitasi dan lingkungan serta lembaga-lembaga donor /pembeayaan sanitasi dan pihak swasta
- 5. Untuk mewujudkan misi Mewujudkan keberlanjutan pelaksanaan program kegiatan sehingga pelaksanaan pembangunan sanitasi dapat dinikmati generasi mendatang, maka strategi yang ditetapkan
 - Penetapan perencanaan sanitasi jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek secara konsisten
 - Peningkatan upaya pembelajaran masyarakat terhadap perbaikan sanitasi secara kontinyu dan berkelanjutan

7.10.2. Rencana Peningkatan Pengelolaan Limbah Cair

Secara garis besar rencana peningkatan pengelolaan limbah cair sebagaimana misi

Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pelayanan air bersih dan sanitasi kepada masyarakat untuk dapat hidup bersih dan sehat , serta strategi :

- Peningkatan koordinasi dan keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan perencanaan sehingga peningkatan program pelayanan sanitasi kepada masyarakat dapat terwujud, melalui kegiatan
 - Koordinasi dalam perencanaan pengelolaan limbah cair yang meliputi kebijakan/peraturan penangan limbah cair, bentuk kegiatan dan lokasi serta pembiayaan
 - Penyusunan studi kajian pengelolaan limbah cair
- Peningkatan kualitas SDM dibidang sanitasi baik aparat pemerintah , masyarakat dan kelompok masyarakat serta pihak-pihak lain yang berkepentingan
 - Pendidikan dan Pelatihan serta kursus pengelolaan limbah cair
 - Pembinaan kelompok-kelompok masyarakat dan LSM
- Peningkatan sistem informasi, komunikasi sanitasi kabupaten Gresik sebagai upaya untuk mempermudah penyampaian konsep sanitasi kepada seluruh lapisan masyarakat
 - Pembuatan web. Pengelolaan limbah cair
 - Pembuatan majalah, leaflet dan poster sanitasi / pengelolaan limbah cair
- Peningkatan sistem administrasi dibidang sanitasi lingkungan agar tahapan pelaksanaan dapat terdokumentasi, termonitor sebagai laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kemajuan pembangunannya

- Penyusunan buku laporan pengelolaan limbah cair setiap triwulan atau semester

Untuk mewujudkan misi **Mewujudkan penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan yang memadai bagi kepentingan masyarakat**, maka ditetapkan strategi:

- Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi kepada masyarakat secara bertahap
 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) secara komunal di beberapa lokasi
 - Pembangunan MCK dan Septik Tank beberapa lokasi
 - Pembangunan IPLT pada setiap zona daerah pengembangan pemukiman
 - Penerapan Sanitasi berbasis masyarakat
- Peningkatan upaya pemeliharaan fasilitas sanitasi dan air bersih agar tidak terjadi gangguan sistem pada yang dapat merugikan masyarakat
 - Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan limbah cair
 - Pembinaan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas limbah cair
- Peningkatan mutu pelayanan sanitasi dan air minum (kualitas dan kuantitas) melalui perbaikan sistem jaringan sanitasi (jaringan drainase, air bersih, air limbah dan jaringan persampahan);
 - uji analisa laboratorium terhadap kualitas limbah cair secara rutin
 - perbaikan dan penambahan saluran limbah cair di beberapa wilayah
- Peningkatan upaya pelestarian, perlindungan dan penyelamatan sumber daya air untuk keberlanjutan penyediaan cadangan air
 - Sosialisasi dan pembinaan efisiensi penggunaan air dan memanfaatkan air limbah (recycle) sebagai media tumbuh beberapa ikan air tawar

Untuk mewujudkan misi **Mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengutamakan kondisi sanitasi lingkungan**, maka strategi yang ditetapkan

- Peningkatan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat melalui jalur pendidikan dan organisasi
 - Upaya pengelolaan limbah cair dimasukkan pada kurikulum pendidikan mulai SD sampai SMA
 - Pembinaan masyarakat tentang sistem pengelolaan limbah cair
- Mewujudkan kondisi sanitasi lingkungan yang memenuhi standar kehidupan secara mandiri
 - Kampanye pengelolaan limbah cair
 - Perbaikan saluran limbah cair masyarakat

Untuk mewujudkan misi **Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerjasama pihak swasta untuk dapat terpadu, bersinergi dalam mewujudkan**

sanitasi yang bersih dan sehat, maka strategi rencana kegiatan yang ditetapkan adalah

- Peningkatan sistem koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain pembentukan forum-forum komunikasi sanitasi lingkungan, forum kelompok kelompok yang berkepentingan, pemerhati dan pecinta sanitasi dan lingkungan serta lembaga-lembaga donor /pembeayaan sanitasi dan pihak swasta
 - Pembentukan forum komunikasi kelompok masyarakat, LSM pengelolaan limbah cair
 - Melakukan Kerjasama melalui CSR serta lembaga donor dalam pembangunan sarana limbah cair (MCK, Septik tank, IPAL Komunal dsb)

Untuk mewujudkan misi **Mewujudkan keberlanjutan pelaksanaan program kegiatan sehingga pelaksanaan pembangunan sanitasi dapat dinikmati generasi mendatang**, maka strategi yang ditetapkan

- Penetapan perencanaan sanitasi jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek secara konsisten
 - Pembelajaran dan penyusunan buku perencanaan pengelolaan limbah cair mulai dari wilayah Desa sampai Kabupaten pada berbagai kelompok dan organisasi
- Peningkatan upaya pembelajaran masyarakat terhadap perbaikan sanitasi secara kontinyu dan berkelanjutan
 - Penerapan kegiatan sanitasi berbasis masyarakat, melalui pengelolaan limbah cair secara swadaya

7.10.3. Rencana Peningkatan Pengelolaan Sampah (Limbah Padat)

Secara garis besar rencana peningkatan pengelolaan limbah cair sebagaimana misi

Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pelayanan air bersih dan sanitasi kepada masyarakat untuk dapat hidup bersih dan sehat , serta strategi :

- Peningkatan koordinasi dan keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan perencanaan sehingga peningkatan program pelayanan sanitasi kepada masyarakat dapat terwujud, melalui kegiatan
 - Koordinasi dalam perencanaan pengelolaan persampahan yang meliputi kebijakan/peraturan penanganan sampah, bentuk kegiatan dan lokasi serta pembiayaan
 - Penyusunan studi kajian pengelolaan sampah (limbah padat)
- Peningkatan kualitas SDM dibidang sanitasi baik aparat pemerintah , masyarakat dan kelompok masyarakat serta pihak-pihak lain yang berkepentingan
 - Pendidikan dan Pelatihan serta kursus pengelolaan limbah padat
 - Pembinaan kelompok-kelompok masyarakat dan LSM

- Peningkatan sistem informasi, komunikasi sanitasi kabupaten Gresik sebagai upaya untuk mempermudah penyampaian konsep sanitasi kepada seluruh lapisan masyarakat
 - Pembuatan web. Pengelolaan limbah padat (sampah)
 - Pembuatan majalah, leaflet dan poster tentang sampah / pengelolaan limbah padat
- Peningkatan sistem administrasi dibidang sanitasi lingkungan agar tahapan pelaksanaan dapat terdokumentasi, termonitor sebagai laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kemajuan pembangunannya
 - Penyusunan buku laporan pengelolaan limbah padat (persampahan) setiap triwulan atau semester

Untuk mewujudkan misi **Mewujudkan penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan yang memadai bagi kepentingan masyarakat**, maka ditetapkan strategi:

- Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi kepada masyarakat secara bertahap
 - Pembangunan TPA terpadu di beberapa lokasi (Gresik Utara, Gresik Selatan, Kota)
 - Pembangunan TPS dan Daur Ulang sampah beberapa lokasi
 - Pembangunan Depo /TPS pada setiap zona daerah pengembangan pemukiman
 - Penerapan Daur Ulang sampah dan Produksi Kompos pada masyarakat
- Peningkatan upaya pemeliharaan fasilitas sanitasi dan air bersih agar tidak terjadi gangguan sistem pada yang dapat merugikan masyarakat
 - Pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan sampah di TPA dan TPS
 - Pembinaan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
- Peningkatan mutu pelayanan sanitasi dan air minum (kualitas dan kuantitas) melalui perbaikan sistim jaringan sanitasi (jaringan drainase, air bersih, air limbah dan jaringan persampahan) ;
 - Penambahan armada dan peralatan persampahan untuk memluas area cakupan layanan
 - uji analisa laboratorium terhadap kualitas udara dan air limbah/ lindi di TPA
 - perbaikan dan penambahan lokasi TPS dan bantuan tong sampah di beberapa lokasi (sekolah, pasar, area umum)
- Peningkatan upaya pelestarian, perlindungan dan penyelamatan sumber daya air untuk keberlanjutan penyediaan cadangan air
 - Sosialisasi dan pembinaan pengelolaan sampah rumah tangga dan memanfaatkan limbah padat/ sampah (reuse, recycle dan recovery)

Untuk mewujudkan misi **Mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengutamakan kondisi sanitasi lingkungan**, maka strategi yang ditetapkan

- Peningkatan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat melalui jalur pendidikan dan organisasi
 - Upaya pengelolaan persampahan dimasukkan pada kurikulum pendidikan mulai SD sampai SMA
 - Pembinaan masyarakat tentang sistem pengelolaan limbah padat/sampah
- Mewujudkan kondisi sanitasi lingkungan yang memenuhi standar kehidupan secara mandiri
 - Kampanye pengelolaan limbah padat/sampah
 - Perbaikan sistem persampahan di masyarakat

Untuk mewujudkan misi **Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerjasama pihak swasta untuk dapat terpadu, bersinergi dalam mewujudkan sanitasi yang bersih dan sehat**, maka strategi rencana kegiatan yang ditetapkan adalah

- Peningkatan sistem koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain pembentukan forum-forum komunikasi sanitasi lingkungan, forum kelompok kelompok yang berkepentingan, pemerhati dan pecinta sanitasi dan lingkungan serta lembaga-lembaga donor /pembiayaan sanitasi dan pihak swasta
 - Pembentukan forum komunikasi kelompok masyarakat, LSM pengelolaan persampahan
 - Melakukan Kerjasama melalui CSR serta lembaga donor dalam pembangunan sarana pengelolaan sampah (Tong sampah, Gerobak, dump truk, container, TPS dsb)

Untuk mewujudkan misi **Mewujudkan keberlanjutan pelaksanaan program kegiatan sehingga pelaksanaan pembangunan sanitasi dapat dinikmati generasi mendatang**, maka strategi yang ditetapkan

- Penetapan perencanaan sanitasi jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek secara konsisten
 - Pembelajaran dan penyusunan buku perencanaan pengelolaan persampahan mulai dari wilayah Desa sampai Kabupaten pada berbagai kelompok dan organisasi
- Peningkatan upaya pembelajaran masyarakat terhadap perbaikan sanitasi secara kontinyu dan berkelanjutan
 - Penerapan kegiatan sanitasi berbasis masyarakat, melalui pengelolaan sampah secara swadaya

7.10.4. Rencana Peningkatan Pengelolaan Saluran Drainase Lingkungan

Secara garis besar rencana peningkatan pengelolaan limbah cair sebagaimana misi

Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pelayanan air bersih dan sanitasi kepada masyarakat untuk dapat hidup bersih dan sehat , serta strategi :

- Peningkatan koordinasi dan keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan perencanaan sehingga peningkatan program pelayanan sanitasi kepada masyarakat dapat terwujud, melalui kegiatan
 - Koordinasi dalam perencanaan pengelolaan saluran drainase yang meliputi kebijakan/peraturan drainase, bentuk kegiatan dan lokasi serta pembiayaan
 - Penyusunan studi kajian pengelolaan saluran drainase lingkungan
- Peningkatan kualitas SDM dibidang sanitasi baik aparat pemerintah , masyarakat dan kelompok masyarakat serta pihak-pihak lain yang berkepentingan
 - Pendidikan dan Pelatihan serta kursus pengelolaan drainase lingkungan
 - Pembinaan kelompok-kelompok masyarakat dan LSM
- Peningkatan sistem informasi, komunikasi sanitasi kabupaten Gresik sebagai upaya untuk mempermudah penyampaian konsep sanitasi kepada seluruh lapisan masyarakat
 - Pembuatan web. Pengelolaan saluran drainase lingkungan
 - Pembuatan majalah, leaflet dan poster tentang drainase dan permasalahannya
- Peningkatan sistem administrasi dibidang sanitasi lingkungan agar tahapan pelaksanaan dapat terdokumentasi, termonitor sebagai laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kemajuan pembangunannya
 - Penyusunan buku laporan pengelolaan saluran drainase lingkungan setiap triwulan atau semester

Untuk mewujudkan misi **Mewujudkan penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan yang memadai bagi kepentingan masyarakat**, maka ditetapkan strategi:

- Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi kepada masyarakat secara bertahap
 - Pembangunan saluran drainase lingkungan di beberapa lokasi (Gresik Utara, Gresik Selatan, Kota)
- Peningkatan upaya pemeliharaan fasilitas sanitasi dan air bersih agar tidak terjadi gangguan sistem pada yang dapat merugikan masyarakat
 - Pemeliharaan saluran drainase lingkungan
 - Pembinaan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan saluran drainase lingkungan
- Peningkatan mutu pelayanan sanitasi dan air minum (kualitas dan kuantitas) melalui perbaikan sistim jaringan sanitasi (jaringan drainase, air bersih, air limbah dan jaringan persampahan) ;
 - Penambahan saluran drainase lingkungan untuk memperluas area cakupan layanan
 - monitoring terhadap kualitas saluran drainase lingkungan
 - perbaikan dan penambahan saluran drainase di beberapa lokasi (sekolah, pasar, area umum)

- Peningkatan upaya pelestarian, perlindungan dan penyelamatan sumber daya air untuk keberlanjutan penyediaan cadangan air
 - Sosialisasi dan pembinaan pengelolaan saluran drainase lingkungan

Untuk mewujudkan misi **Mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengutamakan kondisi sanitasi lingkungan**, maka strategi yang ditetapkan

- Peningkatan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat melalui jalur pendidikan dan organisasi
 - Upaya pengelolaan saluran drainase lingkungan dimasukkan pada kurikulum pendidikan mulai SD sampai SMA
 - Pembinaan masyarakat tentang sistem pengelolaan saluran drainase lingkungan
- Mewujudkan kondisi sanitasi lingkungan yang memenuhi standar kehidupan secara mandiri
 - Kampanye dan pembinaan pengelolaan saluran drainase
 - Perbaikan sistem drainase di masyarakat

Untuk mewujudkan misi **Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerjasama pihak swasta untuk dapat terpadu, bersinergi dalam mewujudkan sanitasi yang bersih dan sehat**, maka strategi rencana kegiatan yang ditetapkan adalah

- Peningkatan sistem koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain pembentukan forum-forum komunikasi sanitasi lingkungan, forum kelompok-kelompok yang berkepentingan, pemerhati dan pecinta sanitasi dan lingkungan serta lembaga-lembaga donor /pembebiayaan sanitasi dan pihak swasta
 - Pembentukan forum komunikasi kelompok masyarakat, LSM pengelolaan drainase
 - Melakukan Kerjasama melalui CSR serta lembaga donor dalam pembangunan sarana drainase lingkungan

Untuk mewujudkan misi **Mewujudkan keberlanjutan pelaksanaan program kegiatan sehingga pelaksanaan pembangunan sanitasi dapat dinikmati generasi mendatang**, maka strategi yang ditetapkan

- Penetapan perencanaan sanitasi jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek secara konsisten
 - Pembelajaran dan penyusunan buku perencanaan pengelolaan drainase mulai dari wilayah Desa sampai Kabupaten pada berbagai kelompok dan organisasi
- Peningkatan upaya pembelajaran masyarakat terhadap perbaikan sanitasi secara kontinyu dan berkelanjutan
 - Penerapan kegiatan sanitasi berbasis masyarakat, melalui pengelolaan saluran drainase secara swadaya

7.10.5. Rencana Peningkatan Penyediaan Air Minum

Secara garis besar rencana peningkatan penyediaan air minum sebagaimana misi

Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pelayanan air bersih dan sanitasi kepada masyarakat untuk dapat hidup bersih dan sehat , serta strategi :

- Peningkatan koordinasi dan keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan perencanaan sehingga peningkatan program pelayanan sanitasi kepada masyarakat dapat terwujud, melalui kegiatan
 - Koordinasi dalam perencanaan penyediaan air minum yang meliputi kebijakan/peraturan drainase, bentuk kegiatan dan lokasi serta pembiayaan
 - Penyusunan studi kajian penyediaan air minum
- Peningkatan kualitas SDM dibidang sanitasi baik aparat pemerintah , masyarakat dan kelompok masyarakat serta pihak-pihak lain yang berkepentingan
 - Pendidikan dan Pelatihan serta kursus tentang air minum
 - Pembinaan kelompok-kelompok masyarakat dan LSM tentang penyediaan air minum
- Peningkatan sistem informasi, komunikasi sanitasi kabupaten Gresik sebagai upaya untuk mempermudah penyampaian konsep tentang air minum kepada seluruh lapisan masyarakat
 - Pembuatan web. Air minum
 - Pembuatan majalah, leaflet dan poster tentang air minum
- Peningkatan sistem administrasi dibidang sanitasi lingkungan agar tahapan pelaksanaan dapat terdokumentasi, termonitor sebagai laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kemajuan pembangunannya
 - Penyusunan buku laporan pengelolaan air minum setiap triwulan atau semester

Untuk mewujudkan misi **Mewujudkan penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan yang memadai bagi kepentingan masyarakat**, maka ditetapkan strategi :

- Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi kepada masyarakat secara bertahap
 - penyediaan lokasi cadangan air minum di beberapa lokasi (Gresik Utara, Gresik Selatan, Kota)
- Peningkatan upaya pemeliharaan fasilitas sanitasi dan air minum agar tidak terjadi gangguan sistem pada yang dapat merugikan masyarakat
 - Pemeliharaan pipa air minum
 - Pembinaan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan air minum

- Peningkatan mutu pelayanan sanitasi dan air minum (kualitas dan kuantitas) melalui perbaikan sistem jaringan sanitasi (jaringan drainase, air bersih, air limbah dan jaringan persampahan);
 - Penambahan jaringan air minum untuk memperluas area cakupan layanan
 - monitoring terhadap kualitas jaringan perpipaan dan kualitas air minum
 - perbaikan jaringan perpipaan di beberapa lokasi (sekolah, pasar, area umum)
- Peningkatan upaya pelestarian, perlindungan dan penyelamatan sumber daya air untuk keberlanjutan penyediaan cadangan air
 - Sosialisasi dan pembinaan pengelolaan sumber daya air dan lingkungan

Untuk mewujudkan misi **Mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengutamakan kondisi sanitasi lingkungan**, maka strategi yang ditetapkan

- Peningkatan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat melalui jalur pendidikan dan organisasi
 - Upaya-upaya penyediaan air minum dan penyelamatan sumber daya air dimasukkan pada kurikulum pendidikan mulai SD sampai SMA
 - Pembinaan masyarakat tentang air minum yang bersih dan sehat
- Mewujudkan kondisi sanitasi lingkungan yang memenuhi standar kehidupan secara mandiri
 - Kampanye dan pembinaan air minum yang sehat serta penyelamatan sumber daya air
 - Perbaikan sistem penyimpanan dan penyediaan air minum di masyarakat

Untuk mewujudkan misi **Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerjasama pihak swasta untuk dapat terpadu, bersinergi dalam mewujudkan sanitasi yang bersih dan sehat**, maka strategi rencana kegiatan yang ditetapkan adalah

- Peningkatan sistem koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain pembentukan forum-forum komunikasi sanitasi lingkungan, forum kelompok-kelompok yang berkepentingan, pemerhati dan pecinta sanitasi dan lingkungan serta lembaga-lembaga donor /pembebiayaan sanitasi dan pihak swasta
 - Pembentukan forum komunikasi kelompok masyarakat, LSM penyelamatan sumber daya air
 - Melakukan Kerjasama melalui CSR serta lembaga donor dalam pembangunan sarana air minum

Untuk mewujudkan misi **Mewujudkan keberlanjutan pelaksanaan program kegiatan sehingga pelaksanaan pembangunan sanitasi dapat dinikmati generasi mendatang**, maka strategi yang ditetapkan

- Penetapan perencanaan sanitasi jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek secara konsisten
 - Pembelajaran dan penyusunan buku perencanaan penyediaan air minum dan penyelamatan sumber daya air mulai dari wilayah Desa sampai Kabupaten pada berbagai kelompok dan organisasi
- Peningkatan upaya pembelajaran masyarakat terhadap perbaikan sanitasi secara kontinyu dan berkelanjutan
 - Penerapan kegiatan penyediaan air minum sehat berbasis masyarakat, melalui pengelolaan dan penyelamatan sumber daya air yang ada di masyarakat

7.10.6. Rencana Peningkatan Kampanye PHBS

Secara garis besar rencana peningkatan Kampanye PHBS sebagaimana misi

Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pelayanan air bersih dan sanitasi kepada masyarakat untuk dapat hidup bersih dan sehat , serta strategi :

- Peningkatan koordinasi dan keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan perencanaan sehingga peningkatan program pelayanan sanitasi kepada masyarakat dapat terwujud, melalui kegiatan
 - Koordinasi dalam perencanaan kampanye PHBS yang meliputi kebijakan/peraturan PHBS, bentuk kegiatan dan lokasi serta pembiayaan
 - Penyusunan studi kajian PHBS
- Peningkatan kualitas SDM dibidang sanitasi baik aparat pemerintah , masyarakat dan kelompok masyarakat serta pihak-pihak lain yang berkepentingan
 - Pendidikan dan Pelatihan serta kursus tentang penerapan PHBS
 - Pembinaan kelompok-kelompok masyarakat dan LSM tentang PHBS
- Peningkatan sistem informasi, komunikasi sanitasi kabupaten Gresik sebagai upaya untuk mempermudah penyampaian konsep tentang air minum kepada seluruh lapisan masyarakat
 - Pembuatan web. PHBS
 - Pembuatan majalah, leaflet dan poster tentang PHBS
- Peningkatan sistem administrasi dibidang sanitasi lingkungan agar tahapan pelaksanaan dapat terdokumentasi, termonitor sebagai laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kemajuan pembangunannya
 - Penyusunan buku laporan perkembangan penerapan PHBS di masyarakat setiap triwulan atau semester

Untuk mewujudkan misi **Mewujudkan penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan yang memadai bagi kepentingan masyarakat**, maka ditetapkan strategi:

- Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi kepada masyarakat secara bertahap

- Penyediaan sarana air bersih, air limbah (MCK septik tank), drainase dan sampah sebagai pendukung pelaksanaan PHBS di beberapa lokasi
- Peningkatan upaya pemeliharaan fasilitas sanitasi dan air minum agar tidak terjadi gangguan sistem pada yang dapat merugikan masyarakat
 - Pemeliharaan terhadap sarana pendukung PHBS
 - Pembinaan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan PHBS
- Peningkatan mutu pelayanan sanitasi dan air minum (kualitas dan kuantitas) melalui perbaikan sistem jaringan sanitasi (jaringan drainase, air bersih, air limbah dan jaringan persampahan) ;
 - Penambahan jaringan air minum, air bersih drainase, air limbah untuk memperluas area cakupan layanan dan penerapan PHBS
 - monitoring terhadap kualitas sarana pendukung PHBS
 - perbaikan jaringan air bersih, air limbah (MCK), drainase di beberapa lokasi (sekolah, pasar, pemukiman padat dan area umum) untuk menunjang PHBS

Untuk mewujudkan misi **Mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengutamakan kondisi sanitasi lingkungan**, maka strategi yang ditetapkan

- Peningkatan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat melalui jalur pendidikan dan organisasi
 - Upaya-upaya penyediaan air minum dan penyelamatan sumber daya air dan sebagainya dimasukkan pada kurikulum pendidikan mulai SD sampai SMA
 - Pembinaan masyarakat tentang air minumm yang bersih dan sehat dan PHBS
- Mewujudkan kondisi sanitasi lingkungan yang memenuhi standar kehidupan secara mandiri
 - Kampanye dan pembinaan air minum yang sehat serta penyelamatan sumber daya air dan sarana pendukung PHBS
 - Perbaikan sistem penyimpanan dan penyediaan air minum di masyarakat

Untuk mewujudkan misi **Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerjasama pihak swasta untuk dapat terpadu, bersinergi dalam mewujudkan sanitasi yang bersih dan sehat**, maka strategi rencana kegiatan yang ditetapkan adalah

- Peningkatan sistem koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain pembentukan forum-forum komunikasi sanitasi lingkungan, forum kelompok kelompok yang berkepentingan, pemerhati dan pecinta sanitasi dan lingkungan serta lembaga-lembaga donor /pembeayaan sanitasi dan pihak swasta
 - Pembentukan forum komunikasi kelompok masyarakat, LSM untuk kampanye PHBS

- Melakukan Kerjasama melalui CSR serta lembaga donor untuk pembiayaan PHBS

Untuk mewujudkan misi **Mewujudkan keberlanjutan pelaksanaan program kegiatan sehingga pelaksanaan pembangunan sanitasi dapat dinikmati generasi mendatang**, maka strategi yang ditetapkan

- Penetapan perencanaan sanitasi jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek secara konsisten
 - Pembelajaran dan penyusunan buku perencanaan kampanye PHBS, penyediaan air minum dan penyelamatan sumber daya air mulai dari wilayah Desa sampai Kabupaten pada berbagai kelompok dan organisasi

7.11. ARAHAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI

Secara umum MPSS ini secara spesifik bersifat sebagai "Expenditure Plan" – khususnya untuk program pembangunan sektor sanitasi.

Tujuan:

- MPSS diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman penganggaran pendanaan untuk implementasi pelaksanaan pembangunan sanitasi mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yang telah tercantum dalam dokumen Strategi Sanitasi Kab/Kota.
- Dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pendanaan untuk implementasi pembangunan Sanitasi Kabupaten Gresik selama 5 tahun yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.
- Dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Operasional tahapan pembangunan sanitasi.
- Dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi Kabupaten Gresik.

7.11.1. Sub Sektor Air Limbah

Tabel 7.9. Prioritas Program dan Kegiatan Sub-sektor Air Limbah periode 2013-2017

Prioritas 1 : Program Penyusunan Master Plan Air Limbah		
Kegiatan	Estimasi Biaya (Juta Rp.)	Justifikasi
1. Penyusunan Master Plan air limbah skala kota	800	Sebagai dasar utama pengembangan sistim Pengelolaan air limbah domestik, maka ketersediaan Master Plan Air Limbah, Outlineplan Sistem Air Limbah, menjadi kebutuhan utama, disamping Penyiapan DED dan pemastian ketersediaan kebutuhan
2. Penyusunan Detail Engineering Design (DED) IPAL Komunal dan MCK+	100	
3. Sosialisasi dan Kampanye "Rencana" Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Komunal dan MCK +	250	

		lahan. Hal ini juga menjadi pertimbangan utama terkait criteria yang disyaratkan untuk mendapat dukungan stimulant pendanaan dari sumber eksternal.
Ket : Item 1 dan 2 diimplementasikan melalui Jasa Pengadaan Barang dan Jasa. Detail lihat Sub bab 3.2		
Prioritas 2 :		
Program Penyusunan Perda Air Limbah		
Kegiatan	Estimasi Biaya (Juta Rp.)	Justifikasi
1. Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan PERDA	300	Perda tentang pengolahan air limbah akan digunakan sebagai induk aturan atau payung hukum pelaksanaan program ke depan. Dengan demikian, program tersebut dapat dilanjutkan oleh pemimpin periode selanjutnya sehingga tujuan pelayanan kepada masyarakat dapat terpenuhi.
2. Penyelenggaraan Konsultasi Publik & Pengesahan PERDA	300	
3. Sosialisasi peraturan daerah dan peraturan yang berlaku terkait air limbah	100	
4. Penetapan peraturan daerah tentang Pengelolaan Kualitas Air dan pengendalian pencemaran air.	100	
5. Penetapan rencana induk sanitasi menjadi sebuah produk peraturan daerah	100	
6. Sosialisasi peraturan daerah tentang pengelolaan sanitasi	300	
7. Koordinasi dengan lembaga/institusi penegak hukum terkait dengan penerapan sanksi	400	
8. Monitoring penerapan peraturan daerah tentang pengelolaan sanitasi berupa jumlah dan sanksi yang diberlakukan	300	
9. Penetapan institusi atau unit pengelola air limbah dalam bentuk peraturan daerah	300	
10. Peningkatan koordinasi antar instansi yang terkait sanitasi	200	
11. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan lembaga lainnya	200	
Ket : -		
Prioritas 3 :		
Program pembangunan IPAL Komunal dan MCK+ Wilayah Perkotaan		
Kegiatan	Estimasi Biaya (Juta Rp.)	Justifikasi
1. Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun MCK++)	1.500	Kebutuhan akan IPAL Komunal akan diprioritaskan pada semua perkampungan padat, kumuh dan miskin. Serta lokasi publik seperti pasar.
2. Sosialisasi Rencana Pembangunan IPAL Komunal dan MCK++ kepada masyarakat oleh Dinas Terkait	250	
3. Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	250	
4. Pembebasan lahan untuk pembangunan IPAL Komunal dan MCK ++ Wil. Perkotaan	1.000	
5. Perencanaan Detail (DED) Pembangunan IPAL Komunal dan MCK++	1.000	
6. Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis, keuangan, dan manajerial.	250	
7. Pembangunan Sistem IPAL Komunal dan MCK ++ Wil. Perkotaan	9.000	

8. Operasi dan Pemeliharaan IPAL Komunal dan MCK++	48	
Ket : Item 5,7,8 diimplementasikan melalui Jasa Pengadaan Barang dan Jasa. Detail lihat Sub bab 3.2		
Prioritas 4 :		
Program pembangunan Fasilitas IPAL dan MCK+ On-Site (USRI-PNPM)		
Kegiatan	Estimasi Biaya (Juta Rp.)	Justifikasi
1. Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun MCK++)	570	Kebutuhan akan IPAL Komunal akan diprioritaskan pada semua perkampungan padat, kumuh dan miskin. Serta lokasi publik seperti pasar.
2. Sosialisasi Rencana Pembangunan IPAL Komunal dan MCK++ kepada masyarakat oleh Dinas Terkait	375	
3. Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	375	
4. Pembebasan lahan untuk pembangunan IPAL Komunal dan MCK ++ Wil. Perkotaan	2.850	
5. Perencanaan Detail (DED) Pembangunan IPAL Komunal dan MCK++	2.200	
6. Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis, keuangan, dan manajerial.	350	
7. Pembangunan Sistem IPAL Komunal dan MCK ++ Wil. Perkotaan	19.950	
8. Operasi dan Pemeliharaan IPAL Komunal dan MCK++	120	
Ket : Item 5,7,8 diimplementasikan melalui Jasa Pengadaan Barang dan Jasa. Detail lihat Sub bab 3.2		
Prioritas 5 :		
Program Pembangunan IPAL Skala Kawasan		
1. Sosialisasi Rencana Pembangunan IPAL Skala Kawasan kepada masyarakat oleh Dinas Terkait	135	Kebutuhan akan IPAL Komunal akan diprioritaskan pada semua perkampungan padat, kumuh dan miskin.
2. Pembebasan lahan untuk pembangunan IPAL Skala Kawasan	300	
3. Pembebasan lahan untuk pembangunan IPAL Skala Kawasan	6.000	
4. Perencanaan Detail (DED) Pembangunan IPAL Skala Kawasan	3.000	
5. Pembangunan Sistem IPAL Skala Kawasan	30.000	
6. Jaringan air bersih pendukung Pembangunan Sistem IPAL Skala Kawasan	3.000	
7. Biaya Operasi dan Pemeliharaan IPAL Komunal dan MCK++	69	
Ket : Item 4, dan 5 diimplementasikan melalui Jasa Pengadaan Barang dan Jasa. Detail lihat Sub bab 3.2		
Prioritas 6 :		
Program pembangunan IPAL Rumah Potong Hewan dan Fasilitasnya		
1. Studi UKL/UPL Pembangunan IPAL Rumah Potong Hewan (RPH)	50	Kebutuhan akan IPAL RPH sangat mendesak di kab Gresik karena RPH eksisting belum ada pengolahan limbahnya
2. Perencanaan Detail (DED) Pembangunan IPAL Rumah Potong Hewan	50	
3. Supervisi Pembangunan IPAL Rumah Potong Hewan (RPH).	50	
4. Pembangunan IPAL RPH	350	
5. Operasi dan Pemeliharaan IPAL Komunal Rumah Potong Hewan	250	
Ket : Item 1,2,4 diimplementasikan melalui Jasa Pengadaan Barang dan Jasa. Detail lihat Sub bab 3.2		
Prioritas 7 :		
Program pembangunan IPLT dan fasilitasnya		

1. Studi AMDAL Pembangunan IPLT	150	Gresik belum memiliki IPLT. Selama ini hanya dilayani oleh swasta, yang pembuangan akhirnya tidak jelas. Pembangunan IPLT berada di wilayah Gresik Selatan satu lokasi dengan TPA WringinAnom untuk memenuhi kebutuhan IPLT seluruh Kab. Gresik
2. Sosialisasi dan Kampanye Rencana Pembangunan IPLT	150	
3. Pembebasan Lahan/Tanah	1000	
4. Perencanaan Detail (DED) Pembangunan IPLT	600	
5. Pelatihan bagi Pengelola IPLT	150	
6. Pembangunan IPLT	13.500	
7. Operasi dan Pemeliharaan IPLT	300	
8. Pengadaan Truk Tinja	2400	
9. Operasi dan Pemeliharaan Truck Tinja	75	

Ket : Item 1,4,6,9 diimplementasikan melalui Jasa Pengadaan Barang dan Jasa. Detail lihat Sub bab 3.2

Prioritas 8 :

Program Pembangunan Sanitasi Sekolah dan Fasilitasnya

1. SANITASI SEKOLAH : Pendidikan Dasar Sembilan Tahun : Pembangunan Sarana Air bersih dan Sanitasi dilingkungan Sekolah	6300	Kebutuhan akan MCK+ di sekolah dan kampanye akan pentingnya sanitasi di usia sekolah.
2. Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi anak usia Pendidikan Dasar Sembilan tahun untuk mengenal sanitasi yang baik	300	
3. Penyediaan sarana pembuangan sampah (Tong sampah).	35	
4. Pemeliharaan rutin/berkala sarana sanitasi dilingkungan sekolah	175	
5. SANITASI SEKOLAH : Pendidikan menengah : Pembangunan Sarana Air bersih dan Sanitasi dilingkungan Sekolah	6300	
6. Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi anak usia Pendidikan Dasar Sembilan tahun untuk mengenal sanitasi yang baik	300	
7. Penyediaan sarana pembuangan sampah (Tong sampah).	35	
8. Pemeliharaan rutin/berkala sarana sanitasi dilingkungan sekolah	175	

Ket :

Prioritas 9 :

Program Pembangunan IPAL Pasar Ikan dan Fasilitasnya

1. Perencanaan Detail (DED) Pembangunan IPAL Pasar Ikan.	50	Limbah yang dihasilkan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) selama ini hanya di buang di saluran terbuka yang menyebabkan bau dan lalat serta pencemaran disekitar lokasi. Kebutuhan akan IPAL Pasar Ikan berada di TPI Kel Lumpur
2. Pembangunan IPAL Pasar Ikan.	450	
3. Operasi dan Pemeliharaan IPAL Pasar Ikan	24	

Ket : Item 1,2 diimplementasikan melalui Jasa Pengadaan Barang dan Jasa. Detail lihat Sub bab 3.2

Prioritas 10 :

Program Pembangunan IPAL Puskesmas dan Fasilitasnya

1. Perencanaan Detail (DED) Pembangunan IPAL Puskesmas	1.000	Kebutuhan IPAL Puskesmas sangat diperlukan
2. Pembangunan IPAL Puskesmas	9.000	
3. Operasi dan Pemeliharaan IPAL Puskesmas	200	

Ket : Item 1,2 diimplementasikan melalui Jasa Pengadaan Barang dan Jasa. Detail lihat Sub bab 3.2

Prioritas 11 :		
Program Peningkatan Fungsi IPAL Rumah Sakit dan Fasilitasnya		
1. Perencanaan Detail (DED) Pembangunan IPAL Rumah Sakit	1.200	Kebutuhan akan IPAL Rumah sakit sangat di perlukan mengingat masih banyak rumah sakit yang belum ada IPAL nya
2. Pembangunan IPAL Rumah Sakit	5.000	
3. Operasi dan Pemeliharaan IPAL Rumah Sakit	1.200	
Ket : Item 1,2 diimplementasikan melalui Jasa Pengadaan Barang dan Jasa. Detail lihat Sub bab 3.2		
Prioritas 12 :		
Program Peningkatan SDM		
1. Diklat/ Bimtek tentang pembangunan dan pemeliharaan tangki septik sesuai standart kesehatan	400	Pelatihan Bimtek dan sosialisasi tentang sanitasi untuk peningkatan SDM internal PNS
2. Diklat PPNS	200	
3. Pendidikan S1 dan S2 bidang sanitasi	2.000	
4. Penambahan personil pengelola sanitasi	200	
5. Penyelenggaraan forum pertemuan dengan pengelola air limbah yang telah ada di masyarakat	200	
Ket : -		
Prioritas 13 :		
Program CSR		
1. Studi potensi finansial dan pihak swasta, lembaga donor atau pinjaman dalam pengelolaan air limbah domestik	1.000	Menjalin kerja sama dengan para swasta untuk meningkatkan pengetahuan sanitasi dan pengolahan limbahnya
2. Studi pengembangan kapasitas masyarakat dan swasta dalam aspek pendanaan kegiatan pengelolaan air limbah domestik	1.250	
3. Studi potensi finansial dan pihak swasta, lembaga donor atau pinjaman dalam pengelolaan air limbah domestik	1.250	
4. Studi pengembangan kapasitas masyarakat dan swasta dalam aspek pendanaan kegiatan pengelolaan air limbah domestik	1.250	
5. Studi dan Fasilitasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dalam pengelolaan air limbah domestik	1.250	
Ket : -		
Prioritas 14 :		
Program Monitoring dan Evaluasi		
1. Fasilitasi dan pelayanan perijinan bagi penyelenggara pengelola air limbah rumah tangga	400	Monitoring dan evaluasi untuk mengontrol pembangunan yang sudah di kerjakan agar tetap berkesinambungan
2. Sosialisasi terkait periode pengurusan tangki septik yang baik dan cara penyedotan yang baik, kpd masyarakat dan swasta (jasa sedot lumpur tinja)	400	
Ket : -		

7.11.2. Sub Sektor Persampahan

Tabel 7.10. Prioritas Program dan Kegiatan Sub-sektor Persampahan periode 2013-2017

Prioritas 1 : Program Pengembangan Kebijakan dan Kinerja Pengelolaan Persampahan			
Kegiatan	Estimasi Biaya (Juta Rp.)	Justifikasi	
A. Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan:			
1. Belanja pegawai	144	Peningkatan sarana dan prasarana persampahan sangat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan persampahan. Di mana pelayanan persampahan yang diharapkan dapat memenuhi target MDG's, yaitu pelayanan per-sampahan sebesar 70% pada tahun 2017.	
2. Belanja Barang dan Jasa	15		
3. Pengadaan tong bin, double tong, dan keranjang sampah	200		
4. Pengadaan Bak sampah terpilah	450		
5. Pembelian sepeda roda tiga (dorkas)	466		
6. Pengadaan Gerobak Sampah	1.400		
B. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan:			
1. Pembangunan PPLH (Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup)	200	Guna mendukung pelayanan tersebut dibutuhkan dokumen perencanaan, yaitu masterplan sebagai tahap awalnya. Hal ini bertujuan agar perencanaan pelayanan persampahan terarah dengan baik, bertahap dan berkelanjutan. Selain itu juga sebagai persyaratan utama untuk mendapat dukungan stimulan pendanaan eksternal.	
C. Peningkatan Operasi dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan			
1. Belanja Pegawai	14.445		
2. Belanja Barang dan Jasa	22.251		
3. Operasional Retribusi Kebersihan	298		
4. Penyusunan Master Plan Persampahan	300		
5. Kajian analisis Beban Kerja dan analisis Tupoksi pada Bidang Kebersihan Lingkungan	50		
6. Pembentukan unit pengaduan masalah pengelolaan sampah	25		
7. Pameran/ temu bisnis serta Kerjasama Pengelolaan Persampahan	150		
8. Pembinaan Kerjasama Pemungutan Retribusi Kerjasama	50		
9. Penyusunan SOP operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	50		
10. Penyempurnaan Perda tentang retribusi jasa umum kebersihan/ persampahan	125		
11. Pembuatan Peraturan Bupati Pengelolaan Sampah	100		
12. Penyusunan pedoman manajemen asset persampahan	100		
13. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	50		
Ket : Item A3 s-d A6 diimplementasikan melalui Jasa Pengadaan Barang dan Jasa. Detail lihat Sub bab 3.2			
Prioritas 2 : Peningkatan dan Pengelolaan TPA (TPA Ngipik)			
A. Pembangunan Fisik Peningkatan TPA :			
1. Perencanaan Peningkatan TPA	75,	Lahan TPA Ngipik yang sekarang digunakan oleh Pemkab Gresik adalah milik PT Semen Gresik. Lahan tersebut saat ini sudah penuh. Saat ini sedang	
2. Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan TPA Ngipik	10.000		

3. Pengawasan dan Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan TPA	25	digalang adanya kerja sama operasional TPA tersebut dengan Sistem RDF (Refused Derified Fuel), dimana bahan bakar yang dihasilkan dari system tersebut akan dimanfaatkan oleh PT Semen Gresik untuk proses produksinya. Untuk itu diperlukan peningkatan dan pengelolaan TPA. MOU antara BLH Kab.Gresik dan PT Semen Gresik terlampir.
4. Operasional dan Pemeliharaan TPA	550	
B. Pengadaan Fasilitas Operasional TPA		
1. Pengadaan Truck Pengangkut Sampah : Dump Truck dan Armroll Truck	18.150	
2. Pengadaan Container kapasitas 6 m3	9.945	
3. Pengadaan alat berat : Buldozer dan Excavator	6.000	
4. Pembangunan Gudang alat berat di TPA Ngipik	200	
5. Pengadaan Komposter	39	
Ket : Ket : Item A1 dan A2 diimplementasikan melalui Kerjasama dengan PT Semen Gresik. Item B1 s/d B5 diimplementasikan melalui jasa Pengadaan Barang dan Jasa. Detail lihat Sub bab 3.2		
Prioritas 3 : Pengelolaan Sampah dari Stasiun Antara sampai TPA		
A. TPS		TPS dan TPST Kab Gresik akan ditempatkan di tiap-tiap Ibu Kota Kecamatan, sedangkan Stasiun Peralihan Antara (SPA) akan difokuskan wilayah Kota Gresik meliputi Kec Kebomas, Kec, Gresik dan Kec Manyar. Penganggaran SPA ini akan mengandalkan hibah dari Ausaid (SiAAG)
1. Penyusunan DED TPS	20	
2. Pembangunan TPS	12.320	
B. TPST		
1. Penyusunan studi kelayakan TPST	130	
2. Penyusunan DED TPST	480	
3. Sosialisasi	800	
4. Pembebasan Lahan	1.600	
5. Pembangunan TPST	12.000	
6. Supervisi Pembangunan TPST	360	
7. Pendampingan dan Penyuluhan Pengelolaan TPST	320	
C. Stasiun Peralihan Antara (SPA)		
1. Penyusunan studi kelayakan SPA	80	
2. Sosialisasi/ Penyuluhan masyarakat untuk SPA	200	
3. Pembebasan lahan untuk lokasi SPA	80	
4. Penyusunan DED SPA	240	
5. Pembangunan SPA	6.000	
6. Pengawasan konstruksi SPA	180	
Ket : Item A1, A2, B1,B2,B5, C1,C4,C5 diimplementasikan melalui jasa Pengadaan Barang dan Jasa. Detail lihat Sub bab 3.2		
Prioritas 4 : Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) S		
Pembangunan dan Pengelolaan TPA Kabupaten		Lahan TPA yang dipakai saat ini milik PT Semen Gresik yang saat ini sudah hampir penuh dan hanya melayani wilayah kota Gresik. Akan diupayakan pengadaan lahan sendiri oleh Pemkab Gresik yang bisa melayani seluruh wilayah kabupaten Gresik.
1. Penyusunan Studi Kelayakan TPA	(100 : Th 2012)	
2. Penyusunan UKL/UPL TPA atau AMDAL	200	
3. Sosialisasi "Rencana" Pembangunan TPA kepada masyarakat sekitarnya	250	
4. Pengadaan Lahan untuk TPA baru skala kabupaten	20.000	
5. Penyusunan DED TPA	400	
6. Pembangunan TPA baru skala kabupaten	100.000	
7. Supervisi Pembangunan TPA	300	
8. Pembentukan Kelembagaan Pengelolaan TPA/Unit Kerja TPA	50	
9. Pelatihan Pengelolaan TPA	100	
10. Operasi dan Pemeliharaan	900	

Ket : Item 1,2,5,6 diimplementasikan melalui jasa Pengadaan Barang dan Jasa. Detail lihat Sub bab 3.2		
Pembangunan dan Pengelolaan TPA Regional		Saat ini sudah dibahas adanya TPA skala regional antara Kab Gresik, Sidoarjo, Surabaya. Terdapat lahan potensial untuk TPA di Wringinanom dengan luas mencapai 100 Ha, dan sudah pernah disosialisasikan sebelumnya.
1. Penyusunan Studi Kelayakan TPA	200	
2. Penyusunan UKL/UPL TPA atau AMDAL	200	
3. Sosialisasi "Rencana" Pembangunan TPA kepada masyarakat sekitarnya	250	
4. Pengadaan Lahan untuk TPA baru skala Regional	75.000	
5. Penyusunan DED TPA	400	
6. Pembangunan TPA baru skala Regional	200.000	
7. Supervisi Pembangunan TPA	300	
8. Pembentukan Kelembagaan Pengelolaan TPA/Unit Kerja TPA	50	
9. Pelatihan Pengelolaan TPA	100	
10. Operasi dan Pemeliharaan	600	
Ket : Item 1,2,5,6 diimplementasikan melalui jasa Pengadaan Barang dan Jasa. Detail lihat Sub bab 3.2		
Prioritas 5 :		
Program Pengelolaan Sampah dari Sumbernya		
1. Diklat tentang Pengelolaan Sampah	100	Program pengelolaan sampah dari sumbernya menjadi salah satu prioritas untuk solusi pengelolaan Jangka Panjang, terutama untuk wilayah perkotaan yang terus tumbuh dengan cepat. Pilot Project tingkat wilayah akan diterapkan pada wilayah kota Gresik, yaitu Kec Gresik, Kebomas, dan Manyar.
2. Pembinaan/ Satgas Kebersihan Kota	100	
3. Pelatihan tentang pengelolaan sampah dengan konsep 3 R	100	
4. Sosialisasi dan Pembinaan tentang Sistem Pengelolaan Sampah dengan konsep 3 R.	500	
5. Penelitian dan aplikasi teknologi pengolahan sampah skala rumah tangga tepat guna	200	
6. Proyek percontohan (pilot project) pengelolaan sampah dengan konsep 3R	200	
7. Fasilitasi jaringan kerjasama dalam pengelolaan 3R	100	
8. Publikasi melalui website, lefleat, dan radio	125	
9. Lomba kebersihan	125	
10. Pemberian penghargaan (Sanitation Award) bagi pelaku bisnis yang peduli pengelolaan sampah	125	
Ket : -		

7.11.3. Sub Sektor Drainase

Tabel 7.11. Prioritas Program dan Kegiatan Sub-sektor Drainase periode 2013-2017

Prioritas 1 : Program Penyiapan Dokumen Perencanaan Sub Sektor Drainase		
Kegiatan	Estimasi Biaya (Juta Rp.)	Justifikasi
1. Penyusunan Master Plan Drainase Skala Kawasan : 5 kec	2.500	Sebagai dasar utama pengembangan sistim Drainase Permukiman, maka ketersediaan Master Plan Drainase, Outlineplan Sistem Drainase, Review Masterplan skala wilayah menjadi kebutuhan utama, disamping Penyiapan DED dan pemastian ketersediaan kebutuhan lahan. Hal ini juga menjadi pertimbangan utama terkait criteria yang disyaratkan untuk mendapat dukungan stimulant pendanaan dari sumber eksternal.
2. Outlineplan Sistem Drainase Skala Kota/Kawasan : 9 kec	900	
3. Review Masterplan Sistem Drainase Kota Gresik	400	
4. Penyusunan Data Base Sistem drainase Kota Gresik	450	
Ket : Item 1,2,3,4 diimplementasikan melalui Jasa Pengadaan Barang dan Jasa. Detail lihat Sub bab 3.2		
Prioritas 2 : Peningkatan Jaringan Drainase		
Kegiatan	Estimasi Biaya (Juta Rp.)	Justifikasi
1. Pembangunan Saluran Drainase Primer 10 Sistem : Sistem Kali tenger, Banjar Anyar 2 , Veteran, Tlogodendo, Kali Roomo, Kali Towo, Kali Tutup Barat, Kali Tutup Timur, Jl Yos Sudarso &TPI.		
a. Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran dan Gorong-gorong Drainase Primer	900	Sesuai ketersediaan anggaran, prioritas pembangunan Drainase diarahkan untuk penanggulangan genangan wilayah CBD di Kec. Gresik, Kec. Kebomas, Kec. Manyar. Aspek ekonomis dan bisnis menjadi pertimbangan penetapan prioritas wilayah ini. Detail uraian lihat Lampiran Proposal
b. Sosialisasi Rencana Pembangunan Saluran dan Gorong-gorong Drainase Primer	440	
c. Pembebasan lahan	6.510	
d. Pembangunan Saluran dan Gorong-gorong Drainase Primer	40.170	
e. Supervisi Pembangunan Saluran dan Gorong-gorong Drainase Primer	400	
f. Rehabilitasi Saluran Drainase Primer	23.850	
g. Pemeliharaan Saluran Drainase Primer	4.615	
2. Pembangunan Saluran Drainase Sekunder 4 Sistem : Sistem Kali Tenger, Banjaranyar 2, Veteran, Tlogodendo.		
a. Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran dan Gorong-gorong Drainase Sekunder	1.380	Sesuai ketersediaan anggaran, prioritas pembangunan Drainase diarahkan untuk penanggulangan genangan dan sistem distribusi saluran sekunder di Kec. Gresik, Kec. Kebomas, Kec. Manyar. Aspek ekonomis dan bisnis menjadi pertimbangan penetapan prioritas wilayah ini. Detail uraian lihat Lampiran
b. Sosialisasi Rencana Pembangunan Saluran dan Gorong-gorong Drainase Sekunder	240	
c. Pembebasan lahan	7.484	

		Proposal
d. Pembangunan Saluran dan Gorong-gorong Drainase Sekunder	11.833	Diperlukan penambahan system drainase sekunder pada setiap luas pemanfaatan lahan yang sesuai dengan tata kelola lingkungan yang sehat
e. Supervisi Pembangunan Saluran dan Gorong-gorong Drainase Sekunder	840	
f. Rehabilitasi Saluran Drainase Sekunder	23.260	Rehabilitasi dan pemeliharaan rutin drainase sekunder untuk mengoptimalkan fungsi drainase sekunder
g. Pemeliharaan Saluran Drainase Sekunder	5.780	
3. Pembangunan Saluran Drainase Tersier/ Lingkungan		
a. Perencanaan Teknis pembangunan saluran drainase lingkungan	2.000	Genangan di Lingkungan Sukomulyo , Roomo (Kec. Manyar); Tlogopojok, Karangturi, Karangpoh, Lumpur, Kroman, Sukodono, Kemuteran, Pekelingan, Blandongan, Bedilan, Pulopancikan (Kec. Gresik); Kec. Kebomas dan sekitarnya akan menjadi prioritas pada tahap pembangunan Jangka Menengah. Penyediaan anggaran akan di coba dengan pola partisipasi dari Swasta / kerjasama dengan Masyarakat. Detail uraian lihat Lampiran Proposal
b. Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan	16.772	
c. Supervisi Pembangunan Saluran dan Gorong-gorong Drainase Lingkungan	500	
d. Pemeliharaan Saluran Drainase tersier/ lingkungan	1.950	
e. Pengerukan sedimen saluran drainase lingkungan	950	
Ket : Item 1d, 2d, 3a, 3b, 3e diimplementasikan melalui Jasa Pengadaan Barang dan Jasa. Detail lihat Sub bab 3.2		
Prioritas 3 :		
Pembangunan Sistem Polder dan Reservoar		
1. Pembangunan 2 Polder : Bozem Tenger dan Bozem Roomo		
a. Studi Pra Kelayakan Polder	30	Sesuai dengan prioritas penanganan Daerah Rawan Genangan dan ketersediaan anggaran yaitu di Sistem Drainase Tenger dan Sistem Drainase Roomo
b. Studi Kelayakan Polder	65	
c. Studi UKL/UPL atau AMDAL Polder	65	Optimalisasi dan pemanfaatan lahan tidur sebagai Reservoir Sistem Kali Tenger dan Sistem Kali Roomo.
d. Sosialisasi Rencana Pembangunan Polder	30	
e. Pembebasan lahan	12.300	
f. Perencanaan Teknis Pembangunan Polder / Reservoar	200	
g. Pembangunan Polder / Reservoar	15.200	
h. Supervisi Pembangunan Polder / Reservoar	65	
2. Rehabilitasi Polder / Reservoar 14 Sistem : Sistem Bozem Tenger, Bozem Roomo, Bozem Tlogodendo, Bozem Trate, Telaga Suci, Telaga Dowo, Sendang Putri, Telaga Kembangan, Telaga Kajen, Telaga Pegat, Telaga Sidomoro, Telaga Ngargosari, Telaga Gending, Telaga Indro		
a. Perencanaan Teknis Rehabilitasi Polder /Reservoar	700	Sesuai dengan ketersediaan anggaran dan prioritas penanganan genangan
b. Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Polder / Reservoar	950	
c. Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Polder /Reservoar	95	

d. Operasi dan Pemeliharaan Polder / Reservoir	975	
Ket : Item 1a, 1b, 1c, 1f, 1g, 2a, 2b diimplementasikan melalui Jasa Pengadaan Barang dan Jasa. Detail lihat Sub bab 3.2		
Prioritas 3 :		
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Pompa (dengan atau tanpa kolam retensi).		
1. Pembangunan Rumah Pompa 4 Lokasi : Banjar Anyar 1, banjar Anyar 2, Kali Tenger, Kali Roomo		
a. Studi Kelayakan Pembangunan Rumah Pompa (dengan atau tanpa kolam retensi)	Sdh dilaksanakan	Sesuai dengan ketersediaan anggaran dan prioritas penanganan genangan
b. Studi UKL/UPL Pembangunan Rumah Pompa (dengan atau tanpa kolam retensi).	Sdh dilaksanakan	
c. Sosialisasi Rencana Pembangunan Rumah Pompa (dengan atau tanpa kolam retensi)	170	
d. Pembebasan lahan untuk Pembangunan Unit Rumah Pompa (dengan atau tanpa kolam retensi)	Sdh dilaksanakan	
e. Perencanaan Teknis Pembangunan Unit Rumah Pompa (dengan atau tanpa kolam retensi)	Sdh dilaksanakan	
f. Pembangunan Unit Rumah Pompa (dengan atau tanpa kolam retensi)	72.710	
g. Supervisi Pembangunan Unit Rumah Pompa (dengan atau tanpa kolam retensi)	730	
2. Rehabilitasi Unit Rumah Pompa (dengan atau tanpa kolam retensi) 7 lokasi : Pompa Kali Tutup Barat, Kali Tutup Timur, Banjar Anyar 1, Banjar Anyar 2, Kali Tenger, Kali Romo, Kali Towo		
a. Perencanaan Teknis Rehabilitasi Unit Rumah Pompa (dengan atau tanpa kolam retensi)	490	Sesuai dengan ketersediaan anggaran dan prioritas penanganan genangan
b. Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Unit Rumah Pompa	1350	
c. Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Unit Rumah Pompa	490	
d. Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Kolam Retensi	600	
e. Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Kolam Retensi	90	
f. Operasi dan Pemeliharaan Unit Rumah Pompa (dengan atau tanpa kolam retensi)	8.150	
Ket : Item 1a, 1b, 1e, 1f, 2a, 2b, 2d diimplementasikan melalui Jasa Pengadaan Barang dan Jasa. Detail lihat Sub bab 3.2		
Prioritas 4 : Pembangunan dan Rehabilitasi Pintu Air		
1. Pembangunan Pintu Air 4 Lokasi : Banjar Anyar 1, Banjar Anyar 2, Kali Tenger, Roomo		
a. Perencanaan Teknis Pembangunan Pintu Air	20	Sesuai dengan ketersediaan anggaran dan prioritas penanganan genangan
b. Pembangunan Unit Pintu Air	210	
c. Supervisi Pembangunan Unit Pintu Air	20	
2. Rehabilitasi Unit Pintu Air 7 Lokasi : Pintu Kali Tutup Barat, Kali Tutup Timur, Banjar Anyar 1, Banjar		

Anyar 2, Kali Tenger, Kali Romo, Kalo Towo		
a. Perencanaan Teknis Rehabilitasi Unit Pintu Air	60	Sesuai dengan ketersediaan anggaran dan prioritas penanganan genangan
b. Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Unit Pintu Air	190	
c. Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Unit Pintu Air	60	
d. Operasi dan Pemeliharaan Unit Pintu Air	169	
Ket : Item 1a, 1b, 2a, 2b diimplementasikan melalui Jasa Pengadaan Barang dan Jasa. Detail lihat Sub bab 3.2		
Prioritas 5: Kelembagaan dan Pengaturan		
a. Penyusunan Perda tentang Pengelolaan Sistem Drainase	100	Dibutuhkan produk hukum yang dapat menjadikan acuan arah pembangunan mengenai sektor drainase, produk dapat memfasilitasi perkembangan kota dan memperkecil dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengelolaan drainase yang salah
b. Sosialisasi Perda Pengelolaan Sistem Drainase	50	
c. Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengelola Sistem Drainase Lingkungan Mandiri	50	
Ket :		

7.11.4. Aspek Hygiene / PHBS

Tabel 7.12. Prioritas Program dan Kegiatan Sub-sektor Hygiene/PHBS periode 2013-2017

Prioritas 1 : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Terkait STBM)		
Kegiatan	Estimasi Biaya (Juta Rp.)	Justifikasi
1. Penyusunan dan penerbitan Instruksi Bupati tentang Percepatan Gresik ODF tahun 2015	25	Penerbitan Instruksi Bupati tentang Percepatan Gresik ODF tahun 2012 merupakan penunjang kita untuk advokasi ke tingkat kecamatan dan lintas sektor
2. Rapat koordinasi dalam rangka penyusunan Instruksi Bupati	50	Untuk menyamakan persepsi stakeholder (linsek dan linprog)
Ket :		
Prioritas 2 : Pengembangan Lingkungan Sehat		
Kegiatan	Estimasi Biaya (Juta Rp.)	Justifikasi
1. Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	195	Guna meningkatkan akses penduduk menggunakan jamban sehat dan stop BABS maka diperlukan strategi yaitu STBM yang merupakan pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan pemecuan dan monitoring secara berkelanjutan.
2. Pelatihan Fasilitator STBM, Wirausaha sanitasi, Monitoring dan Evaluasi	219	
3. Pemicuan dan Pleno Akses jamban sehat	313	
4. Monitoring dan Evaluasi Akses Jamban Sehat	280	
5. Pengadaan media promosi PHBS (terutama Stop BABS dan CTPS) publikasi website dan jaringan media massa dan	155	Tersebar nya promosi PHBS dalam berbagai media baik elektronik maupun cetak

media elektronik		
6. Peningkatan peran serta organisasi wanita dalam menggalakkan PHBS (Stop BABS dan CTPS)	250	Meningkatnya kesadaran ibu (organisasi wanita) dalam kegiatan PHBS khususnya kegiatan Stop BABS dan CTPS
7. Penyegaran kader kesehatan lingkungan, tentang PHBS dan teknik komunikasi	300	Meningkatnya kuantitas dan kualitas kader kesehatan lingkungan dalam promosi PHBS terutama Stop BABS dan CTPS
8. Validasi Data Kesehatan Lingkungan	1.514	Tersedianya data sanitasi dasar yang valid dan aktual
9. Bimtek bagi petugas sanitasi	40	Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan di bidang sanitasi bagi sanitarian Puskesmas
10. Pembinaan Lingkungan pemukiman	50	Memantau sekaligus melakukan pembinaan di rumah-rumah terutama fasilitas sanitasinya
11. Penyuluhan kesling di sekolah	50	Meningkatkan pengetahuan siswa akan kesehatan lingkungan
12. Workshop strategi STBM	315	Meningkatnya ketrampilan kader dan masyarakat dalam kegiatan STBM
13. Lokakarya STBM	200	
14. Penyelenggaraan Kota/kabupaten Sehat	240	Meningkatnya pengetahuan tentang STBM bagi sanitarian, kader dan masyarakat
Prioritas 3 : Program Upaya Kesehatan Masyarakat		
Kegiatan	Estimasi Biaya (Juta Rp.)	Justifikasi
1. Rapat koordinasi lintas program dan lintas sektor	200	Meningkatnya dukungan dan peran serta aktif lintas program dan sektoral
2. Pemeriksaan sampel air dan sampel air minum	135	Berdasarkan Permenkes no. 736 Menkes/IV/2010 tentang tata laksana pengawasan kualitas air minum pemeriksaan sampel air setiap satu bulan sekali dan Permenkes no. 492/Menkes/IV/2010 tentang Persyaratan kualitas air minum

7.12. INTEGRASI STRATEGI PEMBANGUNAN KABUPATEN GRESIK

7.12.1. Strategi Pembangunan Kabupaten

Berdasarkan dokumen rencana yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disusun matriks strategi pembangunan pada skala kabupaten/kota yang meliputi:

- RTRW Kabupaten/Kota sebagai acuan arahan spasial;
- RPJMD Kabupaten/Kota sebagai acuan arahan pembangunan;
- SPPIP sebagai acuan arahan pengembangan permukiman;
- SSK sebagai arahan pengembangan sektor sanitasi.

Tabel 7.13. Matriks Strategi Pembangunan Kabupaten Gresik

DOKUMEN	RTRW PERDA NO.8 TAHUN 2011 TAHUN 2010 - 2030	RPJMD TAHUN 2011-2015	SPPIP TAHUN 2011 - 2016	SSK
VISI	MEWUJUDKAN PENATAAN RUANG YANG MENGAKOMODASI BUDAYA, RAMAH INVESTASI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN	GRESIK YANG AGAMIS, ADIL, MAKMUR DAN BERKEHIDUPAN YANG BERKUALITAS	Mengacu pada Kebijakan-Kebijakan di atasnya : <ul style="list-style-type: none"> • RPJP Provinsi Jawa Timur 2005-2025 • RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 • RTRWP Provinsi Jawa Timur 2009-2029 • RPJP Kabupaten Gresik 2005-2025 • RPJMD Kabupaten Gresik 2011-2015 • RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030 • RP4D 	TERWUJUDNYA LINGKUNGAN YANG BERSIH DAN SEHAT MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA
MISI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi pengembangan industri, perdagangan, pertanian, perikanan, kelautan dan pariwisata 2. Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi pengelolaan sumber daya alam sesuai potensi 3. Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi pengelolaan sumber daya buatan 4. Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi peningkatan pengelolaan lingkungan hidup 	<p>Misi Ke 1 : Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dilandasi nilai-nilai agama sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri</p> <p>Misi Ke 2 : Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik</p> <p>Misi Ke 3 : Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal, ekonomi kerayaktan dan pembangunan berwawasan lingkungan</p> <p>Misi Ke 4 : Meningkatkan kualitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Stop Buang Air Besar Sembarangan - Perluasan layanan air limbah melalui sistem sewerage - Peningkatan layanan air limbah setempat dan komunal - Penerapan praktik 3R secara nasional . - Peningkatan sistem Tempat Pemrosesan Akhir Sampah menjadi <i>sanitary landfill</i> - Pengurangan genangan /banjir 	

		Hidup Masyarakat		
KEBIJAKAN	Kebijakan dan Strategi Penataan Struktur Ruang :	1. Meningkatkan kualitas sarana dasar permukiman	1. Menyediakan perumahan layak huni sesuai standar pelayanan minimal bagi perumahan rakyat	1. Tersedianya 2 dokumen perencanaan pengelolaan air limbah domestik dan industri rumah tangga skala kabupaten pada akhir tahun 2013
	a) Kebijakan dan strategi sistem perkotaan	2. Meningkatnya penanganan pertanahan	2. Mendorong pengembangan kawasan permukiman yang mendukung pengembangan kawasan perkotaan dan industri	2. Meningkatnya cakupan kepemilikan jamban keluarga dengan penggunaan tangki septik dari 67 % menjadi 80 % untuk rumah tangga miskin pada akhir tahun 2016
	- Pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dgn membentuk hierarki kota-perkotaan dan wilayah a.n. Pengembangan sistem pusat regional dan sub-regional; pengembangan pusat regional pada PKN; Mempersiapkan PKN sbg pusat pemerintahan, fasilitas pelayanan umum, industri perdagangan dan jasa serta permukiman perkotaan;	3. Meningkatkan penataan kawasan daerah sesuai RTRW	3. Mengendalikan Perkembangan Permukiman pada Kawasan-Kawasan beresiko tinggi terhadap keselamatan, keamanan dan kenyamanan bermukim	3. Meningkatnya jumlah dan cakupan layanan pengelolaan air limbah secara komunal dari 3 unit menjadi 50 unit di wilayah padat kumuh miskin kabupaten di akhir tahun 2016.
	- Pemerataan pembangunan dan pendorong pertumbuhan wilayah di seluruh perkotaan a.n. Membentuk hierarki dan peran perkotaan sebagai PKN dan PPK, penyediaan fasilitas dan infrastruktur memadai, menata kawasan perkotaan sesuai fungsi dan peran dan peningkatan interaksi aksesibilitas antar kawasan	4. Meningkatkan efektifitas perencanaan pembangunan	4. Menata dan merehabilitasi kawasan permukiman dan infrastruktur permukiman yang mengalami kerusakan dan penurunan kualitas	4. Tersedianya dan berfungsinya IPAL Komunal untuk industri rumah tangga sebanyak menjadi 30 unit pada akhir tahun 2014
	b) Kebijakan dan Strategi Sistem Perdesaan	5. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	5. Memberikan akses bagi masyarakat berpendapatan menengah ke bawah untuk dapat menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau	5. Tersedianya dan berfungsinya 2 unit layanan pengelolaan Air Limbah Domestik skala kabupaten pada akhir tahun 2016
	Pengembangan kawasan perdesaan berbasis industri potensial	6. Meningkatnya penanganan persampahan	6. Mengendalikan dan menata perkembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan yang mendukung perwujudan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten yang hirakis, produktif dan berkelanjutan	
	- Penyediaan infrastruktur penunjang perdesaan berbasis pertanian dan perkebunan sbg pengembangan kawasan agropolitan			
	- Penyediaan infrastruktur penunjang perdesaan berbasis perikanan sbg pengembangan kawasan minapolitan			
	c) Kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah			
	- Kebijakan pengembangan sistem jaringan sumber daya air dengan pengembangan jaringan sumberdaya air lintas kabupaten dan kota;			

penyediaan dan pengembangan jaringan air baku untuk air bersih.

- Kebijakan dan strategi pengembangan prasarana sistem pengelolaan lingkungan diantaranya pengelolaan persampahan (TPA) menjadi sanitary landfill, optimalisasi sistem sanitasi lingkungan, penyediaan dan peningkatan air bersih, pengelolaan sistem drainase.

Kebijakan dan Strategi Penetapan Pola Ruang Wilayah Kabupaten :

- a) Kebijakan dan strategi pemantapan kawasan lindung
 - Kebijakan pemantapan kawasan perlindungan setempat berupa penyediaan RTH Publik dan privat dari 30% luas kawasan perkotaan
 - Kebijakan pelestarian dan pemantapan fungsi lindung kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan berupa bangunan kuno, cagar budaya kawasan wisata dan bangunan peninggalan sejarah
- b) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya
 - Kebijakan kawasan peruntukan pertanian dengan pengembangan kawasan agropolitan
 - Kebijakan kawasan peruntukan perikanan dengan pengembangan kawasan minapolitan
 - Kebijakan kawasan industri pengembangan kawasan peruntukan industri ramah lingkungan
 - Kebijakan kawasan peruntukan permukiman dengan pengembangan peruntukan

- permukiman perkotaan dan perdesaan
- c) Kebijakan dan strategi penetapan Kawasan Strategis Kabupaten adalah
- Terbagi dalam kewenangan pengelolaan kawasan strategis kabupaten diantaranya KSN, KSP dan KSK
 - KSN di Kabupaten Gresik berupa Pertumbuhan Ekonomi dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan TNI-AL di Desa Campurejo, Kecamatan Panceng
 - KSP terakomodasi di RTRW adalah KS pertumbuhan ekonomi di Kawasan Perindustrian; KS Kepentingan Sosial Budaya Kawasan Makam Sunan Giri dan Makam Malik Ibrahim; KS daya dukung lingkungan pengelolaan sumber daya buatan di Kecamatan Kedamean
 - KSK pengembangan ekonomi pada kawasan industri Manyar dan Kawasan Agroindustri di Kecamatan Panceng
- d) Kebijakan dan strategi penetapan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil optimalisasi kawasan nelayan dan minapolitan

STRATEGI			SKALA KABUPATEN GRESIK	Sub Sektor Air Limbah
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Sistem Instalasi Pengelolaan Air Bersih (IPA) Kecamatan 2. Pembangunan Jaringan Perpipaan dalam pemanfaatan mata air Umbulan 3. Pemanfaatan Air Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong Keperluan Penyediaan Air Bersih Perkotaan dan Perdesaan 4. Pemanfaatan dan pengembangan embung di Desa Sukodono Kecamatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi pembangunan dan peningkatan pemeliharaan jalan poros desa memiliki sentra-sentra produksi 2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten 3. Mendorong pemerintah pusat agar mempercepat proses pembangunan Bendung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan lahan untuk pembangunan fasilitas perumahan memenuhi SPM bidang perumahan 2. Menyediakan prasarana lingkungan memadai sesuai SPM bidang perumahan di setiap kawasan permukiman yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan perencanaan pengelolaan air limbah skala kabupaten 2. Meningkatkan pemahaman, kemitraan dan komitmen pengelolaan air limbah domestik dan industri rumah tangga 3. Mengoptimalkan dan inovasi

Panceng	Gerak Sembayat Baru	dibangun	program stimulus kepemilikan jamban keluarga sehat.
5. Pembangunan Bendung Gerak Sembayat mendukung penyediaan air baku	4. Melanjutkan pembangunan Tanggul Begawan Solo di Kecamatan Bungah -Pangkah	3 Memberikan fasilitas bagi perbaikan bangunan rumah dan lingkungan bagi masyarakat menengah kebawah	4. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan stakeholder tentang pengelolaan jamban keluarga.
6. Pembangunan perpipaan air minum melalui sistem gravitasi kawasan perbukitan Kecamatan Panceng, Ujungpangkah dan Wringinanom	5. Pembuatan masterplan banjir perkotaan dengan optimalisasi RTH	4 Mendorong pembangunan Rusunami dan Rusunawa khususnya di Kawasan Perkotaan	5. Mengoptimalkan operasi dan pemeliharaan MCK dan IPAL/Septiktank komunal melalui pengorganisasian masyarakat dalam kelompok
7. Pembangunan resevoir di Desa Giri Kecamatan Kebomas, Desa Morowudi Kecamatan Cerme dan Kecamatan Benjeng	6. Percepatan pembangunan Bendung Gerak Sembayat, WTP dan infrastruktur penunjang penyediaan air baku	5 Pengembangan dan penataan Kasiba dan Lisiba BS pada kawasan hinterland SMA	6. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan stakeholder pengelolaan IPAL/Septiktank komunal yang ramah lingkungan
8. Pembangunan Intake di Desa Cangkir Kecamatan Driyorejo dan Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom	7. Pembangunan infrastruktur penunjang kawasan ekonomi khusus di kawasan industri Kec. Manyar	6 Peningkatan peran serta dunia usaha dalam pengadaan dan pemeliharaan kawasan permukiman	7. Replikasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah domestic berbasis komunal pada wilayah padat penduduk, kumuh dan miskin kabupaten
9. Pembangunan IPA di Kecamatan Driyorejo dan Desa Bringkang Kecamatan Menganti	8. Pemanfaatan lahan bekas rencana pengelolaan limbah B3 di Kec. Cerme menjadi kaw perumahan terpadu	7 Mengendalikan perkembangan permukiman di sekitar kawasan konservasi dan kawasan lindung	8. Membangun sarana IPAL komunal industri rumah tangga di wilayah baru
10. Pembangunan dan pengelolaan TPA Ngipik dan TPA Roomo dengan sistem Sanitary Landfill berskala Regional Kota Surabaya, Gresik dan Sidoarjo serta instalasi pemrosesan lumpur tinja (IPLT) di Kecamatan Kedamean	9. Pembangunan Enviromental Recyling (ERP) guna pengolahan limbah khususnya di Kabupaten Gresik	8 Mengendalikan perkembangan permukiman yang berada di sempadan sungai	9. Optimalisasi fungsi Sarana dan Prasarana pengolah air limbah industri rumah tangga yang ada
11. Penataan dan pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Makam Maulana Malik Ibrahim, Makam Sunan Giri (Giri Kedaton), Makam Fatimah Binti Maimun, Makam Kanjeng Sepuh, Makam Nyi Ageng Pinatih, Makam Bupati Gresik I, Kawasan Gunung Surowati	10. Penaganan menyeluruh mulai hilir kali lamong perbaikan tanggul, pengerukan badan sungai, reboisasi daerah tangkapan/hulu dan penataan industri hilir	9 Menata kawasan permukiman padat dan kumuh di kawasan pusat kota, kawasan Heritage dan di Kawasan bantaran sungai	10. Menyediakan sarana & prasarana pengolahan air limbah domestic skala kabupaten
12. Pembangunan dan pengelolaan RTH pada kawasan perkotaan di Perkotaan Gresik, Driyorejo, Menganti, Kedamean dan Cerme	11. Percepatan pembangunan perumahan daerah perbatasan Gresik-Surabaya di Kec. Menganti dan Driyorejo	10 Memenuhi penyediaan infrastruktur layak bagi kawasan minim pelayanan infrastruktur	11. Mendorong minat swasta dalam layanan pengelolaan air limbah domestic
13. Penataan permukiman perkotaan di Kecamatan Driyorejo, Kedamean, Menganti dan Cerme	12. Pemanfaatan lahan paska tambang di wil Kec. Wringinanom, Menganti, Kedamean dan Driyorejo	11 Menguatkan kelembagaan antara pemerintah pusat/daerah, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengelolaan permukiman dan infrastruktur pendukungnya	
	13. Pengembangan pengepakan	12 Memberikan fasilitas dan mekanisme memudahkan bagi masyarakat untuk memiliki atau menghuni rumah melalui	Sub sektor Persampahan 1 Mengembangkan perencanaan sistem Persampahan kabupaten yang terintegrasi dan

- | | | | |
|--|--|--|---|
| 14. Perbaikan permukiman perdesaan RTLH | perikanan laut dalam keadaan | lembaga-lembaga | komprehensif |
| 15. Pengembangan Potensi Kawasan Agropolitan | hidup untuk konsumsi regional P. Bawean | pendanaan | 2 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan |
| 16. Pengembangan Potensi Kawasan Minapolitan | 14. Optimalisasi pengembangan Kaw. Agropolitan | 13 Memberikan kemudahan pengembangan kawasan permukiman | 3 Meningkatkan kinerja pengelolaan layanan persampahan. |
| | 15. Optimalisasi pengembangan Kaw. Minapolitan | 14 Mengembangkan permukiman sesuai peruntukan pada rencana tata ruang | 4 Mengoptimalkan kebijakan pengelolaan persampahan |
| | | 15 Melakukan penataan permukiman pada kawasan pesisir yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir | 5 Meningkatkan investasi dalam layanan pengelolaan persampahan |
| | | 16 Mendukung pengembangan kawasan permukiman perdesaan dalam kerangka agropolitan dan minapolitan | 6 Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan stakeholder dalam pengelolaan sampah dengan konsep 3 R |
| | | | 7 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan persampahan dengan konsep 3R |

SKALA KAWASAN

- 1 Penanganan Kawasan Pesisir Panceng
- 2 Penanganan Kawasan Pesisir Ujung Pangkah
- 3 Strategi Penanganan Kawasan Rawan Bencana Banjir Bengawan Solo dan Kali Lamong
- 4 Strategi Penanganan Kawasan Kota Baru
- 5 Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Pendukung Agro-Mina Politan
- 6 Kawasan Kota Gresik : Strategi penanganan sub kawasan prioritas alun-alun dan makam Maulana Malik Ibrahim
- 7 Kawasan Kota Gresik : Strategi penanganan sub kawasan prioritas wisata Kuliner dan Heritage

Sub sektor Drainase Lingkungan

1. Mengembangkan perencanaan sistem drainase kabupaten yang terintegrasi dan komprehensif
2. Meningkatkan pemahaman, kemitraan dan komitmen pengelolaan drainase lingkungan
3. Mengoptimalkan Fungsi Sistem Drainase Lingkungan Yang Sudah Ada
4. Mengoptimalkan Daya Dukung Kebijakan Pengelolaan Drainase Lingkungan

Aspek PHBS

6. Mengoptimalkan program UKBM untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam PHBS
7. Meningkatkan kuantitas dan

- | | | |
|----|---|---|
| 8 | Kawasan Kota Gresik : Strategi penanganan sub kawasan Makam Sunan Giri | kualitas kader kesehatan lingkungan dalam promosi PHBS |
| 9 | Kawasan Kota Gresik : Strategi penanganan sub kawasan pasar | 8. Mengoptimalkan peran instansi pemerintah dan sekolah dalam penerapan PHBS |
| 10 | Kawasan Kota Gresik : Strategi penanganan sub kawasan Proling KA | 9. Meningkatkan komitmen penentu kebijakan anggaran untuk PHBS |
| 11 | Kawasan Kota Gresik : Strategi Penanganan sub kawasan pesisir Lumpur-Kroman | 10. Mengembangkan program promosi PHBS yang menarik dan menjangkau semua lapisan masyarakat |
| | | 11. Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dalam promosi PHBS |

7.12.2. Strategi Pembangunan Kawasan

Beberapa dokumen perencanaan seperti RTBL dan RPKPP memiliki lingkup yang lebih kecil, yaitu berskala kawasan. Dokumen tersebut disusun untuk memberikan arahan pembangunan lingkungan permukiman di suatu kawasan prioritas. Oleh sebab itu, perlu dianalisis keterpaduan dokumen perencanaan kawasan yang ada di kabupaten/kota berdasarkan fungsi kawasan dan arahan pengembangan termasuk Kawasan Strategis Kabupaten yang diidentifikasi dalam RTRW.

Tabel 7.14. Matriks Strategi Pembangunan Kawasan Prioritas

DOKUMEN	FUNGSI KAWASAN	ARAHAN PENGEMBANGAN
KSK Kabupaten Gresik	RTRW Kawasan pengembangan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - pengembangan ekonomi yang ditetapkan di Kawasan Industri Manyar dan Kawasan Agroindustri di Kecamatan Panceng. - penelusuran potensi industri berbasis komoditas - penyediaan infrastruktur pendukung KEK - pemantapan kelembagaan KEK
RTBL Koridor Jl. Akim Kayat - Jl. M.H. Thamrin dan Jl. KH. Abdul Karim	city gate, city hall, dan city corridor	<ul style="list-style-type: none"> - empat spot yang berpotensi menjadi city gate; yaitu : (1) pertigaan Jl. Usman Sadar-Jl. Akim Kayat (gate ke alun-alun Gresik sekaligus gate koridor Akim Kayat-Thamrin); (2) pertigaan Jl. Akim Kayat-Thamrin dengan Abdul Karim, sebagai gate koridor Abdul Karim dari arah Selatan; (3) pertigaan Jl. Pahlawan-Jl. Thamrin, sebagai gate Jl. Thamrin dari arah Timur; dan (4) pertigaan Jl. Samanhudi-Jl. Abdul Karim sebagai gate koridor Abdul Karim dari arah Utara. City gate pertigaan Jl. Samanhudi-Jl. Abdul Karim bisa berfungsi sesudah bottle neck di sekitar pertigaan diurai dengan memperlebar Rumija di sekitar pertigaan tersebut - bagian koridor yang diposisikan sebagai jantung kegiatan koridor perencanaan adalah aglomerasi fasilitas pelayanan umum di Jl. Abdul Karim yang terdiri dari : Kantor lurah Terate, RSIA Nyai Ageng Pinatih dan kompleks Sekolah MINU - Koridor yang diposisikan sebagai city corridor adalah Jl. Akim Kayat-Thamrin dan Jl. Abdul Karim. Wujud city corridor adalah kegiatan komersial berskala lingkungan yang menampilkan aglomerasi linier toko retail, warung-warung kopi, kios dan kegiatan jasa yang melayani permukiman sekitarnya
RTBL Kawasan Bunder	terminal kargo, pusat grosir, tempat rekreasi dan tempat bermain anak, pusat makanan khas Gresik	<p>Blok Segitiga Terminal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghidupkan terminal angkutan kota dan perdesaan - zona makanan khas di bagian Utara, zona pusat grosir di bagian Tengah, dan zona terminal di bagian Selatan <p>Blok di Sisi Utara Jl. Raya Ambeng-ambeng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagian periferi diarahkan untuk perdagangan dan jasa berskala regional, sedangkan bagian belakang diarahkan untuk perumahan
RTBL Koridor Jl.	kegiatan campuran,	Alun-alun Gresik

Pahlawan Alun-Alun Raden Santri Jl. HOS Cokroaminoto Jl. Basuki Rahmat	- antara pemerintahan, peribadatan, perkantoran, perdagangan, dan masyarakat	kegiatan rekreasi sosialisasi	- Penguatan Ciri hybrid Alun-alun Gresik - Alun-alun Gresik difungsikan kembali untuk taman bagi kegiatan budaya, sosial dan rekreasi masyarakat Gresik - PKL yang berjualan di dalam halaman Alun-alun direlokasi ke Jl. Noto Prayitno dan dekat Tempat Parkir Bus Makam Maulana Malik Ibrahim di Desa Lumpur - Penataan kembali kompleks Pendopo dan Rumah Dinas Bupati Gresik menjadi kompleks yang lebih berkesan terbuka - Restorasi bangunan cagar budaya yang terdapat di sekeliling Alun-alun - kegiatan pemerintahan secara bertahap dipindahkan ke Bunder
--	--	-------------------------------	--

Koridor Jl. Basuki Rachmat

- Menghidupkan kegiatan campuran yang terdiri dari perdagangan, pemerintahan dan kuliner memanfaatkan peziarah ke Makam Maulana Malik Ibrahim yang rutenya melewati Jl. KH. Cholil
- pertigaan Jl. Basuki Rachmat dan Jl. KH. Cholil dan sekitar pertigaan Jl. Basuki Rachmat-Jl. Raden Santri, disediakan shelter
- memperkuat karakter koridor sebagai bagian dari Kawasan Kota Lama yang bersejarah melalui adaptasi, restorasi, dan preservasi.
- Menata kembali tampilan bangunan-bangunan agar laras melalui adaptasi, restorasi, dan preservasi
- Mempertegas tampilan kompleks Polres Gresik

Koridor Nyai Ageng Arem-arem

- Melestarikan secara fisik bangunan-bangunan cagar budaya melalui perawatan, pemeliharaan, perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi
- menghidupkan kawasan melalui berbagai kegiatan periodikal berupa kegiatan seni, budaya, industri kecil, serta kegiatan lain
- Memperjelas eksistensi kawasan cagar budaya dalam bentuk gerbang yang ditempatkan di pertigaan dengan Jl. KH. Cholil dan pertigaan Jl. Nyai Ageng Pinatih
- Pembangunan selter untuk memanfaatkan rute kendaraan pengangkut peziarah ke Makam Maulana Malik Ibrahim yang melewati Jl. KH. Cholil agar singgah ke kawasan ini

RTBL Koridor Panglima Sudirman, Jl. Jaksa Agung Suprpto, dan Jl. Usman Sadar	<i>city gate, city hall, dan city corridor</i>	- <i>City gate</i> atau gerbang kawasan kota lama, posisinya berada pada setiap jalan masuk utama menuju alun-alun, yaitu dari arah Selatan (Jl. Veteran), Barat (Jl. Ahmad Yani, Jl. Akim Kayat, dan Jl. Samanhudi), dan arah Utara (Jl. Raden Santri). <u>Wujud city gate berupa dua bangunan mengapit</u> Jl. Panglima Sudirman yang lebih tinggi dari bangunan sekitarnya - alun-alun Gresik diposisikan sebagai <i>city hall</i> - <i>city corridor</i> adalah Jl. Panglima Sudirman untuk pencapaian dari arah Selatan, dan Jl. Jaksa Agung Suprpto untuk pencapaian dari arah Barat. <u>Wujud city corridor</u> Jl. Panglima Sudirman adalah koridor dengan dominasi <i>perdagangan dan jasa retail</i> skala lokal yang menampilkan aglomerasi linier warung-warung kopi. Sedangkan wujud <i>city corridor</i> Jl. Jaksa Agung
--	--	--

		Suprpto, adalah dominasi kantor pemerintah BUMN/BUMD yang berorientasi <i>pelayanan publik</i> , perkantoran dan sekolah, dengan lingkup pelayanan kota dan regional. Perdagangan dan jasa di koridor ini diarahkan pada jenis penggunaan yang mendukung kegiatan perkantoran dan sekolah.
RPKPP	Permukiman (Kawasan Pesisir Lumpur-Kroman)	<ul style="list-style-type: none"> - Infill Kawasan - Peningkatan kualitas lingkungan permukiman - Konsolidasi Lahan
	Pengembangan (Permukiman Kawasan Pasar)	<ul style="list-style-type: none"> - Revitalisasi kawasan kompleks Pasar - Redevelopment bangunan pertokoan - Peningkatan kualitas lingkungan permukiman
	Permukiman Heritage dan Kuliner	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas bangunan - Preservasi - Peningkatan Kualitas Lingkungan - Penghijauan
	Permukiman Makam Maulana Malik Ibrahim Dan Alun-Alun	<ul style="list-style-type: none"> - Preservasi - Peningkatan Kualitas lingkungan permukiman - Renovasi - Penghijauan sempadan KA
	Permukiman Proling KA	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas lingkungan permukiman - Penghijauan
	Permukiman Makam Sunan Giri	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas lingkungan permukiman - Preservasi - Penataan entrance kawasan Makam Sunan Prapen sebagai wisara religi. - Pengembangan RTH dan Rekreasi Tlaga Pegat - Rehabilitasi - Redevelopment